

LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT 2021



Tangguh Bersama Tough Together
Bersama Juara Together to be a Champ

TANGGUH BERSAMA BERSAMA JUARA

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillahirrabbil'alamin, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga Laporan Tahunan PT Jamkrida Jabar Tahun 2021 telah selesai disusun dan disampaikan kepada Pemegang Saham sesuai waktu yang ditentukan.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan terkait, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengamanatkan bahwa Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (*enam*) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. Sesuai dengan regulasi tersebut, Laporan Tahunan dimaknai sebagai laporan hasil pengelolaan Perseroan, serta memuat pertanggungjawaban kinerja yang secara langsung mengarah pada pencapaian target Tahun Anggaran 2021.

Mengarungi perjalanan di hampir sepanjang tahun 2021 merupakan tantangan tersendiri bagi Perseroan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Di tengah ketatnya persaingan bisnis yang Perseroan hadapi, dunia masih dihadapkan pada pandemi Covid-19 yang belum berakhir dan cukup memberikan tekanan terhadap kondisi perekonomian dunia, nasional, dan juga daerah. Dampak pandemi Covid -19 yang sangat dirasakan oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha adalah melambatnya penyaluran kredit/pembiayaan oleh Lembaga Keuangan baik bank maupun non bank. Meningkatnya jumlah kredit/pembiayaan bermasalah memaksa industri perbankan di tanah air menerapkan tingkat kehati-hatian yang lebih tinggi dalam penyaluran kredit/pembiayaan dan memperketat likuiditas.

Namun dengan semangat membangun dan tekad yang bulat, maka segala tantangan dan rintangan pada tahun ini dapat Kita lewati dan menuai hasil yang positif. Berbekal dari pengalaman sebelumnya, PT Jamkrida Jabar semakin melebarkan sayapnya dalam melakukan ekspansi bisnis, dengan cara mengembangkan jaringan bisnis dengan mitra baru, dan menjaga kepercayaan para mitra yang telah ada dengan sebaik-baiknya, serta dengan prinsip kehati-hatian.

Manajemen secara bertahap mampu melanjutkan perkembangan positif dengan membukukan laba bersih sebesar Rp10,59 miliar, dan membukukan total aset yang cukup signifikan sebesar Rp413,92 miliar. Perolehan laba ini merupakan kontribusi Perusahaan terhadap penambahan Pendapatan Asli Daerah melalui pembagian dividen.

Pada tahun 2021, PT Jamkrida Jabar juga telah menjamin kredit sebesar Rp7,19 triliun dari total kredit sebesar Rp8,15 triliun. Dari total kredit tersebut, telah terjamin sebanyak 64.059 UMKM yang menyerap tenaga kerja sebanyak 327.019 orang. Keberhasilan dan kemajuan yang dicapai pada tahun 2021 merupakan hasil upaya bersama dari seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan di PT Jamkrida Jabar.

Demikian Laporan Tahunan PT Jamkrida Jabar Tahun Anggaran 2021 ini Kami susun dan sampaikan. Semoga PT Jamkrida Jabar dapat terus menjadi perusahaan penjaminan kredit terpercaya yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah, serta membantu mewujudkan Jawa Barat Juara Lahir Batin. **Tangguh Bersama, Bersama Juara. Aamiin.**

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
SEKILAS TENTANG PERSEROAN	6
KILAS KINERJA PERSEROAN	7
Ikhtisar Kinerja	7
Ikhtisar Keuangan	11
Ikhtisar Operasional	13
Peristiwa Penting Tahun 2021	14
LAPORAN MANAJEMEN	18
Laporan Dewan Komisaris	18
Laporan Dewan Pengawas Syariah	25
Laporan Direksi	29
Tanggung Jawab Pelaporan Tahunan	36
PROFIL PERUSAHAAN	37
Profil Perusahaan	37
Legalitas Usaha	38
Logo Perusahaan	39
Visi Misi Perusahaan	41
Nilai-Nilai Perusahaan	42
Produk Penjaminan Perusahaan	42
Komposisi Pemegang Saham	43
Profil Dewan Komisaris	44
Profil Dewan Pengawas Syariah	46
Profil Direksi	48
Komposisi Karyawan	51
Struktur Organisasi	52
KINERJA PERSEROAN	55
Kinerja Perseroan	55

Aspek Penjaminan	56
Aspek Keuangan	62
Aspek Manajemen Risiko	65
Aspek Klaim dan Subrogasi	67
Aspek Sumber Daya Manusia	70
Aspek Umum	74
Aspek Teknologi dan Kesteman	75
Aspek Pengawasan	76
UNIT USAHA SYARIAH	78
PROSPEK DAN PENGEMBANGAN USAHA	86
KEBIJAKAN DIVIDEN	88
RENCANA BISNIS TAHUN 2021	89
TATA KELOLA PERSEROAN	106
Komitmen Penerapan GCG	106
Tujuan Penerapan GCG	106
Dasar Penerapan GCG	106
Struktur dan Mekanisme GCG	107
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	113
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	116
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	119
Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Komite Perseroan Di Bawah Dewan Komisaris	121
Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Komite Perseroan Di Bawah Direksi	131
Penerapan Fungsi Kepatuhan, Auditor Internal, dan Auditor Eksternal	134
Penerapan Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian Internal, dan Tata Kelola Teknologi Informasi	141
Penerapan Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pegawai	142
Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Perusahaan	145
Pengungkapan Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang Mencapai 5% (lima per seratus) atau Lebih, yang Meliputi Jenis dan Jumlah Lembar Saham	148
Pengungkapan Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota DPS dengan Anggota Direksi Lain, Anggota	148

Dewan Komisaris Lain, Anggota DPS Lain, dan/atau Pemegang Saham PT Jamkrida Jabar

Pengungkapan Hal Penting Lainnya **150**

LAPORAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* **153**

LAPORAN AUDIT **155**

Surat Pernyataan Direksi **158**

Laporan Auditor Independen **159**

Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2020-2021 **161**

SEKILAS TENTANG PERSEORAN

PT Jamkrida Jabar



Alamat

Jalan Soekarno Hatta Nomor 592, Kota Bandung,
Jawa Barat, 40286
Telepon : (022) 7504777, 7506307,
(022) 7500380 (Unit Usaha Syariah)
Faksimile: (022) 7563333
Email : info@jamkrida-jabar.co.id
Website : www.jamkrida-jabar.co.id

Pemegang Saham

- Pemerintah Provinsi Jawa Barat 99,87%
- Yayasan Kesejahteraan Pegawai bank bjb 0,13%



Tanggal Pendirian

03 Oktober 2012

Modal Dasar

Rp300.000.000.000
(tiga ratus miliar rupiah)



Modal Disetor

Rp153.200.000.000
(seratus lima puluh tiga miliar dua ratus
juta rupiah)

Bidang Usaha

Penjaminan



Jumlah Pegawai

(Per 31 Desember 2021)

36 orang

Hasil Audit

KAP 2021

KAP Hertanto, Grace, Karunawan (HGK)
memberikan Opini Audit Wajar,
dalam Semua Hal yang Material
sesuai Laporan Audit Independen Nomor :
00113/2.1000/AU.1/08/1290-2/1/IV/2022
tanggal 14 April 2022.



Tingkat Kesehatan Keuangan 2021

Nilai 1,945; berada pada rentang
 $1,8 < \text{TKK} < 2,6$ dengan menunjukkan
kategori keuangan yang SEHAT.

Rating Perusahaan

(periode 02 Agustus 2021 s.d.
01 Agustus 2022)

idBBB (Triple B; Stable Outlook)
dari Lembaga Pemeringkat
PT PEFINDO



Kilas Kinerja Perseroan



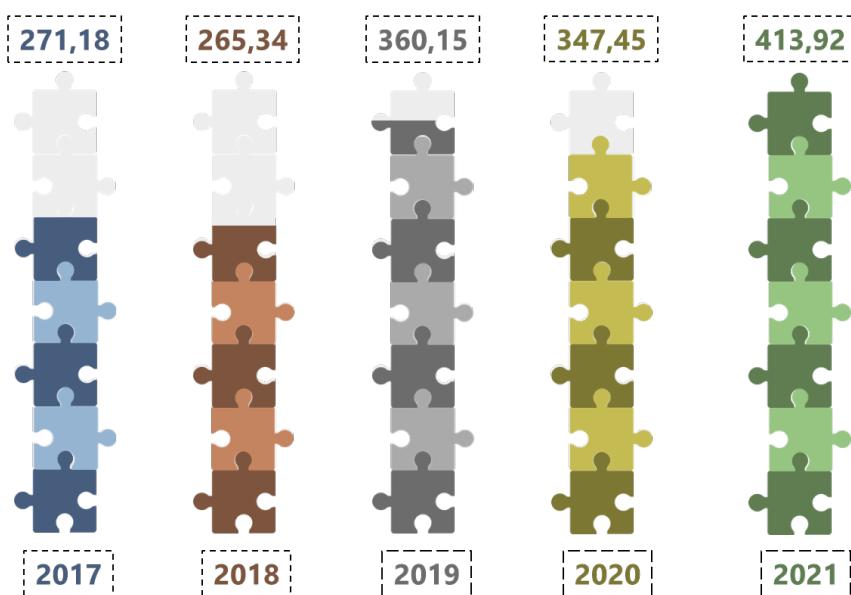


KILAS KINERJA PERSEROAN

IKHTISAR KINERJA

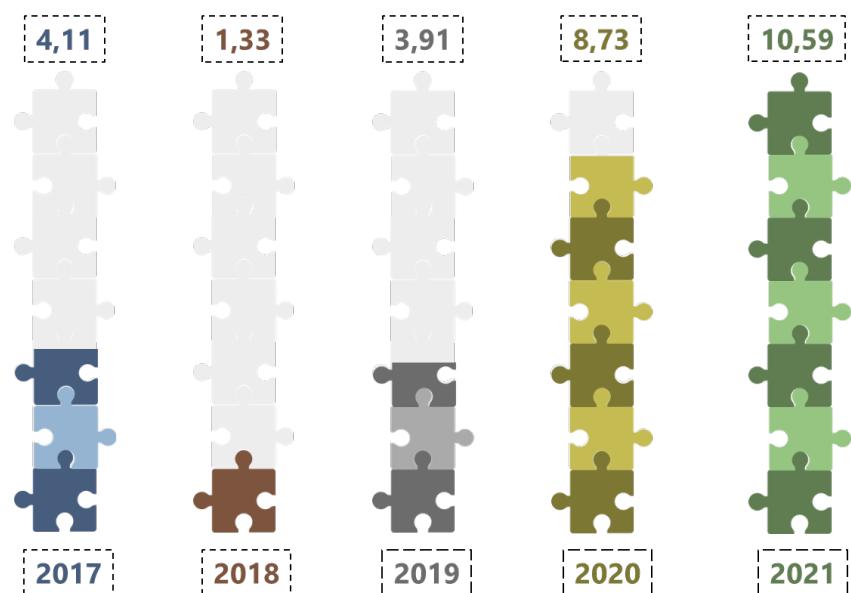
TOTAL ASET

dalam Miliar Rupiah



LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN

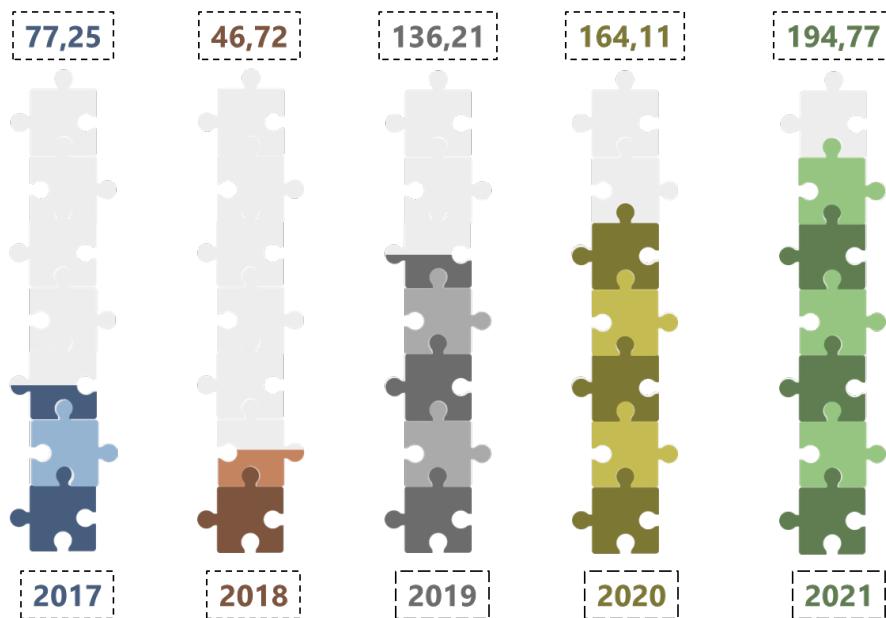
dalam Miliar Rupiah





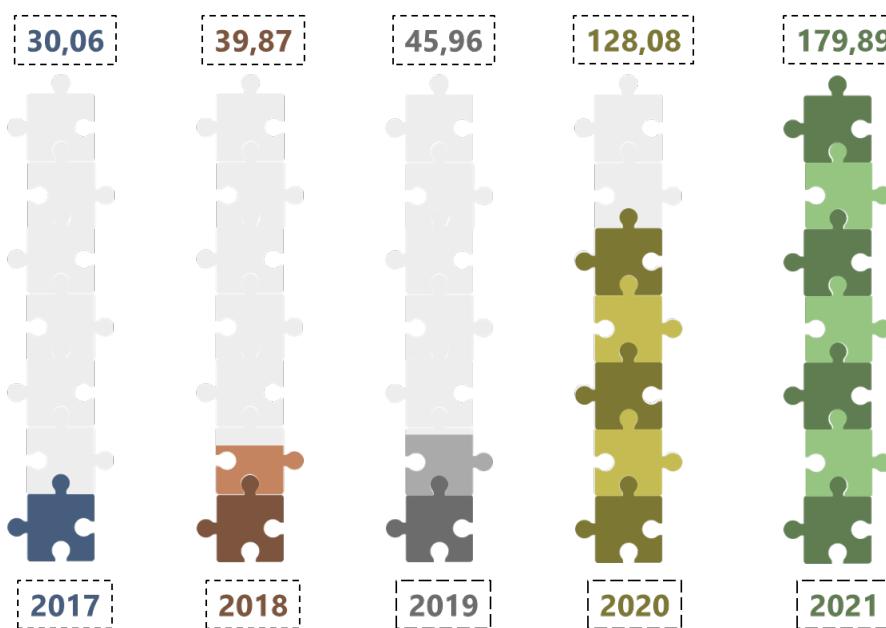
IMBAL JASA PENJAMINAN (CASH BASIS)

dalam Miliar Rupiah



IMBAL JASA PENJAMINAN (ACCRUAL BASIS)

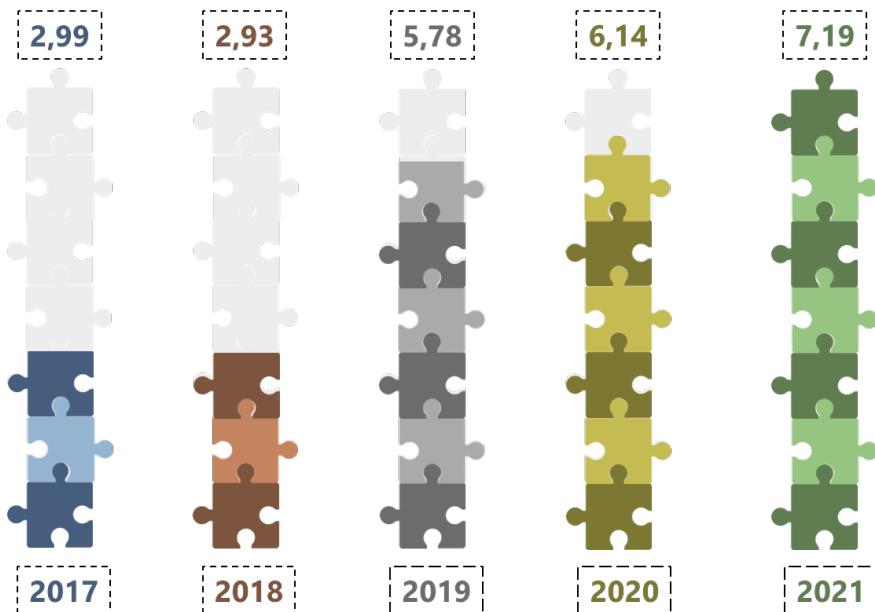
dalam Miliar Rupiah





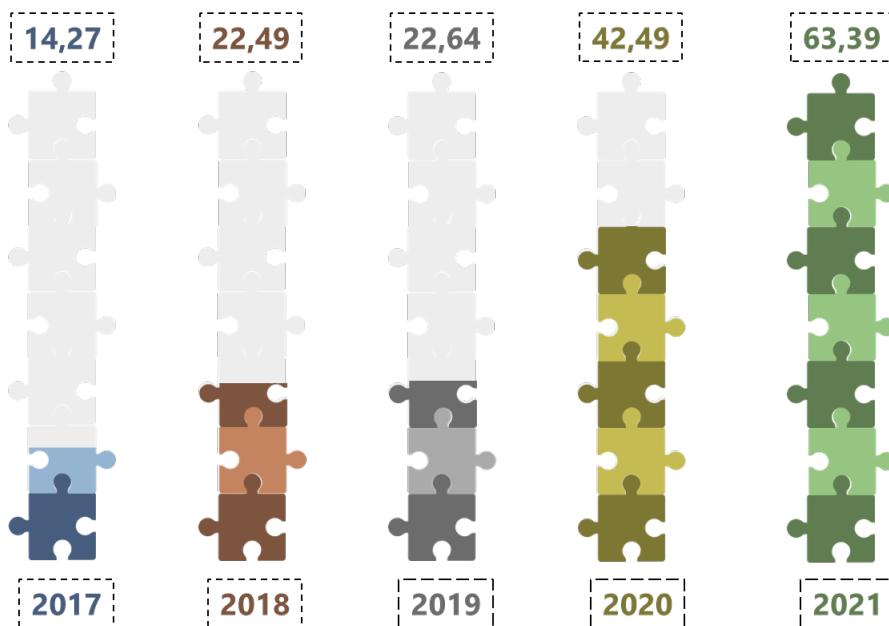
VOLUME PENJAMINAN

dalam Triliun Rupiah



PEMBAYARAN KLAIM

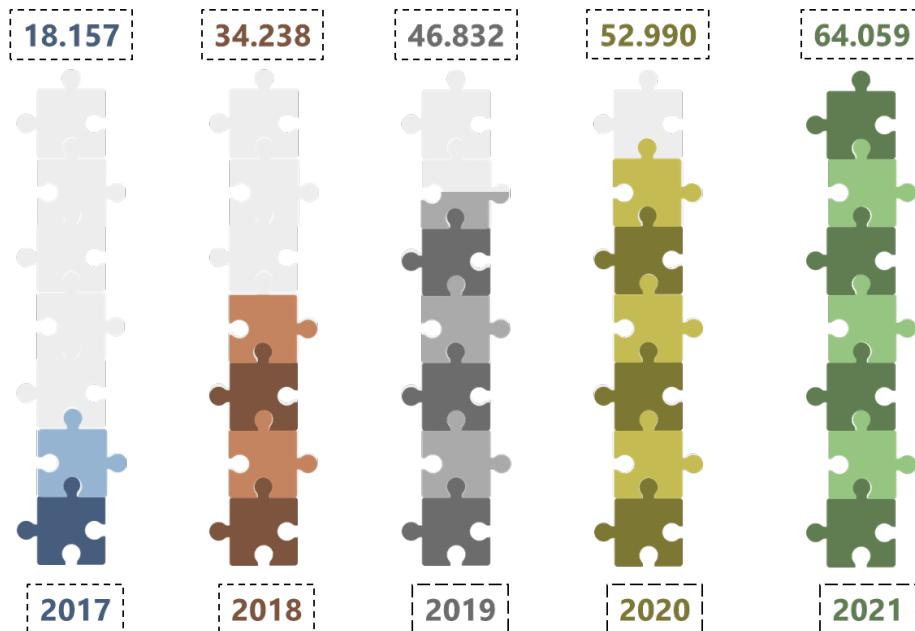
dalam Miliar Rupiah





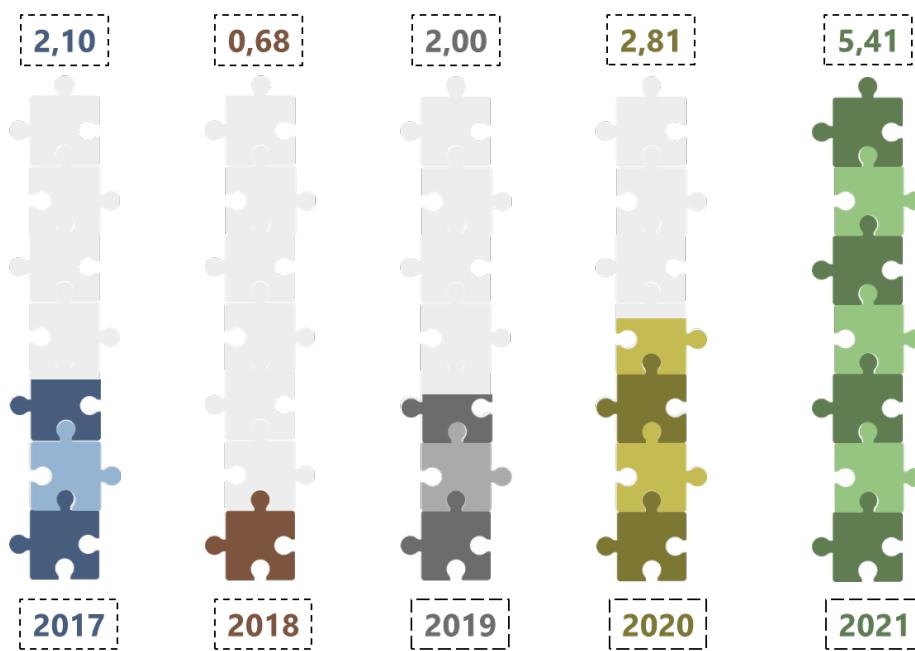
KUMKM TERJAMIN

dalam satuan orang/unit



PEMBAYARAN DIVIDEN

dalam Miliar Rupiah





IKHTISAR KEUANGAN

PT JAMKRIDA JABAR
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2017 S.D. 31 DESEMBER 2021

(dalam Jutaan Rupiah)

	2017	2018	2019	2020	2021
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan Setara Kas	160.417,54	139.780,66	171.333,69	187.692,64	156.208,33
Dikurangi : Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasi	-	-	-	(13.497,57)	(4.405,11)
Surat Berharga	40.001,96	42.117,68	49.163,25	63.482,84	78.971,23
Dikurangi : Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasi	-	-	-	(1.563,07)	(136,84)
Piutang Re/Cogaransi	2.966,50	8.000,29	3.455,04	8.784,56	63.283,02
Dikurangi : Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasi	-	-	-	-	(4.560,60)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	659,60	659,58	1.089,87	1.306,36	12.815,54
Dikurangi : Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasi	-	-	-	-	(852,51)
Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka	437,20	11.669,51	18.399,38	16.840,15	20.439,93
Piutang Lain-Lain	40,15	99,03	123,39	79,18	152,34
Properti Investasi	-	2.445,00	2.472,00	2.495,10	2.495,10
JUMLAH ASET LANCAR	204.522,95	204.771,76	246.036,61	265.620,18	324.410,43
ASET TIDAK LANCAR					
Beban Dibayar Dimuka	47.161,93	40.751,57	94.168,00	56.017,39	65.501,96
Aset Tetap - Bersih	12.599,99	12.246,52	12.325,18	13.337,30	13.246,95
Aset Pajak Tangguhan	6.393,22	6.856,02	7.270,57	12.325,18	10.534,79
Aset Lain-Lain	500,85	717,05	348,81	152,52	229,61
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	66.655,99	60.571,17	114.112,55	81.832,39	89.513,31
JUMLAH ASET	271.178,94	265.342,93	360.149,16	347.452,57	413.923,73
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS					
LIABILITAS JANGKA PENDEK					
Utang Pajak	203,22	275,36	383,57	390,48	502,23
Utang Re/Cogaransi	850,24	3.289,61	4.572,29	6.553,05	43.040,33
Utang Klaim	-	-	-	1.914,59	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	941,90	1.267,54	898,40	377,24	514,27
Penampungan Sementara	15.328,73	3.048,70	4.008,55	6.133,52	11.793,69
Utang Lancar Lainnya	275,27	65,47	12,89	5,25	0,24
Pendapatan Diterima Dimuka	2.184,00	23.943,19	32.073,36	31.261,35	35.709,29
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	19.783,36	31.889,88	41.949,07	46.635,50	91.560,06
LIABILITAS JANGKA PANJANG					
Pendapatan Diterima Dimuka	87.249,03	70.909,00	151.295,08	91.805,86	98.071,34
Cadangan Klaim	3.457,81	3.192,04	4.050,46	6.482,60	18.908,36
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	909,01	1.266,83	1.776,03	2.347,15	2.126,35
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	91.615,86	75.367,87	157.121,57	100.635,61	119.106,06
JUMLAH LIABILITAS	111.399,22	107.257,75	199.070,65	147.271,11	210.666,11
EKUITAS					
Modal	153.200,00	153.200,00	153.200,00	153.200,00	153.200,00
Cadangan Umum	2.734,82	3.761,25	4.094,65	35.601,30	40.139,07
Saldo Laba	4.105,75	1.333,59	3.907,91	8.730,88	10.585,17
Selisih Nilai Wajar Surat Berharga	-	(66,00)	87,16	2.927,57	(569,21)
Selisih Pengukuran Kembali Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	(260,85)	(143,66)	(211,20)	(278,28)	(97,40)
JUMLAH EKUITAS	159.779,72	158.085,18	161.078,51	200.181,46	203.257,62
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	271.178,94	265.342,93	360.149,16	347.452,57	413.923,73

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan



PT JAMKRIDA JABAR
LAPORAN LABA (RUGI) KOMPREHENSIF
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2017-2021

(dalam Jutaan Rupiah)

	2017	2018	2019	2020	2021
PENDAPATAN PENJAMINAN					
Imbal Jasa Penjaminan/Kafalah	30.928,17	41.301,95	47.732,91	130.550,63	183.093,49
Beban Akuisisi	(3.794,30)	(5.414,68)	(6.835,63)	(22.669,04)	(30.728,20)
Restitusi IJP	(864,44)	(1.434,28)	(1.773,30)	(2.467,49)	(3.202,34)
Manajemen Fee	1.400,00	744,03	3.219,84	7.397,62	17.534,90
Beban Regaransi	(9.770,25)	(11.580,81)	(14.268,88)	(57.600,88)	(90.364,19)
JUMLAH PENDAPATAN PENJAMINAN	17.899,17	23.616,21	28.074,93	55.210,84	76.333,65
KLAIM					
Beban Klaim	(14.274,79)	(22.490,35)	(22.636,37)	(42.487,07)	(63.389,13)
Pemulihan (Pembentukan) Cadangan Klaim	1.414,45	265,77	(858,42)	2.725,39	(3.637,83)
JUMLAH KLAIM	(12.860,34)	(22.224,58)	(23.494,80)	(39.761,68)	(67.026,97)
PENDAPATAN PENJAMINAN BERSIH	5.038,83	1.391,63	4.580,13	15.449,16	9.306,69
PENDAPATAN INVESTASI	13.625,45	13.359,58	14.935,39	17.265,45	14.965,35
PENDAPATAN SUBROGASI	831,83	3.231,63	3.218,32	1.815,94	2.621,93
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN	(2.511,32)	(1.649,13)	(2.379,18)	(13.257,26)	3.522,75
BEBAN USAHA					
Beban Operasional	(1.196,32)	(1.580,91)	(2.001,36)	(1.379,40)	(2.872,88)
Beban Sumber Daya Manusia	(9.738,94)	(11.074,81)	(11.415,12)	(11.817,03)	(10.514,47)
Beban Administrasi dan Umum	(3.359,78)	(2.846,27)	(3.422,31)	(3.883,75)	(5.301,95)
JUMLAH BEBAN USAHA	(14.295,03)	(15.501,98)	(16.838,79)	(17.080,18)	(18.689,30)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	2.689,76	831,73	3.515,88	4.193,11	11.727,41
BEBAN PAJAK PENGHASILAN					
Beban Pajak Kini	-	-	-	-	-
Manfaat Pajak Tangguhan	1.415,99	501,86	392,04	4.537,77	(1.142,25)
JUMLAH BEBAN PAJAK PENGHASILAN	1.415,99	501,86	392,04	4.537,77	(1.142,25)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	4.105,75	1.333,59	3.907,91	8.730,88	10.585,17
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	(264,99)	117,19	85,61	2.675,05	(3.315,90)
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	3.840,76	1.450,78	3.993,52	11.405,92	7.269,27

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan



IKHTISAR OPERASIONAL

PT JAMKRIDA JABAR
IKHTISAR KINERJA OPERASIONAL
TAHUN 2021

	RKAP 2021 PERUBAHAN	REALISASI 2021	REALISASI 2020	CAPAIAN 2021	GROWTH 2020-2021
LABA BERSIH TAHUN					
1. BERJALAN <i>(dalam Jutaan Rupiah)</i>	5.763,93	10.585,17	8.730,88	183,64%	21,24%
2. TOTAL ASET <i>(dalam Jutaan Rupiah)</i>	364.137,14	413.923,73	347.452,57	113,67%	19,13%
3. VOLUME KREDIT <i>(dalam Jutaan Rupiah)</i>	16.976.689,88	8.157.948,99	6.413.807,21	48,05%	27,19%
VOLUME					
4. PENJAMINAN <i>(dalam Jutaan Rupiah)</i>	6.726.041,35	7.190.248,57	6.726.041,35	106,90%	6,90%
IMBAL JASA					
5. PENJAMINAN (ACCRUAL)* <i>(dalam Jutaan Rupiah)*</i>	151.138,44	179.891,15	128.083,14	119,02%	40,45%
6. GEARING RATIO <i>(dalam satuan kali)</i>	27,95	30,75	25,47	110,04%	20,74%
7. KLAIM <i>(dalam Jutaan Rupiah)</i>	56.362,32	63.389,13	42.487,07	112,47%	49,20%
8. SUBROGASI <i>(dalam Jutaan Rupiah)</i>	2.621,93	2.186,91	1.815,94	83,41%	20,43%
PENDAPATAN					
9. INVESTASI <i>(dalam Jutaan Rupiah)</i>	15.452,81	14.965,35	17.265,45	96,85%	-13,32%
10. KUMKM TERJAMIN <i>(dalam satuan unit/orang)</i>	41.893	64.059	52.990	152,91%	20,89%

*) setelah dikurangi restitusi IJP



PERISTIWA PENTING TAHUN 2021



28 Desember 2021
Perkenalan Komisaris Utama
PT Jamkrida Jabar



29 November 2021
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(RKAP 2022)



25 November 2021
Pra Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(RKAP 2022)



24 November 2021
Rapat Fasilitasi dengan Kemendagri terkait
Usulan Perubahan Perda No. 17 Tahun 2012



4 Oktober 2021
Perayaan HUT ke-9 PT Jamkrida Jabar



4 Oktober 2021
Perayaan HUT ke-9 PT Jamkrida Jabar



23 September 2021
Serah Terima Pekerjaan
Direksi PT Jamkrida Jabar



13 September 2021
Exit Meeting Pemeriksaan Langsung Jarak Jauh
PT Jamkrida Jabar Tahun 2021 oleh OJK



8 September 2021
Sinergi Pemberantasan Korupsi Dunia Usaha di
Lingkungan Provinsi Jawa Barat



3 September 2021
Penandatanganan PKS Penjaminan Bank Garansi
dengan PT Bank KB Bukopin, Tbk.



24 Agustus 2021
Rapat Evaluasi Kinerja Semester I Tahun 2021
dengan Biro BIA Setda Jabar



23 Agustus 2021
Entry Meeting Pemeriksaan Langsung Jarak Jauh
PT Jamkrida Jabar Tahun 2021 oleh OJK



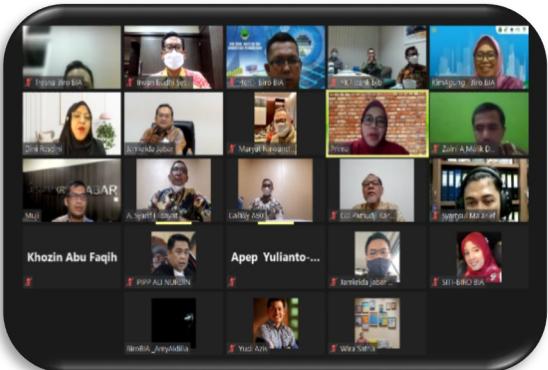
20 Agustus 2021
Rapat Kerja dengan Pansus III Raperda
DPRD Provinsi Jawa Barat terkait
Perubahan Perda No. 17 Tahun 2012



7 Juli 2021
Penyerahan Bantuan Hospital Bed Set kepada
RS Tk. II Dusitra Cimahi dalam Rangka
Penanganan Covid-19 di Jawa Barat



28 Juni 2021
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Jamkrida Jabar Tahun Buku 2020



21 Juni 2021
Pra Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Jamkrida Jabar Tahun Buku 2020



7 Juni 2021
Menerima Kunjungan Kerja Komisi 2 DPRD
Provinsi Banten dalam Rangka Koordinasi
Mengenai Kemandirian & Pemberdayaan KUMKM



2 Juni 2021
Motivation Session for Jamkrida Jabar
“Melompat Lebih Tinggi di Masa Pandemi”



27 Mei 2021
Rapat Kerja Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (Aspenda)



20 Mei 2021
Menerima Kunjungan Kerja Direktur Bisnis LPDB-KUMKM terkait Kerja Sama Penjaminan Pinjaman Dana Bergulir



20 Mei 2021
Rapat Kerja dengan Pansus III Raperda DPRD Provinsi Jawa Barat terkait Usulan Perubahan Perda No. 17 Tahun 2012



4 Mei 2021
Rapat Kerja dengan Komisi 3 DPRD Provinsi Jawa Barat terkait Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2021 & Kebutuhan Permodalan



29 April 2021
Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2021 dengan Biro BIA Setda Provinsi Jawa Barat



24 April 2021
Acara Buka Bersama on the Screen (Bubos) 2021

Laporan Manajemen



LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya yang terhormat,

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, perkenankanlah saya, atas nama Dewan Komisaris PT Jamkrida Jabar ("Perseroan") menyampaikan laporan pengawasan Dewan Komisaris atas pengelolaan Perseroan selama tahun 2021.

Sebagaimana yang telah kita lalui bersama, Dewan Komisaris menyadari bahwa di tahun 2021 Perseroan masih dihadapkan pada situasi yang tidak mudah. Di tengah ketatnya persaingan bisnis yang Perseroan hadapi, dunia masih dihadapkan pada pandemi Covid-19 yang belum berakhir dan masih memberikan tekanan terhadap kondisi perekonomian dunia, nasional, dan juga daerah.

Meskipun dalam tekanan penyebaran penyakit Covid-19 Varian Delta dan Omicron yang disebabkan oleh virus Corona yang telah bermutasi, namun kondisi perekonomian global terus menunjukkan kinerja membaik di tahun 2021.

Kondisi perekonomian nasionalpun terus membaik seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi yang tidak terlepas dari keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan kasus Covid-19 dan dukungan kebijakan stimulus ekonomi.

Aksi kolektif dan kolaborasi pemerintah (termasuk Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia), industri, dunia usaha dan masyarakat dalam rangka Program Penanganan Covid-19, diikuti perluasan dan percepatan Program Vaksinasi di tahun 2021, serta Program Pemulihan Ekonomi Nasional telah terbukti efektif dalam menjaga momentum pemulihian ekonomi.

Dewan Komisaris sebagai organ Perseroan melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan Perseroan, memberikan arahan dan nasihat kepada Direksi melalui mekanisme-mekanisme sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di tahun 2021, Dewan Komisaris telah melakukan komunikasi yang intensif dengan Direksi untuk membahas isu-isu krusial yang dihadapi Perseroan terutama berkaitan dengan upaya mitigasi risiko sebagai langkah antisipatif (masih) merespon dampak Pandemi Covid-19 terhadap kegiatan usaha penjaminan.

Dewan Komisaris bersama Komite dibawah Dewan Komisaris secara periodik, telah menyampaikan arahan dan nasihat kepada manajemen untuk tetap berkomitmen menerapkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, mematuhi Anggaran Dasar Perseroan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta meningkatkan kualitas *internal control* dalam setiap aktivitas Perseroan, termasuk pada konsistensi pencapaian target RKAP Tahun 2021, implementasi strategi Perseroan, dan prospek usaha yang disusun Direksi.

Pada kesempatan ini, kami sampaikan laporan tugas pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris terhadap jalannya kepengurusan yang telah dilakukan oleh Direksi sepanjang tahun 2021.

PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI

Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kinerja Direksi dalam mengelola Perseroan yang telah mampu menghadapi tantangan perekonomian di tengah Pandemi Covid-91 yang belum berakhir sejak tahun 2020. Penilaian Dewan Komisaris atas kinerja Direksi didasarkan atas kinerja operasional dan keuangan serta tingkat kesehatan Perseroan di tengah kondisi perekonomian yang tidak stabil yang dapat berdampak secara langsung pada kegiatan usaha Perseroan.

Dewan Komisaris tentunya menyadari dalam kondisi demikian target RKAP tahun 2021 tidaklah mudah untuk diraih. Namun demikian terdapat beberapa indikator operasional masih menunjukkan hasil yang baik.

Pendapatan Penjaminan

Realisasi Pendapatan Penjaminan YTD Desember 2021 telah mencapai target RKAP YTD Desember 2021 Perubahan, yaitu mencapai 108,81% dari target dan realisasi YTD Desember 2021 lebih tinggi atau tumbuh 38,26% dari realisasi YTD Desember 2020.

Beban Klaim

Realisasi Beban Klaim YTD Desember 2021 lebih tinggi dari target RKAP YTD Desember 2021 Perubahan, yaitu mencapai 112,47% dari target. Realisasi YTD Desember 2021 ini juga meningkat sebesar 68,57% apabila dibandingkan dengan realisasi YTD Desember 2020.

Pendapatan Investasi

Realisasi Pendapatan Investasi neto YTD Desember 2021 belum mencapai target RKAP YTD Desember 2021 Perubahan, yaitu mencapai 96,85% dari target RKAP YTD Desember 2021 Perubahan. Realisasi YTD Desember 2021 turun sebesar 13,32% dari realisasi YTD Desember 2020.

Pendapatan Subrogasi

Realisasi Pendapatan Subrogasi YTD Desember 2021 telah mencapai target RKAP YTD Desember 2021 Perubahan, yaitu mencapai 119,89% dari RKAP YTD Desember 2021 Perubahan. Realisasi YTD Desember 2021 saat ini mengalami kenaikan sebesar 44,38% dari realisasi YTD Desember 2020.

Beban Usaha

- Realisasi Beban Usaha YTD Desember 2021 masih lebih rendah dari target RKAP YTD Desember 2021 Perubahan, yaitu baru mencapai 76,49% dari RKAP YTD Desember 2021 Perubahan. Realisasi YTD Desember 2021 lebih tinggi sebesar 9,42% dari realisasi YTD Desember 2020.
- Realisasi Beban Operasional YTD Desember 2021 masih di bawah target RKAP YTD Desember 2021 Perubahan, yaitu baru mencapai 95,16% dari RKAP YTD Desember 2021 Perubahan. Realisasi YTD Desember 2021 ini lebih tinggi sebesar 108,2% dari realisasi YTD Desember 2020.
- Realisasi Beban SDM YTD Desember 2021 ini baru mencapai 66,98% dari target RKAP YTD Desember 2021 Perubahan. Realisasi YTD Desember 2021 ini juga masih lebih rendah sebesar 11,02% dari realisasi YTD Desember 2020.
- Realisasi Beban Administrasi dan Umum YTD Desember 2021 masih di bawah target RKAP YTD Desember 2021 Perubahan, yaitu baru mencapai 92,77% dari target. Realisasi YTD Desember 2021 ini meningkat sebesar 36,52% dari realisasi YTD Desember 2020.

Laba Rugi

Pada YTD Desember 2021 Perseroan telah mampu mencatatkan laba bersih dan mencapai target RKAP YTD Desember 2021 Perubahan, yaitu mencapai 183,64% dari target. Realisasi YTD Desember 2021 ini meningkat sebesar 21,24% dari realisasi YTD Desember 2020.

Posisi Keuangan

- Total Aset Perseroan per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar 19,13% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2020. Hal ini disebabkan karena kenaikan aset lancar sebesar 22,13% dan aset tidak lancar sebesar 9,39%.
- Liabilitas jangka pendek naik 96,33%, liabilitas jangka panjang naik 18,35%, dan ekuitas naik 1,54% apabila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2020.

Komposisi Penjaminan

Realisasi Penjaminan Produktif di Desember 2021 memiliki proporsi yang meningkat dibandingkan dengan realisasi di Desember 2020. Komposisi Penjaminan Produktif sebesar 21,76% sedangkan Penjaminan Non Produktif turun menjadi sebesar 78,24%. Walaupun proporsi Penjaminan Produktif mengalami trend yang selalu meningkat, namun Perseroan perlu memperhatikan komposisi ini karena masih belum sesuai dengan ketentuan di POJK dengan batasan Penjaminan Produktif minimal sebesar 25%.

Gearing Ratio

Total *Gearing Ratio* (GR) di bulan Desember 2021 adalah 31,36 kali. Perusahaan harus terus mengambil langkah-langkah yang strategik agar GR ini tidak terus meningkat karena berdasarkan ketentuan OJK, GR maksimal adalah 40 kali.

Realisasi Penjaminan

- Realisasi Volume Kredit YTD Desember 2021 belum mampu mencapai target RKAP YTD Desember 2021 Perubahan, yaitu baru mencapai 48,05% dari target. Namun demikian, realisasi YTD Desember 2021 ini lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu mencapai 127,19% dari realisasi YTD Desember 2020.
- Realisasi Volume Penjaminan YTD Desember 2021 telah mencapai 106,90% dari target RKAP YTD Desember 2021 Perubahan. Realisasi YTD Desember 2021 ini lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu mencapai 117,01% dari realisasi YTD Desember 2020.
- Realisasi IJP Accrual Basis YTD Desember 2021 telah mampu mencapai target RKAP YTD Desember 2021 Perubahan, yaitu mencapai 119,02% dari target. Begitu juga dengan realisasi IJP Cash Basis di YTD Desember 2021 telah mampu mencapai target RKAP YTD Desember 2021 Perubahan, yaitu mencapai 117,45% dari target.

TATA KELOLA, PENGELOLAAN RISIKO, DAN KEPATUHAN

Dewan Komisaris berpandangan bahwa Direksi telah berupaya mengimplementasikan prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG) dalam pengurusan Perseroan. Sejalan dengan GCG, pengelolaan risiko juga cukup mendapat perhatian dan dilakukan secara cukup memadai dalam proses bisnis, walaupun upaya menuju pengelolaan risiko yang lebih handal masih perlu dilakukan.

Dewan Komisaris juga berpandangan bahwa aspek ketataan dalam pengurusan Perseroan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku cukup baik termasuk pada ketentuan internal yang berlaku di Perseroan. Dalam hal ini, hasil-hasil pemeriksaan oleh pihak-pihak eksternal seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kantor Akuntan Publik tidak melaporkan adanya penyimpangan yang signifikan dan kecurangan.

PENGAWASAN DAN PEMBERIAN NASIHAT KEPADA DIREKSI

Dewan Komisaris memantau, mencermati, membahas, dan menyampaikan pandangan serta saran terhadap langkah-langkah pengelolaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dengan mendasarkan pada laporan-laporan yang disampaikan oleh Direksi ataupun data yang diperoleh Dewan Komisaris melalui permintaan kepada Direksi. Forumnya dalam pertemuan bulanan Dewan Komisaris dan Direksi atau pada waktu-waktu tertentu sesuai kebutuhan atau permintaan Dewan Komisaris atau Direksi.

Selanjutnya, secara berkala Dewan Komisaris melaporkan tugas pengawasannya kepada pemegang saham melalui Laporan Triwulan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.

Direksi dan jajaran Manajemen Perusahaan telah memberikan kerja sama yang baik dan tidak ditemukan hal-hal yang menghambat Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris akan terus membangun hubungan kerja yang efektif dan harmonis bersama Direksi agar pengelolaan Perseroan senantiasa berjalan sesuai harapan para pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Secara ringkas, Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris di tahun 2021 antara lain sebagai berikut:

Penilaian terhadap Kinerja Direksi

No.	Deskripsi
1	Pertumbuhan Pendapatan Penjaminan
2	Pengendalian Beban Klaim serta sesuai dengan SLA
3	Upaya meningkatkan Pendapatan Investasi dan Pendapatan Subrogasi
4	Efisiensi Beban Usaha
5	Upaya Pencapaian Laba Perseroan sesuai dengan Target
6	Peningkatan Aset pada posisi laporan keuangan
7	Pemenuhan Komposisi Rasio Penjaminan bagi Usaha Produktif
8	Penambahan Modal untuk menjaga <i>Gearing Ratio</i>

Pengawasan terhadap Implementasi Strategi Perseroan yang Dilakukan oleh Direksi

No.	Deskripsi
1	Ekspansi bisnis berbasis risiko dan keuntungan
2	Investasi berbasis Resiprokal dan optimalisasi Subrogasi
3	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
4	Pengembangan layanan berbasis Teknologi Informasi

Pandangan atas Prospek Usaha yang Disusun oleh Direksi

No.	Deskripsi
1	Pertumbuhan usaha Perseroan
2	Kompetitif di tengah Persaingan Usaha

Penerapan Good Corporate Governance (GCG)

No.	Deskripsi
1	Review SOP dan melengkapi dokumen SOP
2	<i>Assessment GCG</i>
3	Mematuhi Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2021, terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris yaitu sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS
1	Muhammad Taufiq Budi Santoso	Komisaris Utama	Akta No. 07 Tanggal 21-12-2021

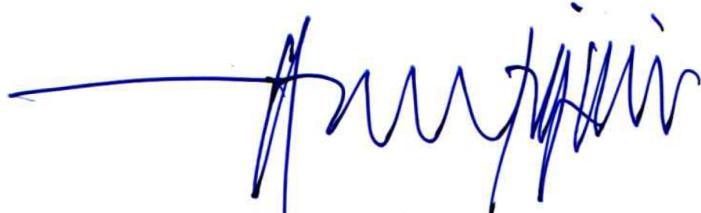
APRESIASI

Menutup Laporan Pengawasan Dewan Komisaris tahun 2021 ini, perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada para pemegang saham PT jamkrida Jabar dan para pemangku kepentingan lainnya atas dukungan yang diberikan sehingga Perseroan mampu melalui tahun 2021 dengan capaian kinerja yang cukup memuaskan.

Dewan Komisaris menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Direksi dan seluruh karyawan atas dedikasi, integritas, dan kerja kerasnya untuk menjadikan PT Jamkrida Jabar tetap pada jalurnya menuju pencapaian visi dan misi Perseroan sepanjang tahun 2021 yang penuh tantangan.

Tidak lupa, Dewan Komisaris juga menghaturkan ucapan terima kasih kepada mitra bisnis lembaga keuangan sebagai Penerima Jaminan, atas kepercayaan yang telah diberikan sehingga Perseroan mampu mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan sampai dengan saat ini. Semoga sinergitas dan kerja sama yang telah terjalin akan terus meningkat di masa yang akan datang.

Bandung, Mei 2022
atas nama Dewan Komisaris
PT Jamkrida Jabar



M. Taufiq Budi Santoso
Komisaris Utama

LAPORAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaaatuh

Para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat,

Puji syukur kehadirat Allah SWT, shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Rasulullah, Muhammad SAW, serta mudah-mudahan Allah SWT juga senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Perkenankanlah saya, atas nama Dewan Pengawas Syariah (DPS) Unit Usaha Syariah PT Jamkrida Jabar menyampaikan bahwa DPS merupakan perpanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam merealisasikan fatwa-fatwa yang telah diputuskan oleh DSN-MUI antara lain: Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah dan Fatwa DSN-MUI No. 74/DSN-MUI/I/2009 tentang Penjaminan Syariah. DPS berperan sebagai pengawas di dalam Perusahaan Penjaminan Syariah ataupun Perusahaan Penjaminan yang melakukan sebagian usaha Penjaminan berdasarkan Prinsip Syariah (Unit Usaha Syariah/UUS) seperti PT Jamkrida Jabar.

Sesuai tugas dan fungsinya, DPS telah mengawasi operasional Unit Usaha Syariah PT Jamkrida Jabar agar sesuai dengan nilai-nilai syariah serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik. DPS juga telah memberikan nasihat dan saran kepada Manajemen mengenai prinsip-prinsip syariah.

PENGAWASAN DI TAHUN 2021

Selama tahun 2021, DPS telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, DPS terlibat dalam serangkaian kegiatan rapat baik rapat internal, rapat dengan Direksi atau dengan jajaran di bawah Direksi, atau rapat dengan Dewan Komisaris.

DPS juga telah melakukan *review* atas suatu kebijakan atau SOP yang telah/akan ditetapkan dengan memberikan opini atau rekomendasi berdasarkan ketentuan Syariah serta melakukan *review* atas pelaksanaan produk penjaminan syariah maupun pelayanan yang diberikan kepada mitra dengan cara mengambil uji petik transaksi sebagai bahan penilaian dan memberikan rekomendasi-rekomendasi berdasarkan ketentuan syariah.

Kegiatan pengawasan yang dilakukan DPS PT Jamkrida Jabar selama tahun 2021 antara lain mencakup:

1. Mewakili dan/atau mendampingi Perseroan untuk rapat, diskusi dan konsultasi kepada pihak eksternal terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.
2. Rapat dan diskusi dengan pihak internal terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.
3. Menilai secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap pelaksanaan penjaminan syariah.
4. Mengawasi proses pengembangan produk baru atau fitur produk yang dituangkan dalam ketentuan internal atau SOP agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI.
5. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari Satuan Pengawas Internal (SPI) Perseroan dalam melaksanakan tugasnya.
6. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah serta menyampaikan hasil evaluasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS kepada Direksi dan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan DSN-MUI dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan DPS.

Berdasarkan hasil pengawasan selama tahun 2021, DPS menyampaikan bahwa secara umum operasional UUS PT Jamkrida Jabar telah sesuai dengan prinsip syariah, fatwa DSN-MUI, dan opini DPS. Kesalahan/kekurangan yang terjadi pada kegiatan operasional dikarenakan perbedaan pemahaman individu atas suatu produk dan pedoman operasional penjaminan oleh UUS. Atas kesalahan/kekurangan tersebut, DPS merekomendasikan agar segera dilakukan perbaikan-perbaikan setelah kesalahan/kekurangan tersebut diketahui. Apabila terdapat unsur kesengajaan sehingga terdapat prinsip syariah yang tidak terpenuhi, maka terhadap kesalahan/kekurangan yang disengaja tersebut harus ada konsekuensi.

Pemenuhan prinsip syariah memang tidak mudah, dan juga tidak boleh dianggap sederhana. Hal ini terkait dengan sah atau tidaknya pendapatan yang diperoleh dan penjaminan yang diberikan kepada masyarakat, khususnya KUMKM di Provinsi Jawa Barat.

Oleh karena itu, seluruh kegiatan operasional UUS harus dipastikan berjalan sesuai dan memenuhi prinsip-prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku bagi UUS. *Insya Allah* dengan kesadaran dan komitmen yang kuat maka kualitas UUS PT Jamkrida Jabar akan semakin baik pada tahun-tahun yang akan datang.

Dengan kerja sama yang baik dari Direksi dan segenap karyawan PT Jamkrida Jabar, semua kegiatan baik pada aspek pengembangan produk baru hingga kegiatan operasional penjaminan dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yang berlaku di UUS PT Jamkrida Jabar.

Sebagaimana diketahui, bahwa DPS menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengawasi pelaksanaan dan pengembangan produk penjaminan yang dimiliki oleh UUS PT Jamkrida Jabar. Kajian telah dilakukan terhadap pemenuhan prinsip syariah terutama dalam hal kesesuaian atau adanya ketidaksesuaian serta ada dan tidaknya rujukan fatwa. Seluruh aktivitas DPS tersebut juga telah didokumentasikan dan dilaporkan kepada OJK dan DSN-MUI dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan DPS.

HARAPAN DI TAHUN 2022

DPS berharap agar UUS PT Jamkrida Jabar di tahun 2022 dapat terus meningkatkan kinerja dan tata kelola dengan tetap menjaga pemenuhan prinsip kehati-hatian dan syariah dalam menjalankan kegiatan operasional penjaminannya. DPS bersyukur bahwa komunikasi dengan Dewan Komisaris, Direksi, maupun Divisi tetap terjaga dengan baik.

Sinergi yang telah dibangun melalui rapat-rapat dengan Dewan Komisaris, Direksi maupun Divisi agar senantiasa dijaga dan terus ditingkatkan dalam rangka menjaga kualitas kegiatan operasional penjaminan syariah UUS PT Jamkrida Jabar agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak melanggar prinsip syariah.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Selama tahun 2021 tidak terdapat perubahan komposisi DPS.

APRESIASI

DPS memberikan apresiasi atas kerja keras dan pencapaian manajemen dan seluruh karyawan PT Jamkrida Jabar dengan kinerja yang baik. DPS turut bersyukur bahwa (masih) di tengah Pandemi Covid-19 dan penyesuaian berbagai kebijakan serta persaingan yang cukup ketat, Perseroan masih mampu menjaga kinerja penjaminannya pada kategori positif.

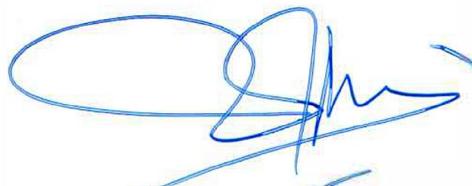
Dalam kesempatan ini DPS juga senantiasa mengingatkan manajemen PT Jamkrida Jabar, khususnya Unit Usaha Syariah PT Jamkrida Jabar, agar tetap berkomitmen untuk menjaga

pemenuhan prinsip-prinsip syariah serta kepatuhan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akhir kata, DPS berharap agar UUS PT Jamkrida Jabar dapat turut mewujudkan visi PT Jamkrida Jabar menjadi perusahaan penjaminan kredit terpercaya yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya dalam hal penjaminan pembiayaan/pinjaman syariah.

Wassalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaaatuh

Bandung, Mei 2022
atas nama Dewan Pengawas Syariah
PT Jamkrida Jabar
Unit Usaha Syariah



Zaini Abdul Malik
Ketua Dewan Pengawas Syariah

LAPORAN DIREKSI

Para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat,

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas ridho-Nya PT Jamkrida Jabar ("Perseroan") mampu melewati tahun 2021 dengan kinerja yang cukup baik, di tengah ketatnya persaingan bisnis pada industri penjaminan dan masih berlangsungnya pandemi Covid-19.

Mengarungi perjalanan di hampir sepanjang tahun 2021 merupakan tantangan tersendiri bagi Perseroan. Dampak pandemi Covid-19 yang sangat dirasakan oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha adalah melambatnya penyaluran kredit/pembiayaan oleh Lembaga Keuangan baik bank maupun non bank. Meningkatnya jumlah kredit/pembiayaan bermasalah memaksa industri perbankan di tanah air menerapkan tingkat kehati-hatian yang lebih tinggi dalam penyaluran kredit/pembiayaan dan memperketat likuiditas.

Menjadi suatu kehormatan bagi saya mewakili Direksi Perseroan untuk menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021. Perseroan secara fundamental di tahun 2021 masih menunjukkan tren kinerja positif baik dari aspek keuangan maupun non keuangan.

KONDISI EKONOMI

Tahun 2021 merupakan tahun yang (masih) tidak mudah bagi Indonesia dimana pandemi Covid-19 yang masih berlangsung memberikan dampak yang besar kepada segala bidang kehidupan tidak terkecuali bidang perekonomian. Meski demikian, pada akhir tahun 2021, dampak pandemi mulai menurun sehingga perekonomian di Indonesia mulai membaik dan bangkit secara perlahan dibandingkan tahun 2020.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa ekonomi Indonesia di tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69% (yoY), lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07% (yoY). Ekonomi Jawa Barat di tahun 2021 tumbuh sebesar 3,74% (yoY), lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar -2,56% (yoY). Pertumbuhan ekonomi ini dipengaruhi oleh berbagai dinamika yang terjadi baik dari sisi aktivitas ekonomi maupun perkembangan kasus Covid-19, percepatan program vaksinasi yang menjadi bagian dari upaya pengendalian pandemi Covid-19. yang dilakukan Pemerintah bersama seluruh *stakeholders*, termasuk masyarakat.

KINERJA PERSEROAN

Melalui dukungan dan kerja sama yang kuat dari Dewan Komisaris dan pemegang saham dalam membentuk dan meninjau strategi Perseroan sepanjang tahun, serta penyesuaian diri terhadap lingkungan operasional yang penuh tantangan dan senantiasa dekat dengan mitra, kami dapat mewujudkan komitmen untuk menciptakan kinerja yang positif serta tumbuh secara kompetitif.

Kinerja Perseroan (Konsolidasi) tahun 2021 menunjukkan capaian sebagai berikut:

- Volume Kredit tahun 2021 adalah senilai Rp8,16 triliun atau terealisasi sebesar 48,05% dari RKAP 2021 Perubahan, dimana Volume Kredit Produktif senilai Rp5,22 triliun (terealisasi 57,69%) dan Non Produktif senilai Rp2,94 triliun (terealisasi 43,92%). Volume Penjaminan tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 27,19% jika dibandingkan realisasi tahun 2020.
- Volume Penjaminan tahun 2021 adalah senilai Rp7,19 triliun atau terealisasi sebesar 106,90% dari RKAP 2021 Perubahan, dimana Volume Penjaminan Produktif senilai Rp2,03 triliun (terealisasi 112%) dan Non Produktif senilai Rp5,16 triliun (terealisasi 105,02%). Volume Penjaminan tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 17,01% jika dibandingkan realisasi tahun 2020.
- Pendapatan IJP Cash Basis tahun 2021 adalah senilai Rp194,77 miliar atau terealisasi sebesar 117,45% dari RKAP 2021 Perubahan, dimana volume IJP Produktif senilai Rp37,72 miliar (terealisasi 116,77%) dan Non Produktif senilai Rp157,04 miliar (terealisasi 117,62%). Pendapatan IJP Cash Basis tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 18,68% jika dibandingkan realisasi tahun 2020.
- Pendapatan IJP Accrual Basis tahun 2021 adalah senilai Rp179,89 miliar atau terealisasi sebesar 119,02% dari RKAP 2021 Perubahan, dimana volume IJP Produktif senilai Rp23,70 miliar (terealisasi 85,80%) dan Non Produktif senilai Rp156,19 miliar (terealisasi 126,45%). Pendapatan IJP Accrual Basis tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 40,59% jika dibandingkan realisasi tahun 2020.
- Jumlah KUMKM Terjamin tahun 2021 adalah sebanyak 64.059 unit/orang atau terealisasi sebesar 152,91% dari RKAP 2021 Perubahan. KUMKM Terjamin tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 20,89% jika dibandingkan tahun 2020.
- Total Aset Perseroan per 31 Desember 2021 adalah senilai Rp413,92 miliar atau mengalami pertumbuhan sebesar 19,13% jika dibandingkan tahun 2020.
- Total Ekuitas Perseroan per 31 Desember 2021 adalah senilai Rp203,26 miliar atau hanya mengalami pertumbuhan sebesar 1,54% jika dibandingkan tahun 2020.

- Pada tahun 2021 Perseroan membukukan Laba Bersih senilai Rp10,59 miliar atau sebesar 183,64% dari RKAP 2021 Perubahan yang ditargetkan senilai Rp5,76 miliar dan mengalami pertumbuhan sebesar 21,24% jika dibandingkan realisasi tahun 2020.
- Pada Tahun 2021 Perseroan membukukan Pendapatan Penjaminan senilai Rp76,33 miliar atau mencapai 108,81% dari RKAP 2021 Perubahan dan tumbuh sebesar 38,26% jika dibandingkan realisasi tahun 2020.
- Pada Tahun 2021 Perseroan memperoleh Pendapatan Investasi senilai Rp14,97 miliar atau mencapai 96,85% dari RKAP 2021 Perubahan dan turun sebesar 13,32% jika dibandingkan realisasi tahun 2020.
- Pada Tahun 2021 Perseroan memperoleh Pendapatan Subrogasi senilai Rp2,62 miliar atau mencapai 119,89% dari RKAP 2021 Perubahan dan mengalami kenaikan sebesar 44,38% jika dibandingkan realisasi tahun 2020.
- Pada Tahun 2021 Perseroan memperoleh Pendapatan Lain-Lain senilai Rp3,52 miliar atau mengalami pertumbuhan sebesar 126,57% jika dibandingkan realisasi tahun 2020.
- Total Klaim Neto yang dibayarkan oleh Perseroan di Tahun 2021 adalah senilai Rp67,03 miliar atau mencapai 117,88% dari RKAP 2021 Perubahan dan mengalami kenaikan sebesar 68,57% jika dibandingkan realisasi tahun 2020.
- Beban Usaha Perseroan di Tahun 2021 adalah senilai Rp18,69 miliar atau hanya mencapai 76,49% dari RKAP 2021 Perubahan dan mengalami kenaikan sebesar 9,42% jika dibandingkan realisasi tahun 2020.

Adapun Kinerja Unit Usaha Syariah menunjukkan capaian sebagai berikut:

- Volume Kafalah tahun 2021 adalah sebesar Rp627,15 miliar atau terealisasi sebesar 101,45% dari RKAP 2021 Perubahan, dimana volume kafalah produktif sebesar Rp258,55 miliar (terealisasi 206,73%) dan non produktif sebesar Rp 368,60 miliar (terealisasi 74,75%). Volume Kafalah tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 11,95% dibandingkan realisasi tahun 2020.
- Volume IJK Cash Basis tahun 2021 adalah sebesar Rp10,16 miliar atau terealisasi sebesar 103,46% dari RKAP 2021 Perubahan, dimana volume IJK produktif sebesar Rp3,96 miliar (terealisasi 205,14%) dan non produktif sebesar Rp6,20 miliar (terealisasi 78,61%). Volume IJK Cash Basis tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 17,83% dibandingkan realisasi tahun 2020.
- Pendapatan IJK Accrual Basis tahun 2021 adalah sebesar Rp11,89 miliar atau mengalami pertumbuhan sebesar 50,96% dibandingkan realisasi tahun 2020.
- Pendapatan Investasi tahun 2021 adalah sebesar Rp2,65 miliar atau mengalami pertumbuhan sebesar 0,70% dibandingkan realisasi tahun 2020.

- Beban Klaim tahun 2021 adalah sebesar Rp3,68 miliar atau mengalami pertumbuhan sebesar 41,32% dibandingkan realisasi tahun 2020.
- Beban Usaha tahun 2021 adalah sebesar Rp902,69 juta atau mengalami penurunan sebesar 10,17% dibandingkan realisasi tahun 2020.
- Laba Bersih Tahun Berjalan adalah sebesar Rp3,96 miliar atau mengalami pertumbuhan sebesar 58,46% dibandingkan realisasi tahun 2020.
- Total Aset UUS tahun 2021 adalah senilai Rp44,17 miliar atau mengalami penurunan sebesar 0,63% dibandingkan realisasi tahun 2020 senilai Rp44,54 miliar.

Secara keseluruhan, meskipun Pandemi Covid-19 di tahun 2021 masih memberikan dampak terhadap perekonomian (termasuk penyaluran kredit/pembiayaan) namun Perseroan masih mampu menghasilkan Laba Bersih (Konsolidasi) senilai Rp10,59 miliar. Hal ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi dan kerja sama para pemangku kepentingan, termasuk jajaran pengurus, manajemen, dan karyawan PT Jamkrida Jabar.

TANTANGAN

Tantangan utama Perseroan sepanjang tahun 2021 adalah menjaga kinerja agar tetap tumbuh disaat pandemi Covid-19 masih berlangsung yang masih memberikan tekanan kepada kondisi ekonomi nasional dan daerah serta tetap kompetitif di tengah persaingan usaha pada industri penjaminan nasional. Pertumbuhan beban klaim secara signifikan sangat mewarnai dinamika usaha Perseroan sepanjang tahun 2021.

PELAKSANAAN STRATEGI PERSEROAN

Strategi Perseroan yang dijalankan di tahun 2021 dalam mengantisipasi tantangan diatas, adalah menciptakan nilai lebih bagi mitra strategis dan pada saat yang bersamaan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan menguntungkan dengan tetap mengacu pada aspek-aspek tata kelola perusahaan yang baik serta nilai-nilai perusahaan.

Untuk mencapai sasaran tersebut, Perseroan berfokus pada lima strategi, yaitu:

1. Ekspansi bisnis berbasis risiko dan keuntungan (*risk and profit based*).
2. Penempatan portofolio investasi yang moderat dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudent*).
3. Optimalisasi subrogasi.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
5. Pengembangan layanan berbasis teknologi informasi.

HASIL PEMERIKSAAN AUDITOR EKSTERNAL

Hasil Pemeriksaan Auditor Eksternal dari KAP Hertanto, Grace, Karunawan (HGK) terhadap Laporan Keuangan PT Jamkrida Jabar untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2021 memberikan memberikan Opini Audit Wajar, dalam Semua Hal yang Material sesuai Laporan Audit Independen Nomor : 00113/2.1000/AU.1/08/1290-2/1/IV/2022 tanggal 14 April 2022.

TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN

Berdasarkan SE-OJK No. 18/SEOJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan Lembaga Penjamin, tahun 2021 PT Jamkrida Jabar memperoleh nilai 1,945; berada pada rentang $1,8 < \text{TKK} < 2,6$ dengan menunjukkan kategori keuangan yang SEHAT.

RATING PEMERINGKATAN

PT Jamkrida Jabar memperoleh peringkat idBBB (*Triple B; Stable Outlook*) dari Lembaga Pemeringkat PT PEFINDO untuk periode 02 Agustus 2021 sampai dengan 01 Agustus 2022, artinya Perseroan sebagai Perusahaan Penjaminan dinilai memiliki karakteristik keamanan keuangan yang memadai dibandingkan Perusahaan lainnya di Indonesia untuk memenuhi komitmen keuangannya. Dengan hasil tersebut, Perseroan telah melampaui standar minimal untuk dapat bekerja sama dengan bank-bank umum.

PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

Sebagai Perusahaan Penjaminan yang berstatus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat, Perseroan menyadari bahwa dalam mengelola dana masyarakat adalah penting untuk menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG). Hal ini sesuai dengan arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sekaligus juga menjadi bagian dari tuntutan kebutuhan di lingkungan industri keuangan Indonesia.

Perseroan telah menyusun berbagai pedoman pelaksanaan GCG diantaranya adalah:

1. *Code of Corporate Governance* (Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik)
2. *Board of Manual* (Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi)
3. *Code of Conduct* (Etika Kerja dan Etika Usaha)
4. *Internal Audit Charter* (Piagam Internal Audit)
5. *Committee Audit Charter* (Piagam Komite Audit)
6. *Code of Whistleblowing Systems* (Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran)
7. Pedoman Keterbukaan Informasi Publik

Tahun 2021 adalah tahun kelima Perseroan melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) berdasarkan pada format yang telah ditetapkan oleh OJK. Adapun skor *self assessment* tahun 2021 adalah 90,56 (*sembilan puluh koma lima puluh enam*) dengan predikat "Sangat Baik". Secara nilai, pencapaian tahun 2021 sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2020 dengan skor 91,71 juga dengan predikat "Sangat Baik". Perseroan terus berkomitmen untuk melakukan upaya perbaikan dan peningkatan tata kelola yang baik.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Selama tahun 2021, terdapat perubahan komposisi Direksi yaitu sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Tanggal Pemberhentian oleh RUPS
1	Teguh Budiman	Direktur Utama	Akta No. 77 tanggal 26-11-2020	Akta No. 64 tanggal 25-11-2021*
2	Budi Setyono	Direktur Keuangan	Akta No. 01 tanggal 03-01-2017	Akta No. 45 tanggal 16 Februari 2021**

* Untuk mengisi kekosongan posisi Direktur Utama Perseroan, Para Pemegang Saham menunjuk Yanti Rachmawati selaku Direktur Utama yang berlaku efektif setelah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK.

** Yang bersangkutan telah berakhir masa jabatannya.

Komposisi dan dasar pengangkatan Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Lulus dan Nomor <i>Fit and Proper Test</i>	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan
1	Teguh Budiman	Direktur Utama	13-10-2020 Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No.: KEP-300/ NB.11/2020	Akta No. 77 tanggal 26-11-2020 Masa Jabatan s.d. 25-11-2021
2	Budi Setyono	Direktur Keuangan	15-09-2014 Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No.: KEP-2334/ NB.1/2014	Akta No. 01 tanggal 03-01-2017 Masa Jabatan s.d. 03-01-2021
3	Yanti Rachmawati	Direktur Keuangan	08-07-2021 Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No.: KEP-442/NB.11/2021	Akta No. 74 tanggal 13-09-2021 Masa Jabatan s.d. 31-08-2026

4	Agus Subrata	Direktur Operasional	08-07-2021 Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No.: KEP-432/NB.11/2021	Akta No. 74 tanggal 13-09-2021 Masa Jabatan s.d. 31-08-2026
---	--------------	-------------------------	--	---

APRESIASI

Direksi mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan PT Jamkrida Jabar atas dukungan dan kerja sama yang diberikan, khususnya kepada pemegang saham dan mitra kerja Perseroan.

Direksi juga memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dewan Komisaris atas pengawasan dan nasihat yang diberikan kepada Direksi dalam rangka menjalankan kepengurusan Perseroan.

Apresiasi juga diberikan kepada seluruh karyawan yang telah menunjukkan kerja keras dan kerja ikhlas terutama di masa Pandemi Covid-19 yang dihadapi bersama sehingga PT Jamkrida Jabar mampu menunjukkan kinerja yang baik di tahun 2021.

Semua yang telah dan akan dilakukan kedepan adalah demi satu tujuan yakni agar visi Perseroan, *"Menjadi Perusahaan Penjamin Kredit Terpercaya yang Berkontribusi pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah"*, dapat direalisasikan. **Jamkrida Jabar Tangguh Bersama Bersama Juara**.

Demikian laporan Direksi atas kegiatan kepengurusan PT Jamkrida Jabar selama tahun 2021.

Bandung, Mei 2022

atas nama Direksi

PT Jamkrida Jabar



Yanti Rachmawati

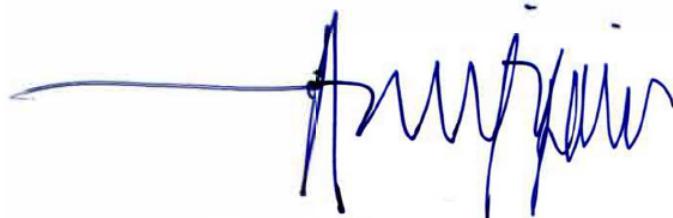
Direktur Keuangan

TANGGUNG JAWAB PELAPORAN TAHUNAN

Laporan Tahunan PT Jamkrida Jabar Tahun 2021 berikut Laporan Keuangan dan informasi lain yang terkait dibuat dengan keadaan sebenarnya oleh Direksi yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris dengan membubuhkan tanda tangan di bawah ini.

DEWAN KOMISARIS

PT Jamkrida Jabar



M. Taufiq Budi Santoso
Komisaris Utama



Dini Rosdini
Komisaris Independen

DIREKSI

PT Jamkrida Jabar



Yanti Rachmawati
Direktur Keuangan



Agus Subrata
Direktur Operasional

Profil Perusahaan





PROFIL PERUSAHAAN

PT Jamkrida Jabar merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (BUMD) yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat.

Maksud pembentukan Perusahaan adalah untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan ekonomi, khususnya Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan pendirian PT Jamkrida Jabar adalah:

- a. memberikan jasa penjaminan kredit kepada KUMKM;
- b. meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah; dan
- c. memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

PT Jamkrida Jabar didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas Nomor 03 tanggal 3 Oktober 2012 yang dibuat di hadapan Yuliani Idawati, S.H., Sp.N., Notaris yang berkedudukan di Kota Bandung dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-56159.AH.01.01 tanggal 1 November 2012.

PT Jamkrida Jabar mendapatkan Izin Operasional Nomor KEP.05/D.05/2013 tanggal 30 Januari 2013 dari Otoritas Jasa Keuangan yang pada saat itu baru beralih dari Bapepam LK.

Perseroan telah merintis pembentukan Unit Usaha Syariah berdasarkan Keputusan Direksi PT Jamkrida Jabar Nomor: Kep-0008/DIR/JJ/III/2014 tanggal 24 Maret 2014 tentang Panitia Pembentukan Unit Syariah dan telah mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-04/NB.223/2015 tentang Pemberian Izin Pembentukan Unit Usaha Syariah Perusahaan Penjaminan Kredit Kepada PT Jamkrida Jabar tanggal 3 Februari 2015.

Perseroan juga telah mendapatkan pemeringkatan "idBBB" dari Lembaga Pemeringkatan PT Pefindo sehingga dapat bekerja sama dengan pihak perbankan sesuai Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/6/DPNP tahun 2011 perihal Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar.



LEGALITAS USAHA

Perseroan telah memiliki izin dan legalitas dalam menjalankan kegiatan usahanya, seperti tercantum dibawah ini:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 9 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat.
2. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor: 19 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 9 Tahun 2011 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat.
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 17 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pada PT Jamkrida Jabar.
4. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jamkrida Jabar Nomor: 03 Tahun 2012, tanggal 03 Oktober 2012, beserta Akta perubahan-perubahannya.
5. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-56159.AH.01.01 Tahun 2012, tanggal 01 November 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, beserta keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang perubahan-perubahannya.
6. Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 503/014/DP-SKJ/II/2015 tanggal 17 Februari 2015.
7. Izin Gangguan Nomor: 503/IG/DJ03/BPPT tanggal 20 April 2015.
8. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor: 101116418463 tanggal 12 September 2018.
9. Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 9120304971535 tanggal 13 September 2019.
10. Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP.05/D.05/2013 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penjaminan Kredit Kepada PT Jamkrida Jabar tanggal 30 Januari 2013.
11. Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-04/NB.223/2015 tentang Pemberian Izin Pembentukan Unit Usaha Syariah Perusahaan Penjaminan Kredit Kepada PT Jamkrida Jabar tanggal 3 Februari 2015.
12. Surat Izin Operasi Tingkat Nasional dari Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-3912/NB.111/2015 tanggal 14 Juli 2015.

LOGO PERUSAHAAN

Logo Perusahaan menunjukkan identitas bisnis dari suatu Perusahaan. Selain itu, logo Perusahaan juga menunjukkan nilai yang dibawa oleh Perusahaan tersebut. Berikut ini filosofi logo PT Jamkrida Jabar:

LOGOMARK



Langgam simbol *double* huruf simetri 'JJ', digambarkan bagaikan dua bilah kujang kembar dipersandingkan tersusun secara simetri dengan saling membelakangi. Sosok ini mengingatkan kepada siluet postur berdiri badan manusia. Langgam logo ini mengisyaratkan kemandirian. Bulatan rembulan di ujung garis simetri berlaku sebagai penerang purnama dan penyejuk semangat matahari kujang.

Ragam 'Kujang' berdiri merupakan simbol kamandungan tali ari-ari tempat janin bermuasal. Tertransformasikan menuju susunan huruf 'J'. Makna Kujang berdiri dijadikan simbol keselarasan pandangan ajaran Sunda wiwitan penjaga keselarasan alam.

Selain sebagai alat pertanian yakni 'ketam memanen padi' juga sebagai pusaka pamor simbol semangat pemersatu. Kujang merupakan simbol ketajaman bertuah pamor kepribadian *local wisdom* kekhasan keluhuran watak pedusunan Sunda yang masih dilestarikan. '*Silih Asih Silih Asah Silih Asuh Silih Wewangian Sak Uyunan Silih Simbutan*', sebuah aspirasi sikap kesahajaan keluhuran budi bahasa masyarakat Sunda mencerminkan kekokohan terjalinya ikatan kekerabatan. Sebagai pedoman keselarasan kesahajaan saling berdampingan bersama sebagai bekal lumbung peningkatan kehidupan masa depan generasi selanjutnya.

Bingkai Kotak sebagai lingkup akhir susunan logo, mengisyaratkan makna sebuah keutuhan tetap dan baku, kuat tidak tergoyahkan dan stabil. Memberikan gambaran stabilitas tatanan ekonomi mengantarkan swadaya kemandirian penghidupan bermartabat masyarakat Jawa Barat. Geometri 'Kotak' merupakan perlambang pijakan punden berundak sebagai simbol kemanungan semesta. Kotak menggambarkan puncak kematangan kepribadian. Dan sebagai simbol Tridharma, '*Vasthu Purusha Mandala*' jalan menuju keagungan sebagai simbol pusat meditasi menuju pematangan berkepribadian.

WARNA LOGO



Warna Biru



Warna Hijau

Warna standar Logo PT Jamkrida Jabar adalah warna biru dan hijau. Adapun makna dari warna-warna pada logo PT Jamkrida Jabar adalah sebagai berikut:

Hamparan Pusara Pasundan dikenal sebagai Wilayah Parahiyangan dengan keelokan rindangnya tanah subur diliput oleh deretan permai hawa pegunungan yang subur gemah ripah. Warna pelingkup dua alam sebagai pijakan inspirasi dasar Logo utama dengan latar belakang layar parahu berwarna 'Hijau' dan 'Biru'. Terletak bersanding berdampingan sebagai penyeimbang simetri keselarasan alam terbentang. Keseimbangan antara kemauan dan kemampuan dalam mengolah terpeliharanya seluruh khasanah kekayaan alam sebagai sumber kehidupan bermartabat dimasa depan.

Makna warna 'Hijau' mengisyaratkan keteduhan hutan hijau menaungi kesuburan bentang permadani ladang dan kebun. Warna 'Biru' mensimbolkan makna keabadian sumber kehidupan mata air sebagai jembatan samudera (*Cukang Sagara*). Dwi warna 'Hijau Biru' bertaut menyatukan sebagai penaung terjaganya kemajuan selaras penyeimbang ekologi alam daratan, pegunungan dan lautan sebagai pusara keselarasan. Kecerdasan astronomi dan ilmu kelautan, menunjang kearifan masyarakat pasundan melaksanakan kebijakan air samudera. Warna 'Hijau' (*Hyang Jawa* = Payung Teduh) melambangkan keteduhan jiwa dan pengayoman. Warna 'Biru' (*Umbi Ruh* = Ibu Ruh) melambangkan pusara ruh keluhuran, kecerdasan dan kebijaksanaan.

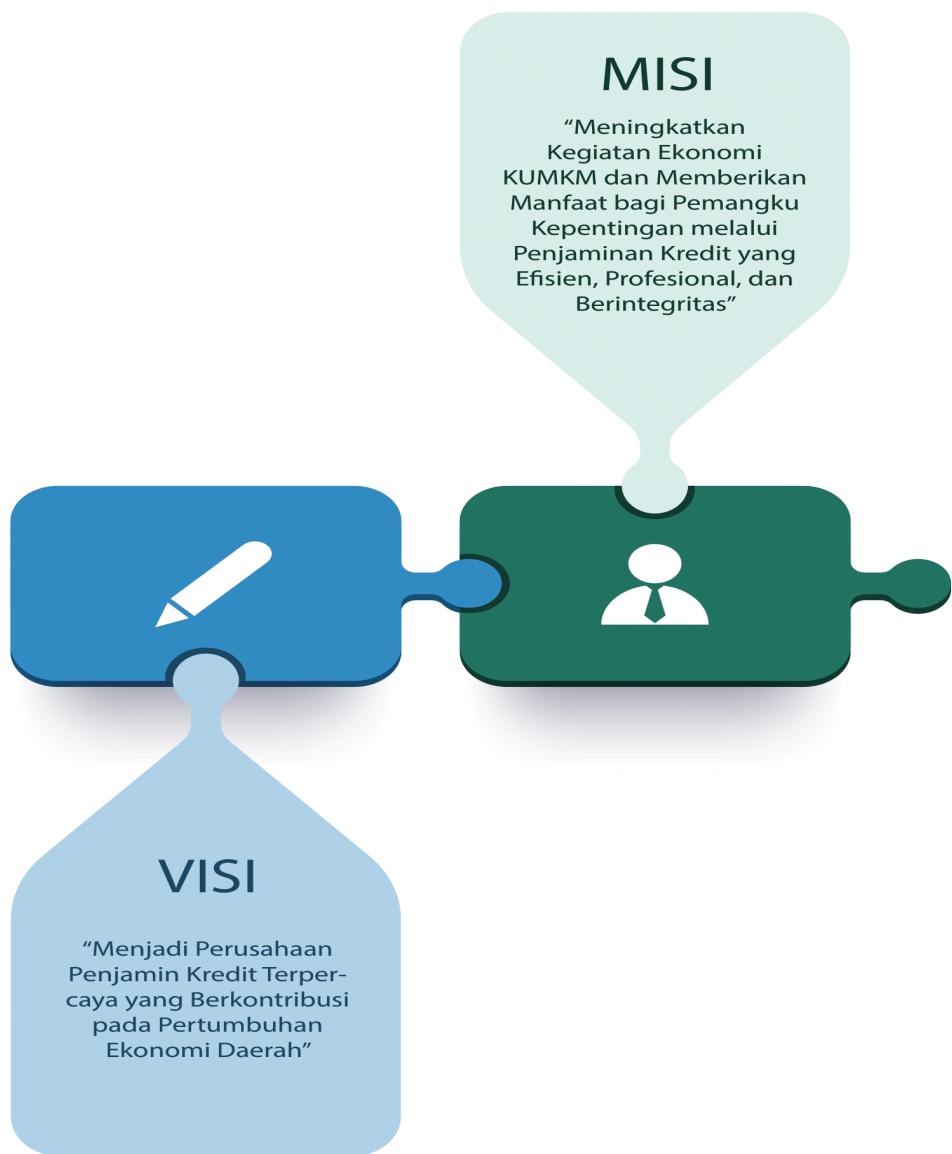
Dwi Warna 'Hijau Biru' memberikan pertautan makna *Hiyang Jawa Umbi Ruh* = Payung Keteduhan Naungan Ibu Ruh, transformasi pertautan membentuk keseimbangan baru yang saling menghidupkan. Ajaran Umbi (Dewi Pohachi), merupakan pokok ajaran keseimbangan tatar tua Pasundan *Sumbhi Prabangkara* sebagai pengayom menuju jalan keyakinan tempat bermuasal melalui tutur lisan (kidung) masyarakat adat. '*Gemah Ripah Loh Jinawi Tata Tentrem Kertaraha*'.



ARTI MAKNA SIMBOL KESELURUHAN

Secara keseluruhan, logo PT Jamkrida Jabar memiliki makna yaitu "mengantarkan tubuh kehidupan mencapai kemandirian bermartabat untuk menjaga keseimbangan keselarasan alam, tetapi terjaga keutuhannya mewujudkan generasi masa depan gemilang berpedoman keseimbangan kebijakan alam".

VISI MISI PERUSAHAAN





NILAI-NILAI PERUSAHAAN



INTEGRITY

Pengelolaan Perseroan dilakukan dengan semangat integritas dan profesionalisme yang tinggi



SPEED

Perseroan memberikan pelayanan kepada nasabah dan mitra dengan cepat dan terpercaya



BUILD

Membangun dan mengembangkan masyarakat KUMKM di Jawa Barat



ACCOUNTABLE

Pengelolaan Perseroan dengan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan

JAMKRIDA JABAR **BISA!**

PRODUK PENJAMINAN PERUSAHAAN

01

PENJAMINAN KREDIT USAHA MIKRO



02

PENJAMINAN KREDIT USAHA KECIL



03

PENJAMINAN KREDIT USAHA MENENGAH



04

PENJAMINAN KREDIT KOPERASI



05

PENJAMINAN KREDIT KONSTRUKSI



06

PENJAMINAN BANK GARANSI



07
OPTION

PENJAMINAN KREDIT MULTIGUNA



08

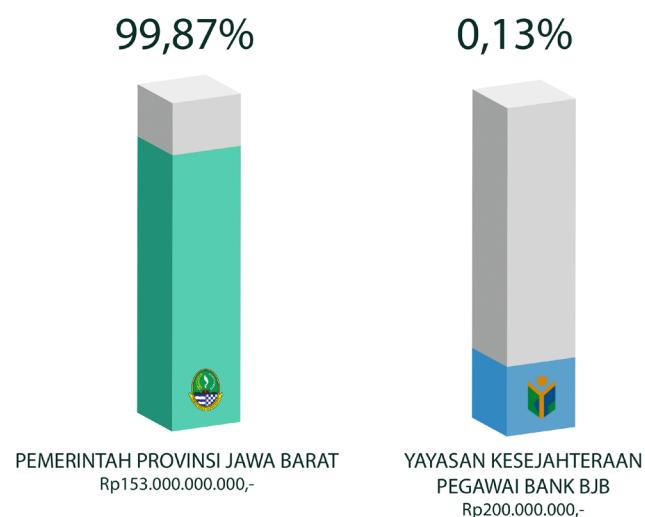
SURETY BOND





KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2011 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat Bab V Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa "Modal dasar Perusahaan adalah sebesar Rp 300.000.000.000,- (tiga ratus miliar rupiah)". Adapun modal yang telah disetor kepada PT Jamkrida Jabar sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp153,2 miliar dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyetorkan saham pada PT Jamkrida Jabar sebesar Rp153.000.000.000,- (*seratus lima puluh tiga miliar rupiah*), sedangkan pemegang saham lain yaitu Yayasan Kesejahteraan Pegawai bank bjb (YKP bank bjb) telah menyetorkan saham senilai Rp200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*). Oleh karena itu, sisa saham PT Jamkrida Jabar yang masih dalam simpanan (portepel) adalah senilai Rp146.800.000.000,- (*seratus empat puluh enam miliar delapan ratus juta rupiah*) atau 14.680 (*empat belas ribu enam ratus delapan puluh*) lembar saham.

Bahwa YKP bank bjb (selaku Pemegang Saham lainnya) berdasarkan surat Nomor: 595/YKP-BJB/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 perihal Penyertaan Modal Tambahan telah menyatakan belum dapat mengalokasikan dana untuk penyertaan modal tambahan di PT Jamkrida Jabar.

Perseroan sedang mengusulkan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 17 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Jamkrida Jabar, khususnya terkait dengan ketentuan Pasal 4 tentang pengaturan setoran modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Jamkrida Jabar, dengan usulan perubahan dimana Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat menambah setoran modal pada PT Jamkrida Jabar dengan nilai total sesuai dengan sisa saham dalam simpanan.

PROFIL DEWAN KOMISARIS



MUHAMMAD TAUFIQ BUDI SANTOSO
Komisaris Utama

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR
Lahir di Probolinggo, 21 April 1967.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- S3 Kebijakan Publik di Universitas Padjadjaran tahun 2012.
- S2 Public Administration di University of Birmingham tahun 1995.
- S1 Teknik Planologi di Institut Teknologi Bandung tahun 1990.

RIWAYAT PENUNJUKAN

Diangkat dan ditetapkan sebagai Komisaris Utama PT Jamkrida Jabar untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan RUPS tanggal 21 Desember 2021 sesuai Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar RUPSLB PT Jamkrida Jabar No. 07 tanggal 21 Desember 2021.

PERIODE MENJABAT

21 Desember 2021-21 Desember 2025.

RIWAYAT PEKERJAAN

- Asisten Perekonominian dan Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat (2020-sekarang).
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (2019-2020).
- Penjabat Bupati Purwakarta (2018).
- Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat (2018).
- Kepala Biro Pemerintahan Dan Kerja Sama Setda Provinsi Jawa Barat (2016-2017).

HUBUNGAN AFILIASI

Muhammad Taufiq Budi Santoso tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun Dewan Pengawas Syariah, Direksi, dan Pemegang Saham.

KEPEMILIKAN SAHAM PT JAMKRIDA JABAR

Muhammad Taufiq Budi Santoso tidak memiliki saham Perusahaan.



DINI ROSDINI
Komisaris Independen

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR
Lahir di Bandung, 13 April 1977.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- S3 Ilmu Akuntansi di Universitas Indonesia tahun 2015.
- S2 Magister Akuntansi di Universitas Padjadjaran tahun 2005.
- S1 Akuntansi di Universitas Padjadjaran tahun 2000.

RIWAYAT PENUNJUKAN

Diangkat dan ditetapkan sebagai Komisaris Independen PT Jamkrida Jabar untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan RUPSLB tanggal 26 November 2019 sesuai Akta Risalah RUPSLB PT Jamkrida Jabar No. 39 tanggal 26 November 2019.

PERIODE MENJABAT

26 November 2019-26 November 2023.

RIWAYAT PEKERJAAN

- Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (2001-sekarang).
- Anggota Komite Audit di PT Mitrabara Adiperdana, Tbk. (2018-sekarang).
- Anggota Komite Pemantau Risiko di PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk. (2016-sekarang).
- Anggota Komite Audit di PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk. (2014-2016).
- Sekretaris Dewan Komisaris di PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk. (2013-2014).

HUBUNGAN AFILIASI

Dini Rosdini tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun Dewan Pengawas Syariah, Direksi, dan Pemegang Saham.

KEPEMILIKAN SAHAM PT JAMKRIDA JABAR

Dini Rosdini tidak memiliki saham Perusahaan.



PROFIL DEWAN PENGAWAS SYARIAH



ZAINI ABDUL MALIK Ketua Dewan Pengawas Syariah

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR
Lahir di Bandung, 31 Januari 1975.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- S3 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati tahun 2022.
- S2 Kajian Islam/Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2008.
- S1 pada Fakultas Syariah/ Muamalah di Institut Agama Islam Negeri/IAIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 1999.

RIWAYAT PENUNJUKAN

Diangkat dan ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Jamkrida Jabar Unit Usaha Syariah untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan RUPSLB tanggal 28 November 2014 sesuai Akta Risalah RUPSLB PT Jamkrida Jabar No. 38 tanggal 28 November 2014.

PERIODE MENJABAT

Sejak 28 November 2014.

RIWAYAT PEKERJAAN

- Dosen Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Bandung (UNISBA) sampai dengan sekarang.
- Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PW. Muhammadiyah Jawa Barat (Periode 2010-2015)
- Ketua Forum Ekonomi Syari'ah Jakarta (2002-2003).
- Penulis karya-karya ilmiah Ekonomi Islam/Ekonomi Syari'ah.

HUBUNGAN AFILIASI

Zaini Abdul Malik tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya, maupun Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham.

KEPEMILIKAN SAHAM PT JAMKRIDA JABAR

Zaini Abdul Malik tidak memiliki saham Perusahaan.



KHOZIN ABU FAQIH
Dewan Pengawas Syariah

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR
Lahir di Gresik, 08 September 1969.

RIWAYAT PENDIDIKAN
Menyelesaikan Pendidikan pada Fakultas Syariah di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA/Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud Riyadah Cabang Jakarta) tahun 1996.

RIWAYAT PENUNJUKAN

Diangkat dan ditetapkan sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Jamkrida Jabar Unit Usaha Syariah untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan RUPSLB tanggal 28 November 2014 sesuai Akta Risalah RUPSLB PT Jamkrida Jabar No. 38 tanggal 28 November 2014.

PERIODE MENJABAT

Sejak 28 November 2014.

RIWAYAT PEKERJAAN

- Pengasuh Pesantren Inovatif Al-Ibda' dan pesantren Al-Ilham/SMK Perbankan Syariah (2013-sekarang).
- Pengisi Kajian Wawasan Islam MQFM (2010-2012).
- Dosen Ma'had Al-Imarat Bandung tahun (2000-2009).
- Dosen Ma'had Shalahuddin Bogor (1994-1996).
- Penulis dan penerjemah buku-buku Islam.

HUBUNGAN AFILIASI

Khozin Abu Faqih tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya, maupun Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham.

KEPEMILIKAN SAHAM PT JAMKRIDA JABAR

Khozin Abu Faqih tidak memiliki saham Perusahaan.

PROFIL DIREKSI



TEGUH BUDIMAN

Direktur Utama

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR

Lahir di Kuningan, 02 Juni 1981.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- S3 Manajemen Bisnis di Universitas Padjadjaran tahun 2020.
- S2 Magister Manajemen di STIE Ekuitas tahun 2017.
- S2 Magister Manajemen di Universitas Padjadjaran tahun 2016.
- S1 Ekonomi dan Perbankan Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Cirebon tahun 2004.

RIWAYAT PENUNJUKAN

Diangkat dan ditetapkan sebagai Direktur Utama PT Jamkrida Jabar untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan RUPSLB tanggal 26 November 2020 sesuai Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (Sirkuler) PT Jamkrida Jabar No. 77 tanggal 26 November 2020.

PERIODE MENJABAT

26 November 2020-25 November 2021.

RIWAYAT PEKERJAAN

- Direktur Pemasaran PT Asuransi Bangun Askrida (2018-2020).
- Kepala Cabang PT Asuransi Bangun Askrida Tahun 2016-2018.
- Dosen/Trainer di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan (2017-sekarang).
- Wakil Pimpinan Cabang PT Asuransi Bangun Askrida (2015-2016).
- Komisaris PT Jamkrida Jabar (2012-2016).

HUBUNGAN AFILIASI

Teguh Budiman tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pemegang Saham.

KEPEMILIKAN SAHAM PT JAMKRIDA JABAR

Teguh Budiman tidak memiliki saham Perusahaan.



YANTI RACHMAWATI

Direktur Keuangan

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR

Lahir di Bandung, 05 November 1974.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- S2 Magister Manajemen di Universitas Padjadjaran tahun 2012.
- S1 Manajemen di Universitas Indonesia tahun 2000.
- D3 Akuntansi di Universitas Padjadjaran tahun 1995.

RIWAYAT PENUNJUKAN

Diangkat dan ditetapkan sebagai Direktur Keuangan PT Jamkrida Jabar untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan RUPSLB tanggal 13 September 2021 sesuai Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (Sirkuler) PT Jamkrida Jabar No. 74 tanggal 13 September 2021.

PERIODE MENJABAT

13 September 2021-31 Agustus 2026.

RIWAYAT PEKERJAAN

- Kepala Desk Bisnis Penjaminan Syariah Perum Jamkrindo (2018-2021).
- Pimpinan Kantor Wilayah Bandung (Wiayah Kerja Jawa Barat) Perum Jamkrindo (2016-2018).
- Pimpinan Kantor Cabang Bandung Perum Jamkrindo (2013-2016).
- Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan Kantor Cabang Bandung Perum Jamkrindo (2008-2013).

HUBUNGAN AFILIASI

Yanti Rachmawati tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pemegang Saham.

KEPEMILIKAN SAHAM PT JAMKRIDA JABAR

Yanti Rachmawati tidak memiliki saham Perusahaan.



AGUS SUBRATA
Direktur Operasional

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR
Lahir di Bandung, 01 Juni 1968.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- S2 Magister Manajemen di Universitas Esa Unggul tahun 2014.
- S1 Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjadjaran tahun 1993.

RIWAYAT PENUNJUKAN

Diangkat dan ditetapkan sebagai Direktur Keuangan PT Jamkrida Jabar untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan RUPSLB tanggal 13 September 2021 sesuai Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (Sirkuler) PT Jamkrida Jabar No. 74 tanggal 13 September 2021.

PERIODE MENJABAT

13 September 2021-31 Agustus 2026.

RIWAYAT PEKERJAAN

- Wakil Ketua II dan Dosen Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti (2020-sekarang).
- Komisaris Independen PT Sahabat Insurance d/h PT Bess Central Insurance (2018-2021).
- Direktur Utama PT Berdikari Logistik Indonesia (2016-2017).
- Asisten Direktur Teknik dan R&D PT Berdikari Logistik Indonesia (2013-2015).
- Direktur PT Tala Re International Reinsurance Broker Direktur (2010-2013).

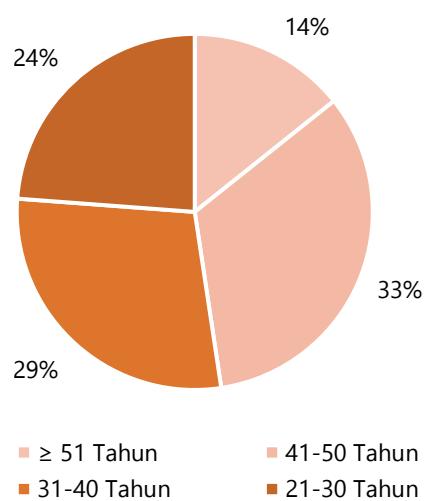
HUBUNGAN AFILIASI

Agus Subrata tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pemegang Saham.

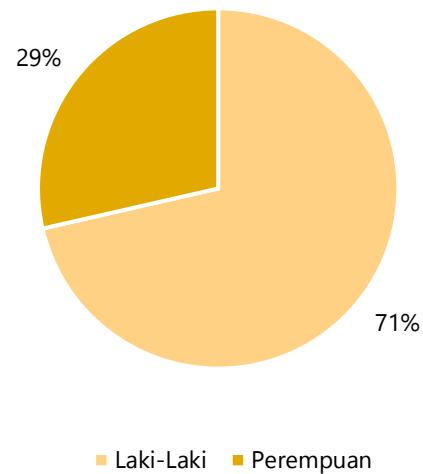
KEPEMILIKAN SAHAM PT JAMKRIDA JABAR
Agus Subrata tidak memiliki saham Perusahaan.

KOMPOSISI KARYAWAN

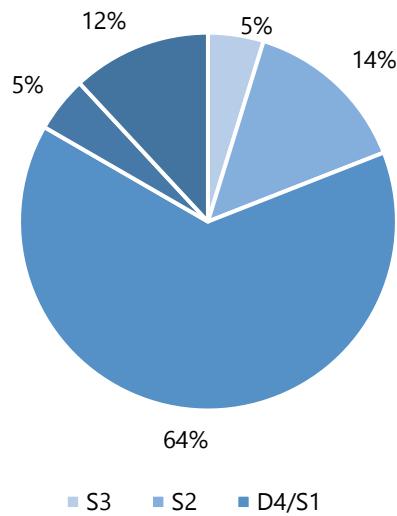
Klasifikasi Karyawan Berdasarkan Usia



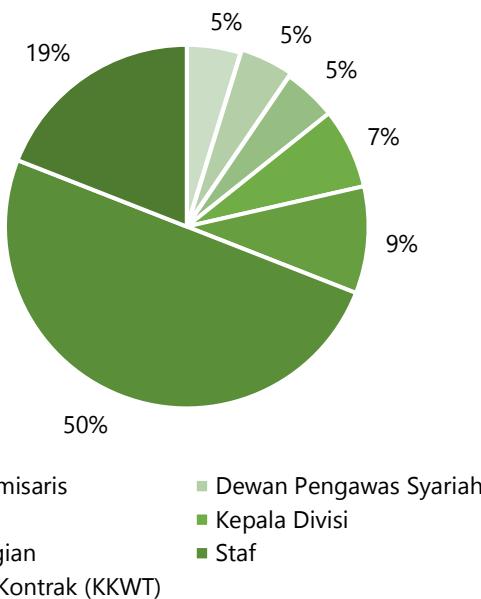
Klasifikasi Karyawan Berdasarkan Gender



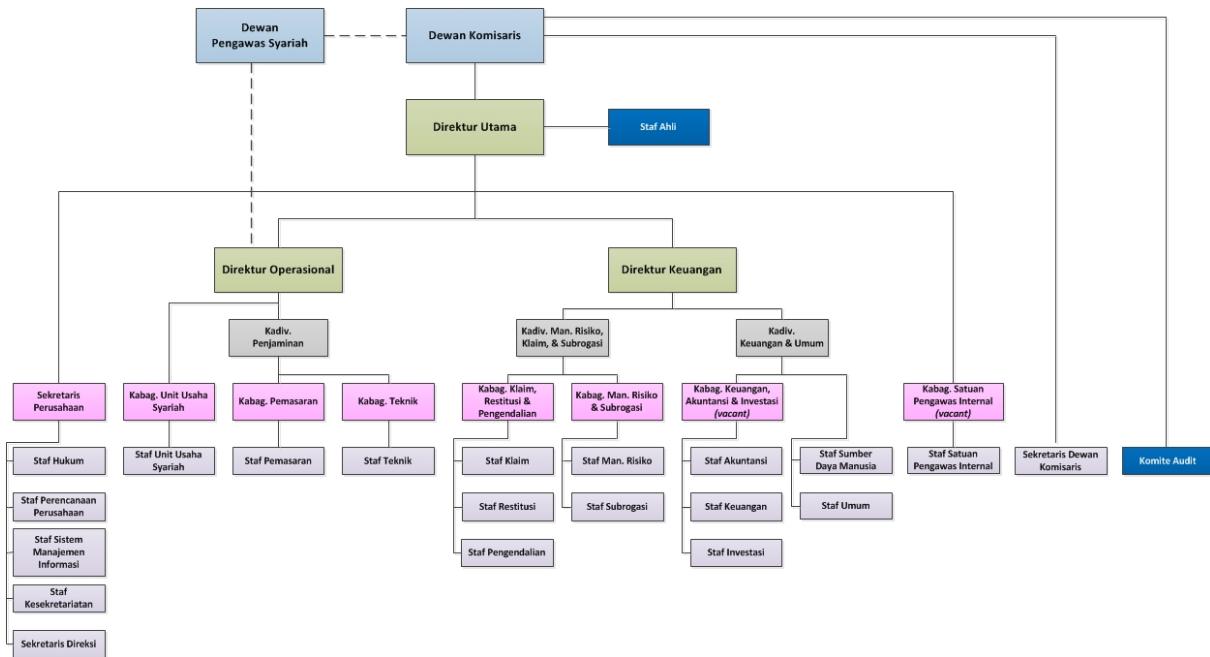
Klasifikasi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Klasifikasi Karyawan Berdasarkan Posisi Manajemen



STRUKTUR ORGANISASI



DIVISI PENJAMINAN





DIVISI MANAJEMEN RISIKO, KLAIM, DAN SUBROGASI



DIVISI KEUANGAN DAN UMUM





SEKRETARIS PERUSAHAAN



BAGIAN UMUM



Kinerja Perseroan





KINERJA PERSEROAN

Lembaga Penjamin merupakan lembaga keuangan khusus yang berperan mendorong kemandirian usaha dan pemberdayaan dunia usaha serta meningkatkan akses bagi dunia usaha, khususnya Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) dan usaha prospektif lainnya kepada sumber pembiayaan.

Keberadaan Lembaga Penjamin sangat dibutuhkan untuk memupuk kepercayaan industri perbankan dalam menyalurkan kredit kepada KUMKM. Peran Lembaga Penjamin saat ini terbilang sangat penting, guna mengawal pertumbuhan dan perkembangan KUMKM baik daerah maupun nasional.

Salah satu karakteristik yang melekat pada sebagian besar KUMKM dan sekaligus menjadi sumber permasalahannya adalah lemahnya struktur permodalan dan kurangnya akses kepada sumber pembiayaan (lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan) yang disebabkan oleh adanya keterbatasan agunan.

Penjaminan kredit biasanya diberikan kepada KUMKM yang belum memenuhi syarat perbankan dalam peminjaman kredit (*unbankable*) namun memiliki prospek bisnis yang baik (*eligible*) antara lain karena produknya banyak dipesan atau diminta oleh pasar. Dengan penjaminan kredit, UMKM yang *unbankable* tetapi *eligible* akan lebih mudah mendapatkan suntikan dana dari perbankan dengan jaminan yang diberikan oleh Lembaga Penjamin.

Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu provinsi termaju di Indonesia dengan tingkat pertumbuhan perekonomian yang tinggi serta dengan tingkat stabilitas makro ekonomi yang tetap terjaga, akan mendorong pertumbuhan jumlah KUMKM.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan jumlah KUMKM di Jawa Barat, serta ketersediaan fasilitas penjaminan kredit, akan berdampak pada meningkatnya permintaan kredit, dan akan memberikan peluang bagi industri penjaminan kredit khususnya di Jawa Barat untuk tumbuh secara berkelanjutan pada masa yang akan datang.

Dengan menjalankan "*vision & mission statement*" sesuai dengan niat awal pembentukan Perseroan sebagai Lembaga Penjaminan Kredit Daerah, dalam jangka panjang Perseroan akan menjadi "Perusahaan Penjaminan Kredit Pilihan Masyarakat Jawa Barat" tentunya, secara tidak langsung akan memberikan kontribusi pada perekonomian Jawa Barat. Maka Produk Penjaminan Kredit dan jasa konsultasi pengembangan UMKM dalam mengakses perbankan menjadi jasa utama perusahaan.



ASPEK PENJAMINAN

VOLUME KREDIT

PT JAMKRIDA JABAR LAPORAN VOLUME KREDIT TAHUN 2020 DAN 2021 <i>(dalam Jutaan Rupiah)</i>					
URAIAN	REALISASI 2020	RKAP 2021 PERUBAHAN	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	GROWTH 2020-2021
Per Kredit					
Produktif	1.348.342,88	5.093.553,40	2.938.383,67	57,69%	117,93%
Non Produktif	5.065.464,33	11.883.136,48	5.219.565,31	43,92%	3,04%
Jumlah	6.413.807,21	16.976.689,88	8.157.948,99	48,05%	27,19%
Per Produk					
Kredit Usaha Menengah	169.399,67	1.421.390,67	905.925,53	63,74%	434,79%
Kredit Usaha Kecil	61.654,00	103.240,42	85.141,65	82,47%	38,10%
Kredit Usaha Mikro	247.791,59	278.877,56	478.217,40	171,48%	92,99%
Kredit Koperasi	296.693,40	456.266,24	127.390,67	27,92%	-57,06%
Kredit Konstruksi	390.145,24	2.273.255,43	958.260,83	42,15%	145,62%
Bank Garansi	181.597,98	560.523,08	378.486,60	67,52%	108,42%
Surety Bond	1.061,00	-	4.961,00		367,58%
Kredit Multiguna	5.065.464,33	11.883.136,48	5.219.565,31	43,92%	3,04%
Jumlah	6.413.807,21	16.976.689,88	8.157.948,99	48,05%	27,19%

Volume Kredit tahun 2021 adalah senilai Rp8,16 triliun atau terealisasi sebesar 48,05% dari RKAP 2021 Perubahan, dimana Volume Kredit Produktif senilai Rp5,22 triliun (terealisasi 57,69%) dan Non Produktif senilai Rp2,94 triliun (terealisasi 43,92%). Volume Penjaminan tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 27,19% jika dibandingkan realisasi tahun 2020.

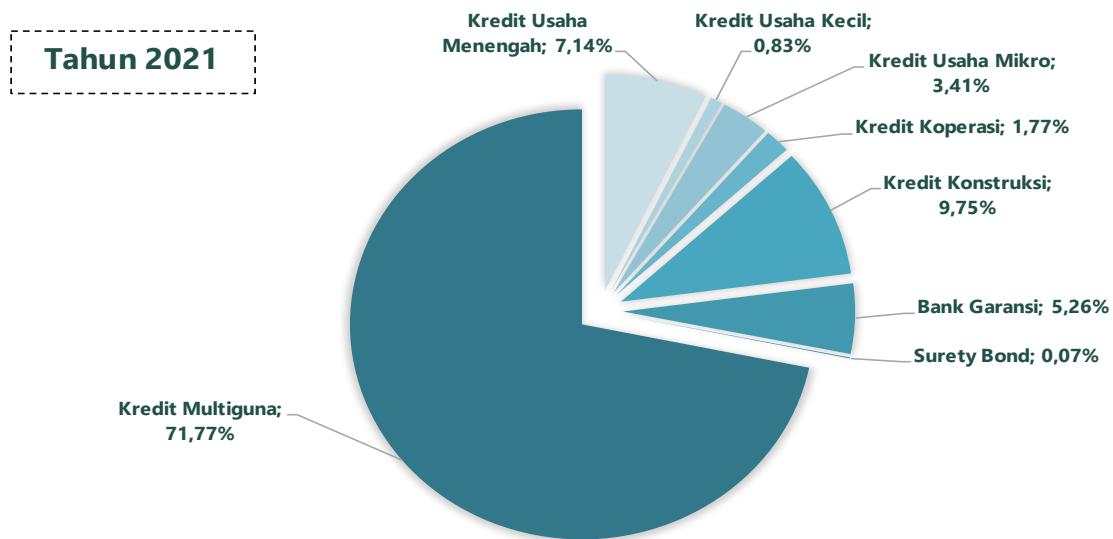


VOLUME PENJAMINAN

PT JAMKRIDA JABAR LAPORAN VOLUME PENJAMINAN TAHUN 2020 DAN 2021

(dalam Jutaan Rupiah)

URAIAN	REALISASI 2020	RKAP 2021 PERUBAHAN	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	GROWTH 2020-2021
Per Kredit					
Produktif	1.092.385,28	1.812.556,77	2.030.100,42	112,00%	85,84%
Non Produktif	5.052.549,67	4.913.484,58	5.160.148,15	105,02%	2,13%
Total	6.144.934,95	6.726.041,35	7.190.248,57	106,90%	17,01%
Per Produk					
Kredit Usaha Menengah	106.416,42	484.533,43	513.470,31	105,97%	382,51%
Kredit Usaha Kecil	43.157,80	41.241,10	59.599,16	144,51%	38,10%
Kredit Usaha Mikro	167.982,83	121.525,67	244.902,26	201,52%	45,79%
Kredit Koperasi	296.693,40	221.817,94	127.390,67	57,43%	-57,06%
Kredit Konstruksi	295.475,85	703.204,30	701.290,42	99,73%	137,34%
Bank Garansi	181.597,98	239.541,64	378.486,60	158,00%	108,42%
Surety Bond	1.061,00	692,70	4.961,00	716,18%	367,58%
Kredit Multiguna	5.052.549,67	4.913.484,58	5.160.148,15	105,02%	2,13%
Total	6.144.934,95	6.726.041,35	7.190.248,57	106,90%	17,01%



Jumlah KUMKM Terjamin: 64.059 unit

Jumlah Tenaga Kerja Terserap: 327.019 orang



Kinerja
Perseroan

Volume Penjaminan tahun 2021 adalah senilai Rp7,19 triliun atau terealisasi sebesar 106,90% dari RKAP 2021 Perubahan, dimana Volume Penjaminan Produktif senilai Rp2,03 triliun (terealisasi 112%) dan Non Produktif senilai Rp5,16 triliun (terealisasi 105,02%). Volume Penjaminan tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 17,01% jika dibandingkan realisasi tahun 2020.

IMBAL JASA PENJAMINAN CASH BASIS

PT JAMKRIDA JABAR LAPORAN IJP CASH BASIS TAHUN 2020 DAN 2021

(dalam Jutaan Rupiah)

URAIAN	REALISASI 2020	RKAP 2021 PERUBAHAN	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	GROWTH 2020-2021
Per Kredit					
Produktif	15.385,83	32.306,98	37.724,85	116,77%	145,19%
Non Produktif	148.729,11	133.522,62	157.044,81	117,62%	5,59%
Jumlah	164.114,94	165.829,60	194.769,66	117,45%	18,68%
Per Produk					
Kredit Usaha Menengah	3.449,95	15.611,41	17.871,79	114,48%	418,03%
Kredit Usaha Kecil	2.031,05	1.888,69	2.465,90	130,56%	21,41%
Kredit Usaha Mikro	2.113,51	2.204,64	3.709,76	168,27%	75,53%
Kredit Koperasi	3.422,74	2.709,74	1.645,69	60,73%	-51,92%
Kredit Konstruksi	2.810,82	7.886,54	8.778,85	111,31%	212,32%
Bank Garansi	1.544,37	2.005,96	3.156,83	157,37%	104,41%
Surety Bond	13,39	-	96,04		617,08%
Kredit Multiguna	148.729,11	133.522,62	157.044,81	117,62%	5,59%
Jumlah	164.114,94	165.829,60	194.769,66	117,45%	18,68%

Pendapatan IJP Cash Basis tahun 2021 adalah senilai Rp194,77 miliar atau terealisasi sebesar 117,45% dari RKAP 2021 Perubahan, dimana volume IJP Produktif senilai Rp37,72 miliar (terealisasi 116,77%) dan Non Produktif senilai Rp157,04 miliar (terealisasi 117,62%). Pendapatan IJP Cash Basis tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 18,68% jika dibandingkan realisasi tahun 2020.



IMBAL JASA PENJAMINAN ACCRUAL BASIS

PT JAMKRIDA JABAR LAPORAN IJP ACCRUAL BASIS TAHUN 2020 DAN 2021

(dalam Jutaan Rupiah)

URAIAN	REALISASI 2020	RKAP 2021 PERUBAHAN	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	GROWTH 2020-2021
Per Kredit					
Produktif	14.302,95	27.621,57	23.700,17	85,80%	65,70%
Non Produktif	113.780,19	123.516,87	156.190,97	126,45%	37,27%
Jumlah	128.083,14	151.138,44	179.891,15	119,02%	40,45%
Per Produk					
Kredit Usaha Menengah	2.248,01	12.364,10	9.565,15	77,36%	325,49%
Kredit Usaha Kecil	1.751,21	1.774,85	1.798,72	101,35%	2,71%
Kredit Usaha Mikro	1.945,88	2.032,90	2.422,74	119,18%	24,51%
Kredit Koperasi	2.249,89	2.834,56	1.956,07	69,01%	-13,06%
Kredit Konstruksi	3.944,47	6.860,07	5.588,04	81,46%	41,67%
Bank Garansi	1.974,66	1.751,34	2.301,42	131,41%	16,55%
Surety Bond	188,82	3,76	68,03	1809,71%	-63,97%
Kredit Multiguna	113.780,19	123.516,87	156.190,97	126,45%	37,27%
Jumlah	128.083,14	151.138,44	179.891,15	119,02%	40,45%

*note : *nilai anggaran dan realisasi telah dikurangi nilai restitusi*

Pendapatan IJP Accrual Basis tahun 2021 adalah senilai Rp179,89 miliar atau terealisasi sebesar 119,02% dari RKAP 2021 Perubahan, dimana volume IJP Produktif senilai Rp23,70 miliar (terealisasi 85,80%) dan Non Produktif senilai Rp156,19 miliar (terealisasi 126,45%). Pendapatan IJP Accrual Basis tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 40,45% jika dibandingkan realisasi tahun 2020.



KUMKM TERJAMIN

PT JAMKRIDA JABAR LAPORAN JUMLAH KUMKM TERJAMIN TAHUN 2020 DAN 2021

(dalam Satuan Unit/Orang)

URAIAN	REALISASI 2020	RKAP 2021 PERUBAHAN	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	GROWTH 2020-2021
Kredit Usaha Menengah	135	615	352	57,27%	160,74%
Kredit Usaha Kecil	443	423	553	130,63%	24,83%
Kredit Usaha Mikro	42.358	30.644	53.974	176,14%	27,42%
Kredit Koperasi	7.040	5.263	2.524	47,95%	-64,15%
Kredit Konstruksi	920	2.190	2.579	117,79%	180,33%
Bank Garansi	2.088	2.754	4.073	147,88%	95,07%
Surety Bond	6	4	4	102,11%	-33,33%
Jumlah	52.990	41.893	64.059	152,91%	20,89%

Jumlah KUMKM Terjamin tahun 2021 adalah sebanyak 64.059 unit/orang atau terealisasi sebesar 152,91% dari RKAP 2021 Perubahan. Jumlah KUMKM Terjamin tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 20,89% jika dibandingkan tahun 2020.

PENJAMINAN KREDIT USAHA MENENGAH

Realisasi Volume Penjaminan Kredit Usaha Menengah tahun 2021 adalah senilai Rp513,47 miliar atau mencapai 105,97% dari RKAP 2021 Perubahan dan mengalami pertumbuhan yang sangat baik sebesar 382,51% jika dibandingkan realisasi tahun 2020.

PENJAMINAN KREDIT USAHA KECIL

Realisasi Volume Penjaminan Kredit Usaha Kecil tahun 2021 adalah senilai Rp59,60 miliar atau mencapai 144,51% dari RKAP 2021 Perubahan dan mengalami pertumbuhan sebesar 38,10% jika dibandingkan realisasi tahun 2020.

PENJAMINAN KREDIT USAHA MIKRO

Realisasi Volume Penjaminan Kredit Usaha Mikro tahun 2021 adalah senilai Rp244,90 miliar atau mencapai 201,52% dari RKAP 2021 Perubahan dan mengalami pertumbuhan sebesar 45,79% jika dibandingkan realisasi tahun 2020.



PENJAMINAN KREDIT KOPERASI

Realisasi Volume Penjaminan Kredit Koperasi tahun 2021 adalah senilai Rp127,39 miliar atau hanya mencapai 57,43% dari RKAP 2021 Perubahan dan mengalami penurunan sebesar 57,06% jika dibandingkan realisasi tahun 2020. Hal ini disebabkan adanya perlambatan penyaluran dari mitra utama kepada debitur koperasi (termasuk *end user* koperasi).

PENJAMINAN KREDIT KONSTRUKSI

Realisasi Volume Penjaminan Kredit Konstruksi tahun 2021 adalah senilai Rp701,29 miliar atau mencapai 99,73% dari RKAP 2021 Perubahan dan mengalami pertumbuhan sebesar 137,34% jika dibandingkan realisasi tahun 2020.

PENJAMINAN BANK GARANSI

Realisasi Volume Penjaminan Bank Garansi (Kontra Bank Garansi) tahun 2021 adalah senilai Rp378,49 miliar atau mencapai 158% dari RKAP 2021 Perubahan dan mengalami pertumbuhan sebesar 108,42% jika dibandingkan realisasi tahun 2020.

SURETY BOND

Realisasi Volume *Surety Bond* tahun 2021 adalah senilai Rp4,96 miliar atau mencapai 716,18% dari RKAP 2021 Perubahan (memang masih ditargetkan kecil mengingat produk ini belum menjadi prioritas dan *head to head* dengan Kontra Bank Garansi) dan mengalami pertumbuhan sebesar 367,58% jika dibandingkan realisasi tahun 2020.

PENJAMINAN KREDIT MULTIGUNA

Realisasi Volume Penjaminan Kredit Multiguna tahun 2021 adalah senilai Rp5,16 triliun atau mencapai 105,02% dari RKAP 2021 Perubahan dan hanya mengalami pertumbuhan sebesar 2,13% jika dibandingkan realisasi tahun 2020. Perseroan pada tahun 2021 mengambil kebijakan untuk lebih selektif dan membatasi akseptasi Penjaminan Multiguna (Non Produktif) tidak terkecuali dari mitra utama sebagai bagian dari upaya pemenuhan rasio penjaminan usaha produktif yang masih di bawah ketentuan OJK paling sedikit 25%.



Kinerja Perseroan

ASPEK KEUANGAN

Berdasarkan Laporan Keuangan (Audited) PT Jamkrida Jabar per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

LAPORAN POSISI KEUANGAN

PT JAMKRIDA JABAR LAPORAN POSISI KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2021 (dalam Jutaan Rupiah)					
	2020 (AUDITED)	RKAP 2021 PERUBAHAN	2021 (AUDITED)	CAPAIAN 2021	GROWTH 2020-2021
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan Setara Kas	187.692,64	154.422,13	156.208,33	101,16%	-16,77%
Dikurangi : Cadangan Kerugian Kredit Ekspektas	(13.497,57)	(12.579,16)	(4.405,11)	35,02%	-67,36%
Surat Berharga	63.482,84	65.572,84	78.971,23	120,43%	24,40%
Dikurangi : Cadangan Kerugian Kredit Ekspektas	(1.563,07)	-	(136,84)	-	-91,25%
Piutang Re/Cogaransi	8.784,56	25.494,24	63.283,02	248,22%	620,39%
Dikurangi : Cadangan Kerugian Kredit Ekspektas	-	-	(4.560,60)	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	1.306,36	1.864,35	12.815,54	687,40%	881,01%
Dikurangi : Cadangan Kerugian Kredit Ekspektas	-	-	(852,51)	-	-
Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka	16.840,15	19.519,39	20.439,93	104,72%	21,38%
Piutang Lain-Lain	79,18	-	152,34	-	92,39%
Properti Investasi	2.495,10	2.495,10	2.495,10	100,00%	0,00%
JUMLAH ASET LANCAR	265.620,18	256.788,88	324.410,43	126,33%	22,13%
ASET TIDAK LANCAR					
Beban Dibayar Dimuka	56.017,39	81.789,80	65.501,96	80,09%	16,93%
Aset Tetap - Bersih	13.337,30	13.626,36	13.246,95	97,22%	-0,68%
Aset Pajak Tangguhan	12.325,18	11.723,73	10.534,79	89,86%	-14,53%
Aset Lain-lain	152,52	208,37	229,61	110,20%	50,55%
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	81.832,39	107.348,26	89.513,31	83,39%	9,39%
JUMLAH ASET	347.452,57	364.137,14	413.923,73	113,67%	19,13%
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS					
LIABILITAS JANGKA PENDEK					
Utang Pajak	390,48	343,61	502,23	146,16%	28,62%
Utang Re/Cogaransi	6.553,05	8.513,27	43.040,33	505,57%	556,80%
Utang Klaim	1.914,59	-	-	-	-100,00%
Beban yang Masih Harus Dibayar	377,24	-	514,27	-	36,32%
Penampungan Sementara	6.133,52	4.278,85	11.793,69	275,63%	92,28%
Utang Lancar Lainnya	5,25	6.700,62	0,24	0,00%	-95,33%
Pendapatan Diterima Dimuka	31.261,35	32.685,70	35.709,29	109,25%	14,23%
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	46.635,50	52.522,04	91.560,06	174,33%	96,33%
LIABILITAS JANGKA PANJANG					
Pendapatan Diterima Dimuka	91.805,86	104.190,88	98.071,34	94,13%	6,82%
Cadangan Klaim	6.482,60	8.170,34	18.908,36	231,43%	191,68%
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	2.347,15	2.710,28	2.126,35	78,46%	-9,41%
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	100.635,61	115.071,50	119.106,06	103,51%	18,35%
JUMLAH LIABILITAS	147.271,11	167.593,55	210.666,11	125,70%	43,05%
EKUITAS					
Modal	153.200,00	153.200,00	153.200,00	100,00%	0,00%
Cadangan Umum	35.601,30	37.784,02	40.139,07	106,23%	12,75%
Saldo Laba	8.730,88	5.763,93	10.585,17	183,64%	21,24%
Selisih Nilai Wajar Surat Berharga	2.927,57	73,92	(569,21)	-770,00%	-119,44%
Selisih Pengukuran Kembali Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	(278,28)	(278,28)	(97,40)	35,00%	-65,00%
JUMLAH EKUITAS	200.181,46	196.543,59	203.257,62	103,42%	1,54%
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	347.452,57	364.137,14	413.923,73	113,67%	19,13%

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan



LAPORAN LABA RUGI

PT JAMKRIDA JABAR
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021
(dalam Jutaan Rupiah)

	2020 (AUDITED)	RKAP 2021 PERUBAHAN	2021 (AUDITED)	CAPAIAN 2021	GROWTH 2020-2021
PENDAPATAN PENJAMINAN					
Imbal Jasa Penjaminan/Kafalah	130.550,63	152.261,84	183.093,49	120,25%	40,25%
Beban Akuisisi	(22.669,04)	(20.438,56)	(30.728,20)	150,34%	35,55%
Restitusi IJP	(2.467,49)	(1.123,40)	(3.202,34)	285,06%	29,78%
Manajemen Fee	7.397,62	10.057,44	17.534,90	174,35%	137,03%
Beban Regaransi	(57.600,88)	(70.602,06)	(90.364,19)	127,99%	56,88%
JUMLAH PENDAPATAN PENJAMINAN	55.210,84	70.155,26	76.333,65	108,81%	38,26%
KLAIM					
Beban Klaim	(42.487,07)	(56.362,32)	(63.389,13)	112,47%	49,20%
Pemulihan (Pembentukan) Cadangan Klaim	2.725,39	(499,75)	(3.637,83)	727,92%	-233,48%
JUMLAH KLAIM	(39.761,68)	(56.862,07)	(67.026,97)	117,88%	68,57%
PENDAPATAN PENJAMINAN BERSIH	15.449,16	13.293,19	9.306,69	70,01%	-39,76%
PENDAPATAN INVESTASI	17.265,45	15.452,81	14.965,35	96,85%	-13,32%
PENDAPATAN SUBROGASI	1.815,94	2.186,91	2.621,93	119,89%	44,38%
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN	(13.257,26)	(134,50)	3.522,75	2619,13%	126,57%
BEBAN USAHA					
Beban Operasional	(1.379,40)	(3.018,90)	(2.872,88)	95,16%	108,27%
Beban Sumber Daya Manusia	(11.817,03)	(15.698,96)	(10.514,47)	66,98%	-11,02%
Beban Administrasi dan Umum	(3.883,75)	(5.715,16)	(5.301,95)	92,77%	36,52%
BEBAN USAHA	(17.080,18)	(24.433,02)	(18.689,30)	76,49%	9,42%
LABA SEBELUM PAJAK	4.193,11	6.365,38	11.727,41	184,24%	179,68%
BEBAN PAJAK PENGHASILAN					
Beban Pajak Kini	-	-	-	-	-
Manfaat Pajak tangguhan	4.537,77	(601,45)	(1.142,25)	189,92%	-125,17%
JUMLAH BEBAN PAJAK PENGHASILAN	4.537,77	(601,45)	(1.142,25)	189,92%	-125,17%
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	8.730,88	5.763,93	10.585,17	183,64%	21,24%
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	2.675,05	(2.806,25)	(3.315,90)	118,16%	-223,96%
LABA KOMPREHENSIF	11.405,92	2.957,69	7.269,27	245,78%	-36,27%

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan



Berdasarkan data pada tabel diatas, terlihat bahwa:

1. Total Aset

Total Aset Perseroan per 31 Desember 2021 adalah senilai Rp413,92 miliar atau mengalami pertumbuhan sebesar 19,13% jika dibandingkan tahun 2020.

2. Total Ekuitas

Total Ekuitas Perseroan per 31 Desember 2021 adalah senilai Rp203,26 miliar atau hanya mengalami pertumbuhan sebesar 1,54% jika dibandingkan tahun 2020.

3. Laba (Rugi)

Pada tahun 2021 Perseroan mampu membukukan Laba Bersih Tahun Berjalan senilai Rp10,59 miliar atau sebesar 183,64% dari RKAP 2021 Perubahan yang ditargetkan senilai Rp5,76 miliar dan mengalami pertumbuhan sebesar 21,24% jika dibandingkan perolehan tahun 2020.

4. Pendapatan Penjaminan

Pada Tahun 2021 Perseroan membukukan Pendapatan Penjaminan senilai Rp76,33 miliar atau mencapai 108,81% dari RKAP 2021 Perubahan dan tumbuh sebesar 38,26% jika dibandingkan perolehan tahun 2020.

5. Pendapatan Investasi

Pada Tahun 2021 Perseroan memperoleh Pendapatan Investasi senilai Rp14,97 miliar atau mencapai 96,85% dari RKAP 2021 Perubahan dan turun sebesar 13,32% jika dibandingkan perolehan tahun 2020.

6. Pendapatan Subrogasi

Pada Tahun 2021 Perseroan memperoleh Pendapatan Subrogasi senilai Rp2,62 miliar atau mencapai 119,89% dari RKAP 2021 Perubahan dan mengalami kenaikan sebesar 49,20% jika dibandingkan perolehan tahun 2020.



7. Pendapatan Lain-Lain

Pada Tahun 2021 Perseroan memperoleh Pendapatan Lain-Lain senilai Rp3,52 miliar atau mengalami pertumbuhan sebesar 126,57% jika dibandingkan realisasi tahun 2020.

8. Beban Klaim

Beban Klaim yang dibayarkan oleh Perseroan di Tahun 2021 adalah senilai Rp63,39 miliar atau mencapai 112,47% dari RKAP 2021 Perubahan dan mengalami kenaikan sebesar 68,57% jika dibandingkan realisasi tahun 2020.

9. Beban Usaha

Beban Usaha Perseroan di Tahun 2021 adalah senilai Rp18,69 miliar atau hanya mencapai 76,49% dari RKAP 2021 Perubahan dan mengalami kenaikan sebesar 9,42% jika dibandingkan realisasi tahun 2020.

ASPEK MANAJEMEN RISIKO

Proses Manajemen Risiko PT Jamkrida Jabar adalah proses yang dilakukan untuk mengelola risiko yang melekat pada setiap proses bisnis disetiap bagian dan level dalam perusahaan sehingga mampu memberikan keyakinan tercapainya tujuan dan mengurangi ketidakpastian yang melekat pada suatu proses bisnis yang ada akhirnya akan menciptakan kesempatan atau *opportunity* secara lebih sistematis.

Secara umum, proses manajemen risiko yang dilaksanakan terdiri dari 4 tahap utama, yaitu:

1. Identifikasi risiko
2. Penilaian risiko (*risk assessment*)
3. Penanganan risiko (*risk response*)
4. Monitoring dan evaluasi

Dalam melaksanakan penjaminan kredit, perusahaan harus tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) sehingga diharapkan dapat mengurangi risiko penjaminan, risiko klaim, risiko keuangan, risiko hukum, dan risiko lainnya yang berpotensi merugikan perusahaan.

Perusahaan penjaminan sangat rentan terhadap risiko. Pada umumnya karakteristik risiko penjaminan bersifat *speculative* (risiko *moral hazard*). Beberapa strategi yang dilakukan



Perseroan dalam melakukan mitigasi risiko penjaminan adalah dengan cara mempersyaratkan agunan, pembentukan cadangan klaim, penjaminan ulang dan penjaminan bersama dengan Perusahaan Penjaminan sejenis ataupun Perusahaan Asuransi (*re-guarantee* dan *co-guarantee*).

Kegiatan Manajemen Risiko PT Jamkrida Jabar masih bersifat periodik dan insidentil. Dimana secara periodik khususnya dalam laporan bulanan maupun triwulan ditampilkan profil risiko setiap penjaminan per skim kredit per mitra bisnis sehingga dapat dijadikan tolak ukur serta pengambilan keputusan manakala profil risikonya menunjukkan indikasi kerugian bagi Perusahaan kedepannya. Untuk penerapan manajemen risiko secara insidential dalam bentuk kajian-kajian manajemen risiko terkait penilaian kegiatan yang akan ditempuh oleh Perusahaan (kajian mitra usaha dalam rangka kerja sama baru, penempatan deposito, pembelian obligasi dan instrumen investasi lain, dan lain sebagainya). Hasil dari analisa dan penilaian risiko tersebut akan dibahas dalam Rapat Manajemen PT Jamkrida Jabar untuk menentukan mitigasi risiko yang akan dilakukan.

Perseroan pun memiliki beberapa komite dibawah Direksi, yaitu Komite Penjaminan, Komite Investasi, dan Komite Klaim yang rutin mengadakan pertemuan bersama untuk membahas, membuat analisa, merumuskan, mengawasi, serta melaksanakan kebijakan yang telah atau akan diambil oleh manajemen.

Komite Penjaminan memiliki tugas utama membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan operasional penjaminan, mengawasi dan melaksanakan kebijakan operasional penjaminan yang telah ditetapkan, serta melakukan analisa kelayakan dan manajemen risiko dari setiap pengajuan permohonan penjaminan.

Komite Investasi memiliki tugas utama membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan investasi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan investasi yang telah ditetapkan.

Komite Klaim memiliki tugas utama membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan klaim dan mengawasi pelaksanaan kebijakan klaim yang telah ditetapkan, melakukan analisa kelayakan dan manajemen risiko dari setiap pengajuan permohonan klaim, serta memberikan keputusan klaim.

Dengan adanya beberapa komite dibawah Direksi tersebut, maka Perseroan dapat meminimalisir kemungkinan kerugian pada Perseroan di masa yang akan datang.



Beberapa mitigasi risiko yang dilakukan Perseroan pada tahun 2021, diantaranya:

1. Melakukan *review* dan perubahan perjanjian kerja sama (PKS) mitra penjaminan dengan prinsip *profitable* dan berbasis risiko.
2. Melakukan penyebaran risiko dengan menempatkan sebagian risiko dengan skema reasuransi kepada NasionalRe dan IndonesiaRe (konvensional dan syariah) dan beberapa perusahaan penjaminan dengan skema kogaransi.
3. Melakukan optimalisasi pendapatan investasi berbasis resiprokal dan *profitable* dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudent*).

ASPEK KLAIM DAN SUBROGASI

PT JAMKRIDA JABAR LAPORAN KLAIM DAN SUBROGASI UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2021 (dalam Jutaan Rupiah)					
URAIAN	PER 31 DES 2020 (AUDITED)	RKAP 2021 PERUBAHAN	PER 31 DES 2021 (AUDITED)	CAPAIAN 2021	GROWTH 2020-2021
BEBAN KLAIM	42.487,06	56.362,32	63.389,13	112,47%	49,20%
Konvensional	39.886,12	52.197,09	59.713,53	114,40%	49,71%
Syariah	2.600,94	4.165,23	3.675,60	88,24%	41,32%
PENDAPATAN SUBROGASI	1.815,94	2.186,91	2.621,93	119,89%	44,38%
Konvensional	1.762,60	2.137,68	2.407,99	112,65%	36,62%
Syariah	53,34	49,23	213,94	434,57%	301,08%

KLAIM

Total Klaim yang dibayarkan oleh Perseroan di Tahun 2021 adalah senilai Rp 63,39 miliar atau mencapai 112,47% dari RKAP 2021 dan mengalami kenaikan sebesar 49,20% jika dibandingkan realisasi tahun 2020. Mayoritas klaim yang dibayarkan bersumber dari pengajuan klaim atas Penjaminan Kredit Multiguna dan masih didominasi akibat terjamin meninggal dunia ± 88,87%, sedangkan klaim lainnya disebabkan oleh debitur/terjamin melakukan wanprestasi (macet).

Keberadaan dari perusahaan regaransi turut andil dalam mengurangi kerugian/biaya yang disebabkan oleh beban klaim. Sebagai contohnya adalah Penjaminan Kredit Multiguna yang diregaransikan dengan *share* sebanyak 65%, berarti bahwa Perseroan hanya memiliki kewajiban pembayaran sebesar 35% dari total biaya klaim sebenarnya. Langkah tersebut terbukti sangat signifikan dalam menekan angka pembayaran klaim yang dilakukan oleh Perseroan, meskipun dikhawatirkan terjadi risiko piutang reasuransi dari perusahaan reasuransi



apabila beban klaim yang menjadi tanggung jawab perusahaan reasuransi lebih besar dibanding hak IJP reasuransinya.

Strategi regaransi untuk membagi potensi risiko klaim akan dijalankan oleh Perseroan untuk tahun-tahun selanjutnya, terutama untuk kredit-kredit yang memiliki potensi klaim cukup tinggi seperti Kredit Multiguna, Kredit Konstruksi dan Kredit Usaha Menengah.

Adapun strategi lainnya pada bidang klaim adalah melakukan sosialisasi, menerapkan prinsip kehati-hatian dan melaksanakan penyelesaian pembayaran klaim sesuai dengan ketentuan regulasi dan/atau SLA (*Service Level Agreement*) yang disepakati serta merekomendasikan penerapan metode *Stop Loss* Perjanjian Kerja Sama baru maupun Perpanjangan khususnya untuk skim kredit yang memiliki klaim rasio tinggi.

SUBROGASI

Subrogasi adalah peralihan hak tagih dan penerima jaminan kepada penjamin setelah penerima jaminan menerima pembayaran klaim dari penjamin. Perseroan sebagai pihak penjamin membukukan hasil dari penagihan subrogasi sebagai pendapatan Perseroan.

Pada Tahun 2021 Perseroan memperoleh Pendapatan Subrogasi senilai Rp2,62 miliar atau mencapai 119,89% dari RKAP 2020 dan mengalami kenaikan sebesar 44,38% jika dibandingkan realisasi tahun 2020.

Adapun pendapatan subrogasi tahun 2021 berasal dari subrogasi atas klaim penjaminan kredit usaha menengah, kredit usaha kecil, kredit usaha mikro, kredit konstruksi, bank garansi dan kredit multiguna dengan rincian sebagai berikut :



PT JAMKRIDA JABAR KOMPOSISI PENDAPATAN SUBROGASI PERIODE 1 JANUARI - 31 DESEMBER 2021

(dalam Rupiah)

JENIS KREDIT	SUBROGASI	REGAR	NETTO
Produktif	2.821.363.499	1.263.534.279	1.557.829.220
Non Produktif	2.224.620.779	1.160.493.709	1.064.127.070
TOTAL	5.045.984.278	2.424.027.988	2.621.956.290
SKIM KREDIT	SUBROGASI	REGAR	NETTO
Kredit Usaha Menengah	212.787.513	106.393.757	106.393.757
Kredit Usaha Kecil	1.679.654.016	839.094.235	840.559.781
Kredit Usaha Mikro	329.387.042	143.602.213	185.784.829
Kredit Koperasi	-	-	-
Kredit Konstruksi	494.534.928	153.444.074	341.090.854
Bank Garansi	105.000.000	21.000.000	84.000.000
Surety Bond	-	-	-
Kredit Multiguna	2.224.620.779	1.160.493.709	1.064.127.070
TOTAL	5.045.984.278	2.424.027.988	2.621.956.290

Untuk lebih meningkatkan pendapatan subrogasi, Perseroan telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan *update* data subrogasi setiap bulan secara rutin.
2. Melakukan rekonsiliasi data subrogasi secara periodik dengan kantor cabang Penerima Jaminan (bank dan non bank) terkait minimal setiap 3 bulan, baik melalui surat maupun *on the spot* ke lapangan.
3. Melakukan penagihan kepada Terjamin (debitur) secara bersama-sama dengan Penerima Jaminan (bank dan non bank) secara optimal.
4. Menginventarisasi data agunan Terjamin (debitur) khususnya untuk kasus tertentu dimana proses pembayaran dirasa cukup sulit atau nasabah tidak sanggup lagi untuk melakukan pembayaran, dan bekerja sama dengan Penerima Jaminan (bank dan non bank) untuk melakukan penjualan agunan baik melalui proses lelang maupun melalui Lembaga yang ditunjuk oleh Penerima Jaminan (bank dan non bank).
5. Melakukan kerja sama penagihan piutang subrogasi dengan pihak ketiga.

Strategi subrogasi kedepan adalah meningkatkan kegiatan monitoring dan penagihan piutang subrogasi serta menerapkan pola incentif (*collecting fee*) kepada mitra yang melakukan penagihan subrogasi kepada terjamin sesuai anggaran yang telah disediakan, serta bekerja sama dengan pihak ke 3 (perusahaan profesional yang bergerak dalam usaha penagihan subrogasi) sehingga pendapatan subrogasi dapat ditingkatkan.

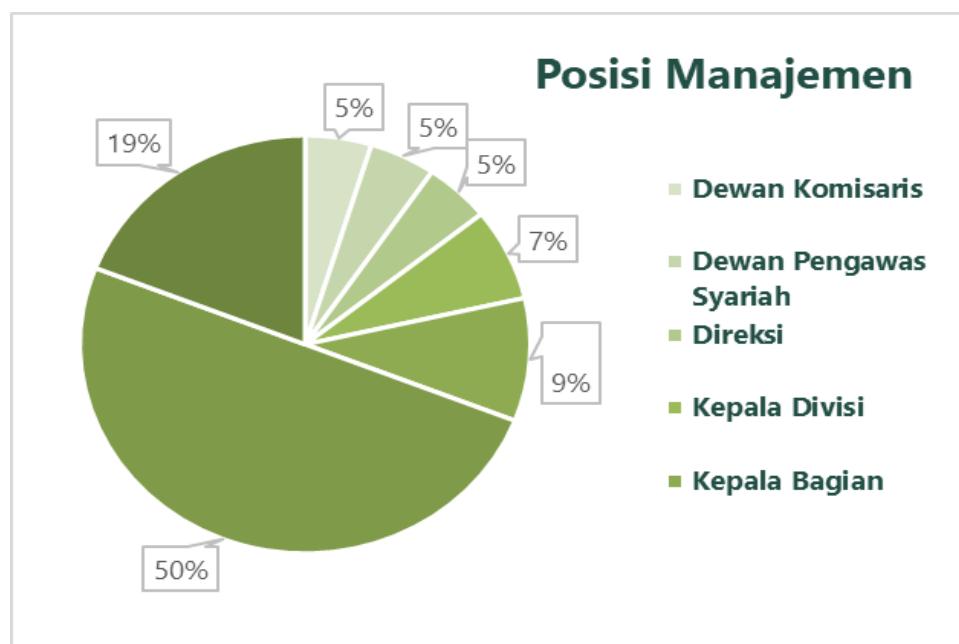
ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) dipandang oleh Perseroan sebagai salah satu unsur Perseroan yang sangat berharga dan sangat penting dalam proses kegiatan usaha. Memahami pentingnya peran SDM bagi Perseroan, maka *Competency Based Human Resources Management (CBHRM)* diterapkan manajemen dalam proses perekrutan, penempatan, dan pembinaan.

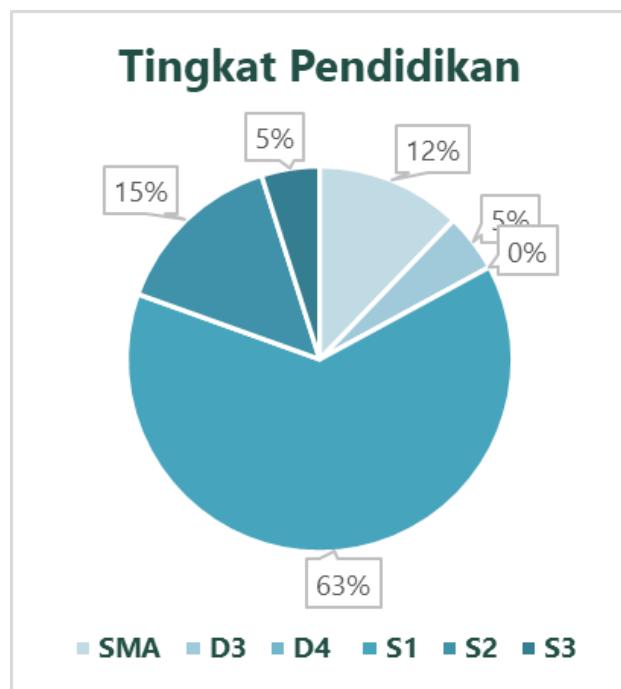
Dalam melakukan aktivitas operasionalnya, sampai dengan 31 Desember 2021 Perseroan didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 44 (*empat puluh empat*) orang termasuk Pengurus Perseroan dengan klasifikasi sebagai berikut:

- 1 (*satu*) orang Komisaris Independen dan sejak tanggal 21 Desember 2021 menjadi 2 (*dua*) orang Dewan Komisaris (Komisaris Utama dan Komisaris Independen);
- 2 (*dua*) orang Dewan Pengawas Syariah;
- 3 (*tiga*) orang Direksi, dan sejak tanggal 25 November 2021 menyisakan 2 (*dua*) orang Direksi (Direktur Keuangan dan Direktur Operasional);
- 2 (*dua*) orang Anggota Komite;
- 28 (*dua puluh delapan*) orang Karyawan Tetap; dan
- 8 (*delapan*) orang Karyawan Kontrak Waktu Tertentu (KKWT).

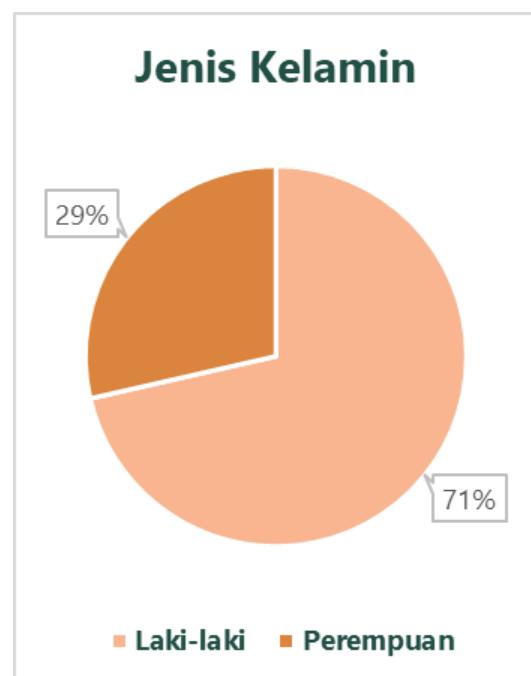
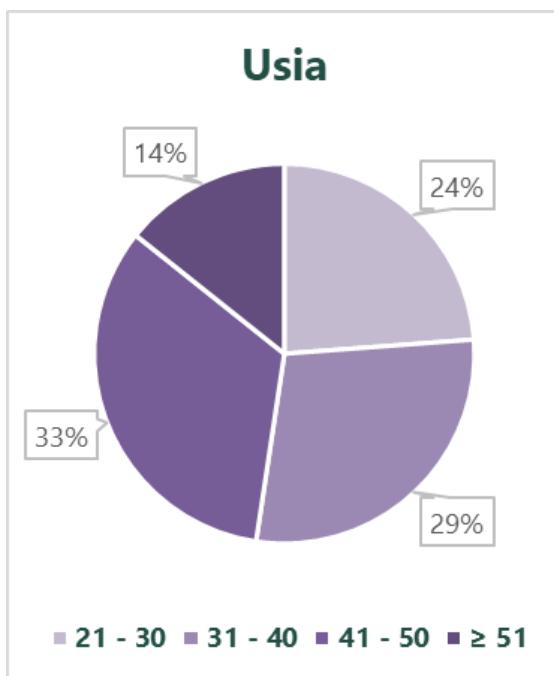
Klasifikasi SDM Berdasarkan Posisi Manajemen



Klasifikasi SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Klasifikasi SDM Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin



Adapun perubahan jumlah karyawan sepanjang tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

PT JAMKRIDA JABAR PERUBAHAN JUMLAH SDM TAHUN 2020 DAN 2021		
JABATAN	2020	2021
Dewan Komisaris	1	2
Dewan Pengawas Syariah	2	2
Komite	1	2
Direksi	2	2
Kepala Divisi	3	3
Kepala Bagian	6	4
Staf	22	21
Karyawan Kontrak (KKWT)	9	8
TOTAL	46	44

Perseroan terus berkomitmen untuk melakukan pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka menciptakan manusia yang berkualitas, memiliki keterampilan, kemampuan kerja, dan loyalitas kerja kepada perusahaan sehingga mencapai hasil kerja yang berbasis pada kinerja (*performance target*) yang telah ditetapkan.

Salah satu program pengembangan SDM yang dilakukan Perseroan adalah melalui pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan *job description* di setiap unit kerja, seperti *skill training*, *retraining* atau pelatihan ulang, *cross functional training*, *team training*, dan *creativity training*.

Adapun program pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti SDM Perseroan selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:



NO.	AGENDA PENDIDIKAN & PELATIHAN	WAKTU KEGIATAN	PENYELENGGARA KEGIATAN	PESERTA
1	Training <i>Corporate Secretary</i>	Januari 2021	PT Media Edutama Indonesia	Sekretaris Perusahaan
2	<i>Integrating Risk Management and Compliance</i>	Februari 2021	GRC Management	Komisaris Independen
3	Penerapan PSAK 71, 72, 73	Februari 2021	PT Eight Teknologi Inovasi	<ul style="list-style-type: none"> - Kadiv. Keuangan & Umum - Staf Akunting - Staf Sistem Manajemen Informasi - Staf Manajemen Risiko, - Staf Teknik Penjaminan
4	<i>Webinar Series Integration Risk Management and Compliance</i>	Februari 2021	GRC Management	<ul style="list-style-type: none"> - Kabag. Klaim & Restitusi - Staf Klaim & Restitusi - Staf Manajemen Risiko
5	Pelatihan <i>All About Perjanjian Kerja</i>	April 2021	HR Indo	Staf Senior Hukum
6	GRC Webinar Series	April 2021	GRC Management	<ul style="list-style-type: none"> - Kabag. Klaim & Restitusi - Staf Klaim & Restitusi
7	<i>Inhouse Training Sesi Motivasi</i>	Juni 2021	Remaja Talenta Indonesia	Seluruh Pegawai
8	Analisis skenario dalam Permodelan Keuangan RKAP	Agustus 2021	PPM Management	Kadiv. Keuangan & Umum
9	Pelatihan Peningkatan kapasitas dan kompetensi hal Manajemen Risiko	Agustus 2021	GRC Management	<ul style="list-style-type: none"> - Kabag. Klaim & Restitusi
10	Pelatihan Sertifikasi Pengawas Syariah	September 2021	LSP MUI	Dewan Pengawas Syariah
11	E-Learning dan Ujian RCC CRGP	Oktober 2021	LSP MKS	Direktur Operasional
12	Diklat Asuransi Kredit & Penjaminan Kredit	Oktober 2021	PT Ahliasuransi Manajemen Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> Staf Teknik Staf Marketing

13	<i>Intensive Course Legal Due Diligence</i>	November 2021	Lembaga ET Asia	Staf Senior Hukum
14	<i>Exclusive Course Anticorruption Compliance For Corporate Practice</i>	November 2021	Lembaga ET Asia	Staf Senior Hukum
15	<i>Master Class Program Series XXI</i>	Desember 2021	LSPMR	<ul style="list-style-type: none"> - Kabag. Klaim, Restitusi & Pengendalian - Kabag. Manajemen Risiko & Subrogasi - Staf Klaim, Restitusi & Pengendalian
16	<i>Chartered Financial Analyst (CFA) Level 1</i>	November 2021 – Februari 2022	Pusat Pengembangan Akuntansi FEUI	Staf Investasi
17	<i>Inhouse Training Tentang Korupsi</i>	Desember 2021	AnP Law Firm	Seluruh Pegawai
18	<i>Inhouse Training Tentang Suretyship</i>	Desember 2021	Divisi Penjaminan	16 Pegawai yang merupakan perwakilan dari setiap bagian

ASPEK UMUM

Sebagai bagian *supporting* yang menunjang kebutuhan dan sarana prasarana dari divisi-divisi lain dalam menjalankan operasional, maka berikut ini adalah capaian yang dilakukan oleh bagian umum PT Jamkrida Jabar pada tahun 2021:

1. Pengelolaan Inventaris Kantor:
 - a. Gedung dan aset-aset di dalamnya.
 - b. Kendaraan inventaris kantor.
 - c. Pengadaan kebutuhan karyawan seperti ATK, seragam, dan lain-lain.
2. Penertiban Administrasi:
 - a. Penertiban administrasi kantor.
 - b. Penertiban pengarsipan dokumen kantor.
3. Menyediakan sarana prasarana dalam penyelenggaraan RUPS Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020 dan RUPS Luar Biasa Tahun 2021 (persetujuan dan pengesahan RKAP tahun 2022).



Dalam melaksanakan tugasnya, bagian umum mengelola Belanja Modal Perseroan. Adapun realisasi belanja modal selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

PT JAMKRIDA JABAR LAPORAN BELANJA MODAL PER 31 DESEMBER 2021			
(dalam Jutaan Rupiah)			
BELANJA MODAL	RKAP 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN
Inventaris	548	275	50,20%
Kendaraan	683	448	65,59%
Gedung	550	148	26,94%
Kesisteman	320	232	72,42%
JUMLAH	2.101	1.103	52,50%

Berdasarkan tabel diatas, Perseroan merealisasikan belanja modal sebesar 52,50% atau senilai Rp1,10 miliar dari anggaran senilai Rp2,10 miliar. Pengeluaran Belanja Modal ini tentunya disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan.

ASPEK TEKNOLOGI DAN KESISTEMAN

Realisasi Program Kerja Bagian Sistem Manajemen Informasi sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No.	Program Kerja	Deskripsi
1	Sistem <i>Accrual</i> (<i>upgrade + re-write</i>) Versi 2.00 (http://192.168.76.10:2020)	<i>Upgrade</i> aplikasi <i>accrual</i> menggunakan metode perhitungan PSAK 71 - 72
2	<i>Upgrade</i> dan <i>Maintenance Server Database</i> , <i>Backup</i> dan <i>Server web</i>	<i>Upgrade server database</i> HP ProLiant DL380 Gen10 5118 - 8SFF menggunakan sistem operasi Linux Centos versi 7.9. <i>Database PostgreSQL</i> versi 12.
3	<i>Maintenance</i> Jaringan Local Area Network (LAN), Akses Point dan Internet	Optimalisasi routing jaringan LAN, akses point dan internet. Membangun aplikasi monitoring <i>traffic server</i> , LAN dan internet.
4	<i>Upgrade</i> PC Operasional dengan SSD	<i>Upgrade</i> komponen <i>hardisk</i> semua PC operasional dengan SSD untuk mempercepat kinerja PC. <i>Install</i> ulang dan <i>maintenance</i> PC operasional.
5	Sistem Koreksi dan Tutup Buku – Versi 3.4 Modul Restruk dan tutup buku penjaminan	Pembuatan modul restrukturisasi dan koreksi pada sistem informasi penjaminan dan pengendalian.



	(http://192.168.76.10)	Pembuatan modul tutup buku penjaminan
6	Sistem DISFO – Media Penyampaian Informasi – Versi 1.00	Pembuatan aplikasi DISFO berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP, sebagai media penyampaian informasi dan agenda Perseroan serta pemasangan dan setting TV untuk tiap lantai (Lt1, Lt2, dan Lt3)
7	<i>Upgrade</i> Modul Klaim – Versi 3.3	Penambahan modul laporan klaim pencatatan porsi klaim dalam penjaminan ulang.
8	<i>Upgrade</i> Sistem Penjaminan – Versi 3.4 (Batas Kadaluwarsa PKS – Filter Penerbitan SP) (http://192.168.76.10)	Penambahan fitur batas kadaluwarsa PKS pada saat pengajuan penerbitan sertifikat penjaminan (SP). Penambahan fitur master PKS. Penambahan fitur cetak label pengiriman SP.
9	Migrasi <i>Mail Server</i> dan <i>Website</i> Korporat	Migrasi <i>mail server</i> dan <i>website</i> korporat dari <i>server local</i> ke penyedia layanan <i>hosting</i> PT Qwords Company Internasional untuk meningkatkan keamanan dan kelancaran pengiriman dan penerimaan <i>email</i> korporat.
10	Sistem <i>Scoring CBC</i>	Penyusunan proses bisnis dan format form skoring untuk skim KMK, BG, dan Multiguna. Hasil akhir penggeraan masih berupa form skoring dalam bentuk excel dan Sistem <i>Scoring</i> baru akan di buat aplikasi tahun 2022
11	<i>Disaster Recovery Center</i>	Pusat penyimpanan dan pengolahan data. Implementasi selesai akhir januari 2022
12	<i>Upgrade</i> PABX 48 extention	Pengkombinasian PABX dengan IP Phone
13	<i>General Affair Information System</i>	Bekerja sama dengan vendor dalam memfasilitasi pendataan aset-aset Perseroan.
14	Sistem SDM	Bekerja sama dengan vendor <i>Hadirr</i> dalam memfasilitasi sistem absensi online via <i>mobile phone</i> .
15	Pemeliharaan Komputer (<i>Software</i> dan <i>Hardware</i>)	Pemeliharaan seluruh komputer agar berkinerja baik.
16	<i>Updating</i> pada modul-modul Sistem Informasi (Penjaminan, Klaim, & Keuangan)	Pekerjaan insidentil atas permintaan <i>user</i> (unit kerja) baik yang bersifat major maupun minor

ASPEK PENGAWASAN

Sebagai organ pendukung Perseroan dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola perusahaan untuk dapat meningkatkan nilai tambah bagi *stakeholders*, yaitu suatu kaidah, norma ataupun praktik bisnis yang sehat dan beretika. Dalam penerapannya, tata kelola perusahaan yang baik memerlukan praktik pengawasan yang mengacu pada prinsip GCG.

Dalam mewujudkan GCG, Satuan Pengawasan Internal (SPI) memiliki beberapa peran, diantaranya:



1. Sebagai pengawas independen yang melakukan audit, evaluasi dan menilai operasional dan aktivitas perusahaan;
2. Sebagai katalisator dan konsultan dalam hal-hal tertentu bagi Direksi dan manajemen yang berkaitan dengan praktik manajemen risiko, sistem pengendalian internal dan praktik GCG serta dalam upaya meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan secara berkelanjutan.

Unit SPI Perseroan merupakan aparat pengawas (auditor) internal Perusahaan yang dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Hal-hal yang telah dilakukan Unit SPI Perseroan selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan audit internal sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan.
2. Monitoring terhadap pelaksanaan GCG yang diterapkan Perseroan.
3. Melakukan *review* terhadap SOP yang berlaku di Perseroan.
4. *Counterpart* dengan auditor eksternal (KAP dan OJK).

Unit Usaha Syariah





UNIT USAHA SYARIAH

Unit Usaha Syariah PT Jamkrida Jabar memperoleh izin pembentukan berdasarkan Surat Keputusan OJK Nomor: KEP-4/NB.223/2015 tanggal 3 Februari 2015 dan mulai menjalankan produksinya pada bulan Mei 2015, Unit Usaha Syariah menjadi bukti komitmen Perseroan dalam mengembangkan bisnis penjaminan.

Unit Usaha Syariah PT Jamkrida Jabar dipimpin oleh Kepala Unit Usaha Syariah dan dibina oleh dua orang Dewan Pengawas Syariah yang direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta telah lolos Uji Kelayakan dan Kepatutan dari OJK.

Sebagai sarana penunjang operasionalnya, Unit Usaha syariah PT Jamkrida Jabar telah membangun Sistem Informasi *Kafalah* berbasis *web* dan layanan *Kafalah Online*. Dimana sistem tersebut dapat menampilkan data Penjaminan, Klaim, dan Subrogasi secara *up to date*. Selain itu, dalam sistem informasi tersebut juga dapat ditampilkan perhitungan *gearing ratio*, regaransi, dan *bussiness recovery program*, serta saat ini dalam proses pengembangan dan akan terintegrasi dengan Sistem Informasi Keuangan.

Dengan modal awal pendirian senilai Rp15 miliar dan penambahan modal senilai Rp10 miliar, Unit Usaha Syariah sampai dengan 31 Desember 2021 memiliki Total Ekuitas sebesar Rp34,07 miliar, Total Aset sebesar Rp44,17 miliar, telah menjamin pembiayaan senilai Rp3,51 triliun dengan memperoleh Imbal Jasa Kafalah senilai Rp43,29 miliar, dengan 197.820 *makful anhu*/terjamin, dimana 148.750 diantaranya merupakan UMKM.

Adapun kinerja Unit Usaha Syariah PT Jamkrida Jabar selama tahun 2021 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini.



VOLUME PEMBIAYAAN

UNIT USAHA SYARIAH PT JAMKRIDA JABAR LAPORAN VOLUME PEMBIAYAAN TAHUN 2020 DAN 2021

(dalam Jutaan Rupiah)

URAIAN	REALISASI 2020	RKAP 2021 PERUBAHAN	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	GROWTH 2020-2021
Per Kredit					
Produktif	164.487,37	230.471,48	527.472,36	228,87%	220,68%
Non Produktif	466.793,15	495.873,60	418.862,38	84,47%	-10,27%
Jumlah	631.280,52	726.345,09	946.334,73	130,29%	49,91%
Per Produk					
Pembiayaan Usaha Menengah	21.399,67	57.960,83	82.133,75	141,71%	283,81%
Pembiayaan Usaha Kecil	-	-	-	-	-
Pembiayaan Usaha Mikro	130.529,27	144.498,13	428.650,62	296,65%	228,39%
Pembiayaan Koperasi	-	-	-	-	-
Pembiayaan Konstruksi	2.250,00	17.108,97	6.864,00	40,12%	205,07%
Bank Garansi	9.247,43	10.903,55	4.862,98	44,60%	-47,41%
Surety Bond	1.061,00	-	4.961,00	-	367,58%
Pembiayaan Multiguna	466.793,15	495.873,60	418.862,38	84,47%	-10,27%
Jumlah	631.280,52	726.345,09	946.334,73	130,29%	49,91%

Volume Pembiayaan yang dijamin tahun 2021 adalah senilai Rp946,33 miliar atau terealisasi sebesar 130,29% dari RKAP 2021 Perubahan, dimana Volume Pembiayaan Produktif senilai Rp230,47 miliar (tercapai 228,87%) dan Non Produktif senilai Rp 368,60 miliar (tercapai 84,47%). Volume Pembiayaan tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 49,91% jika dibandingkan realisasi tahun 2020.

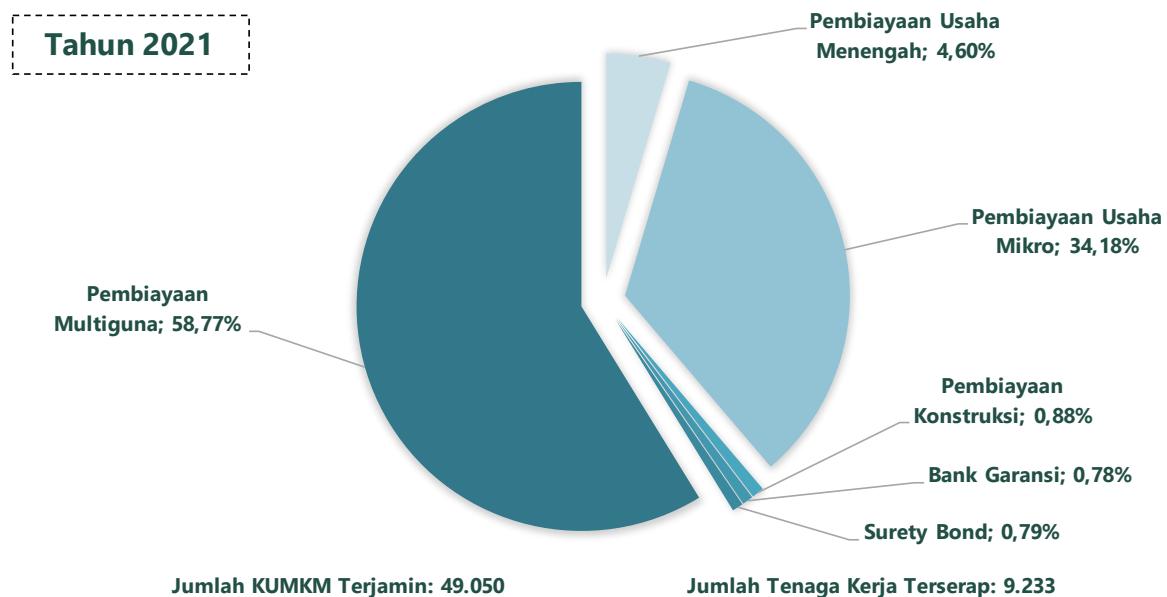


VOLUME KAFALAH

UNIT USAHA SYARIAH PT JAMKRIDA JABAR LAPORAN VOLUME KAFALAH TAHUN 2020 DAN 2021

(dalam Jutaan Rupiah)

URAIAN	REALISASI 2020	RKAP 2021 PERUBAHAN	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	GROWTH 2020-2021
Per Sektor					
Produktif	105.452,26	125.066,56	258.547,13	206,73%	145,18%
Non Produktif	454.771,28	493.093,52	368.604,42	74,75%	-18,95%
Total	560.223,54	618.160,07	627.151,55	101,45%	11,95%
Per Skim					
Pembiayaan Usaha Menengah	11.116,42	14.553,71	28.877,24	198,42%	159,77%
Pembiayaan Usaha Kecil	-	-	-	-	-
Pembiayaan Usaha Mikro	82.227,41	84.615,68	214.354,71	253,33%	160,69%
Pembiayaan Koperasi	-	-	-	-	-
Pembiayaan Konstruksi	1.800,00	14.061,33	5.491,20	39,05%	205,07%
Bank Garansi	9.247,43	11.143,14	4.862,98	43,64%	-47,41%
Surety Bond	1.061,00	692,70	4.961,00	716,18%	367,58%
Pembiayaan Multiguna	454.771,28	493.093,52	368.604,42	74,75%	-18,95%
Total	560.223,54	618.160,07	627.151,55	101,45%	11,95%



Volume Kafalah tahun 2021 adalah senilai Rp627,15 miliar atau terealisasi sebesar 101,45% dari RKAP 2021 Perubahan, dimana Volume Kafalah Produktif senilai Rp258,55 miliar (tercapai

206,73%) dan Non Produktif senilai Rp368,60 miliar (tercapai 74,75%). Volume Kafalah tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 11,95% jika dibandingkan realisasi tahun 2020.

IMBAL JASA KAFALAH CASH BASIS

UNIT USAHA SYARIAH PT JAMKRIDA JABAR LAPORAN IJK CASH BASIS TAHUN 2020 DAN 2021

(dalam Jutaan Rupiah)

URAIAN	REALISASI 2020	RKAP 2021 PERUBAHAN	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	GROWTH 2020-2021
Per Kredit					
Produktif	1.548,95	1.929,01	3.957,16	205,14%	155,47%
Non Produktif	7.073,62	7.891,21	6.203,15	78,61%	-12,31%
Jumlah	8.622,57	9.820,22	10.160,31	103,46%	17,83%
Per Produk					
Pembiayaan Usaha Menengah	324,81	680,65	796,86	117,07%	145,33%
Pembiayaan Usaha Kecil	-	-	-		
Pembiayaan Usaha Mikro	1.108,75	1.228,99	2.979,29	242,42%	168,71%
Pembiayaan Koperasi	-	-	-		
Pembiayaan Konstruksi	24,75	-	48,05		94,13%
Bank Garansi	77,24	19,37	36,92	190,58%	-52,21%
Surety Bond	13,39	-	96,04		617,08%
Pembiayaan Multiguna	7.073,62	7.891,21	6.203,15	78,61%	-12,31%
Jumlah	8.622,57	9.820,22	10.160,31	103,46%	17,83%

Pendapatan IJK Cash Basis tahun 2021 adalah senilai Rp10,16 miliar atau terealisasi sebesar 103,46% dari RKAP 2021 Perubahan, dimana Pendapatan IJK Produktif senilai Rp3,96 miliar (tercapai 205,14%) dan Non Produktif senilai Rp6,20 miliar (tercapai 78,61%). Pendapatan IJK Cash Basis tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 17,83% jika dibandingkan realisasi tahun 2020.



IMBAL JASA KAFALAH ACCRUAL BASIS

UNIT USAHA SYARIAH PT JAMKRIDA JABAR LAPORAN IJK ACCRUAL BASIS TAHUN 2020 DAN 2021

(dalam Jutaan Rupiah)

URAIAN	REALISASI 2020	RKAP 2021 PERUBAHAN	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	GROWTH 2020-2021
Per Kredit					
Produktif	1.356,22	1.777,48	2.229,59	125,44%	64,40%
Non Produktif	6.517,87	7.736,05	9.657,40	124,84%	48,17%
Jumlah	7.874,09	9.513,53	11.886,99	124,95%	50,96%
Per Produk					
Pembiayaan Usaha Menengah	336,19	661,95	442,01	66,77%	31,47%
Pembiayaan Usaha Kecil	-	-	-	-	-
Pembiayaan Usaha Mikro	654,43	1.083,39	1.649,75	152,28%	152,09%
Pembiayaan Koperasi	11,00	4,25	1,95	45,92%	-82,24%
Pembiayaan Konstruksi	41,56	1,09	31,35	2865,26%	-24,56%
Bank Garansi	124,22	23,42	36,87	157,40%	-70,32%
Surety Bond	188,82	3,37	67,66	2010,40%	-64,17%
Pembiayaan Multiguna	6.517,87	7.736,05	9.657,40	124,84%	48,17%
Jumlah	7.874,09	9.513,53	11.886,99	124,95%	50,96%

note : *nilai anggaran dan realisasi telah dikurangi nilai restitusi

Pendapatan IJK Accrual Basis tahun 2021 adalah senilai Rp11,89 miliar atau terealisasi sebesar 124,95% dari RKAP 2021 Perubahan, dimana Pendapatan IJK Produktif senilai Rp2,23 miliar (tercapai 125,44%) dan Non Produktif senilai Rp9,66 miliar (tercapai 124,84%). Pendapatan IJK Accrual Basis tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 50,96% jika dibandingkan realisasi tahun 2020.



KUMKM TERJAMIN

UNIT USAHA SYARIAH PT JAMKRIDA JABAR LAPORAN JUMLAH KUMKM TERJAMIN TAHUN 2020 DAN 2021

(dalam Satuan Unit/Orang)

URAIAN	REALISASI 2020	RKAP 2021 PERUBAHAN	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	GROWTH 2020-2021
Pembiayaan Usaha Menengah	86	113	34	30,20%	-60,47%
Pembiayaan Usaha Kecil	-	-	-		
Pembiayaan Usaha Mikro	38.619	39.741	48.942	123,15%	26,73%
Pembiayaan Koperasi	-	-	-		
Pembiayaan Konstruksi	2	16	28	179,21%	1300,00%
Bank Garansi	70	84	42	49,79%	-40,00%
Surety Bond	6	4	4	102,11%	-33,33%
Jumlah	38.783	39.957	49.050	122,76%	26,47%

Jumlah KUMKM Terjamin (Makful Anhu) tahun 2021 adalah sebanyak 49.050 unit/orang atau terealisasi sebesar 122,76% dari RKAP 2021 Perubahan. Jumlah KUMKM Terjamin tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 26,47% jika dibandingkan tahun 2020.



LAPORAN LABA RUGI

UNIT USAHA SYARIAH PT JAMKRIDA JABAR LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021

(dalam Jutaan Rupiah)

	2020 (AUDITED)	RKAP 2021 PERUBAHAN	2021 (AUDITED)	CAPAIAN 2021	GROWTH 2020-2021
PENDAPATAN PENJAMINAN					
Imbal Jasa Penjaminan/Kafalah	7.879,65	9.551,45	12.004,09	125,68%	52,34%
Beban Akuisisi	(1.328,24)	(1.228,23)	(2.013,35)	163,92%	51,58%
Restitusi IJP	(5,56)	(37,92)	(117,11)	308,81%	2004,59%
Manajemen Fee	336,03	435,21	618,79	142,18%	84,15%
Beban Regaransi	(3.018,20)	(4.520,10)	(4.563,50)	100,96%	51,20%
JUMLAH PENDAPATAN PENJAMINAN	3.863,67	4.200,41	5.928,93	141,15%	53,45%
KLAIM					
Beban Klaim	(2.600,94)	(4.165,23)	(3.675,60)	88,24%	41,32%
Pemulihan (Pembentukan) Cadangan Klaim	(0,00)	5,74	106,93	1863,39%	
JUMLAH KLAIM	(2.600,94)	(4.159,49)	(3.568,67)	85,80%	37,21%
PENDAPATAN PENJAMINAN BERSIH					
PENDAPATAN INVESTASI	2.627,29	2.293,95	2.645,71	115,33%	0,70%
PENDAPATAN SUBROGASI	53,34	49,23	213,94	434,57%	301,09%
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN	(437,50)	(398,21)	(354,05)	88,91%	-19,07%
BEBAN USAHA					
Beban Operasional	(102,03)	(250,61)	(133,27)	53,18%	30,61%
Beban Sumber Daya Manusia	(683,81)	(941,74)	(606,40)	64,39%	-11,32%
Beban Administrasi dan Umum	(219,03)	(275,64)	(163,02)	59,14%	-25,57%
BEBAN USAHA	(1.004,87)	(1.467,99)	(902,69)	61,49%	-10,17%
LABA SEBELUM PAJAK	2.500,99	517,90	3.963,16	765,23%	58,46%
BEBAN PAJAK PENGHASILAN					
Beban Pajak Kini	-	-	-		
Manfaat Pajak tangguhan	-	-	-		
JUMLAH BEBAN PAJAK PENGHASILAN	-	-	-		
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	2.500,99	517,90	3.963,16	765,23%	58,46%
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	251,40	(20,00)	(168,86)	844,28%	-167,17%
LABA KOMPREHENSIF	2.752,38	497,90	3.794,30	762,06%	37,86%

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Dari Laporan Laba Rugi diatas terlihat bahwa:

- Laba Bersih Tahun Berjalan adalah sebesar Rp3,96 miliar atau terealisasi sebesar 765,23% dari RKAP 2021 Perubahan dan mengalami pertumbuhan sebesar 58,46% jika dibandingkan realisasi tahun 2020.
- Total Aset UUS tahun 2021 adalah senilai Rp44,17 miliar atau mengalami penurunan sebesar 0,63% dibandingkan realisasi tahun 2020 senilai Rp44,54 miliar.



- Pendapatan Investasi tahun 2021 adalah senilai Rp2,65 miliar atau terealisasi sebesar 115,33% dari RKAP 2021 Perubahan dan mengalami pertumbuhan sebesar 0,70% jika dibandingkan realisasi tahun 2020.
- Beban Klaim tahun 2021 adalah senilai Rp3,68 miliar atau terealisasi sebesar 88,24% dari RKAP 2021 Perubahan dan mengalami pertumbuhan sebesar 41,32% jika dibandingkan realisasi tahun 2020.
- Beban Usaha tahun 2021 adalah senilai Rp902,69 juta atau terealisasi sebesar 61,49% dari RKAP 2021 Perubahan dan mengalami penurunan sebesar 10,17% jika dibandingkan realisasi tahun 2020.

Beberapa faktor yang mempengaruhi capaian kinerja Unit Usaha Syariah PT Jamkrida Jabar adalah:

- Dari sisi capaian Volume Kafalah, terlihat bahwa Kafalah Pembiayaan Usaha Menengah, Mikro, dan *Surety Bond* mampu melampaui target, namun disisi lain Kafalah Pembiayaan Konstruksi, Kontra Bank Garansi, dan Kafalah Pembiayaan Multiguna masih dibawah target.
- Salah satu faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target Kafalah Pembiayaan Konstruksi dan Kontra Bank Garansi adalah tidak maksimalnya kontribusi dari mitra bank umum syariah dikarenakan penyerapan pembiayaan pada skim ini tidak maksimal akibat banyaknya proyek yang sumber dana berasal dari APBN dan APBD tidak terealisasi di tahun 2021 ataupun dijadwal ulang di tahun berikutnya (masih sebagai dampak Pandemi Covid-19). Sedangkan untuk Kafalah Pembiayaan Multiguna di tahun 2021, UUS mengambil kebijakan untuk lebih selektif dan membatasi akseptasi sebagai bagian dari upaya pemenuhan rasio penjaminan usaha produktif yang masih di bawah ketentuan OJK paling sedikit 25%.
- Untuk Kafalah Pembiayaan Usaha Kecil dan Koperasi tidak ditargetkan secara khusus dalam RKAP 2021 Perubahan dikarenakan adanya penyesuaian nomenklatur.
- Faktor lainnya adalah tidak semua pembiayaan terutama skim produktif dibagi risikonya oleh bank kepada mitra Asuransi/Penjaminan dengan alasan masih ter-*cover* oleh agunan dan adanya permintaan perluasan *coverage* yaitu menjamin risiko jiwa untuk nasabah perorangan yang belum dapat dipenuhi dengan alasan regulasi dan Perseroan belum memiliki mitra *co-branding* (Asuransi Jiwa).
- Masuknya beberapa pesaing baru (Asuransi/Penjaminan berskala nasional) khususnya pada mitra Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sehingga dilakukan kebijakan *risk & market sharing*.

Prospek dan Pengembangan Usaha



PROSPEK DAN PENGEMBANGAN USAHA

Penyaluran kredit (baik *cash loan* maupun *non cash loan*) dari perbankan cenderung masih konservatif di *era new normal*, meskipun demikian industri penjaminan nyatanya tumbuh signifikan, terutama didorong amanat pemerintah agar pelaku industri penjaminan memperbesar penjaminan bagi para pelaku usaha (UMKM) dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

Jumlah Perusahaan Penjaminan yang tercatat di OJK adalah sebanyak 22 Perusahaan, yaitu:

- 20 Perusahaan Penjaminan Konven (1 BUMN, 18 BUMD, 1 BUMS)
- 2 Perusahaan Penjaminan Syariah (2 Anak Usaha BUMN)

Berdasarkan Data OJK, menunjukkan bahwa Total Aset Perusahaan Penjaminan posisi Desember 2021 mencapai Rp36,9 triliun (Konven Rp32,45 triliun dan Syariah Rp4,45 triliun) atau tumbuh 46,66% dibandingkan posisi Desember 2020 sebesar Rp25,16 triliun.

Perusahaan Penjaminan/Lembaga Penjamin merupakan lembaga keuangan khusus yang berperan mendorong kemandirian usaha dan pemberdayaan dunia usaha serta meningkatkan akses bagi dunia usaha, khususnya UMKM dan usaha prospektif lainnya kepada sumber pembiayaan.

Keberadaan Lembaga Penjamin sangat dibutuhkan untuk memupuk kepercayaan industri perbankan dalam menyalurkan kredit kepada UMKM. Peran Lembaga Penjamin saat ini terbilang sangat penting, guna mengawal pertumbuhan dan perkembangan UMKM baik daerah maupun nasional.

Penjaminan kredit biasanya diberikan kepada UMKM yang belum memenuhi syarat perbankan dalam peminjaman kredit (*unbankable*) namun memiliki prospek bisnis yang baik (*eligible*) antara lain karena produknya banyak dipesan atau diminta oleh pasar. Dengan penjaminan kredit, UMKM yang *unbankable* tetapi *eligible* akan lebih mudah mendapatkan suntikan dana dari perbankan dengan jaminan yang diberikan oleh Lembaga Penjamin.

Dalam mendorong pengembangan usaha penjaminan kredit, Perseroan akan terus berupaya memperluas jaringan pemasaran dan kemitraan dengan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Perseroan menggunakan konsep *market driven* dalam memetakan pasar-pasar yang potensial (baik wilayah maupun mitra kerja), mengidentifikasi kebutuhan pasar (mitra kerja), mengumpulkan dan meng-update kondisi pasar termasuk



pesaing. Hal-hal tersebut akan menunjang kelengkapan dan akurasi data yang diperlukan dalam membuat profil risiko dan kebijakan yang akan diambil.

Perseroan secara periodik akan melakukan *review*, memperbarui, dan melengkapi *Standard Operating Procedure* (SOP) di seluruh bagian (unit kerja) dan juga melakukan review atas Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) sehingga diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan organisasis secara menyeluruh sekalipun pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.

Selain itu Perseroan juga secara periodik akan melakukan review atas Perjanjian-Perjanjian Kerja Sama disesuaikan dengan kondisi pasar, evaluasi kerja sama resiprokal, membuka peluang kerja sama penjaminan bersama (*co-guarantee*) dengan perusahaan penjaminan lain, membuka peluang kerja sama produk (*co-branding*) dengan perusahaan asuransi (jiwa dan umum), melakukan *gathering*, *sharing session*, dan sosialisasi bisnis penjaminan, dan pengembangan layanan berbasis teknologi informasi.

Seiring dengan terbitnya Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Peraturan tersebut berlaku efektif pada 31 Agustus 2021. Ketentuan ini mengatur rasio penyaluran kredit perbankan ke sektor UMKM yang semula paling sedikit 20% menjadi paling sedikit sebesar 30% pada tahun 2024.

Kebijakan ini memberikan opsi yang lebih luas bagi perbankan untuk berpartisipasi dalam pembiayaan UMKM, masyarakat berpenghasilan rendah, dan pembiayaan yang bersifat inklusif lainnya. Disisi lain hal tersebut merupakan peluang bagi Perseroan untuk terus meningkatkan peran serta dalam pengembangan sektor produktif sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Kebijakan Dividen





KEBIJAKAN DIVIDEN

Kebijakan yang dilakukan Perseroan terkait dengan laba bersih Perseroan adalah:

1. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 2/POJK.05/2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin, pada Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa "*Lembaga Penjamin wajib menyisihkan cadangan umum paling sedikit 25% (dua puluh lima per seratus) dari laba bersih atau selisih hasil usaha pada tiap akhir periode laporan tahunan.*"
2. Sebagai entitas yang relatif masih baru, PT Jamkrida Jabar tentunya membutuhkan permodalan yang relatif besar untuk menjaga likuiditasnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 2/POJK.05/2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin, menyatakan bahwa (1) "*Lembaga Penjamin wajib menjaga tingkat likuiditasnya.*" dan (2) "*Lembaga Penjamin wajib menjaga rasio likuiditas paling rendah 120% (seratus dua puluh per seratus).*"
3. Selain dari hal tersebut, hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan juga menjadi salah satu dasar Perseroan dalam menyusun kebijakan dividen dan menyusun kebijakan penggunaan laba bersih Perseroan.

Rencana Bisnis

Tahun 2022





RENCANA BISNIS TAHUN 2022

Perekonomian Indonesia pada triwulan II 2021 mencatat pertumbuhan positif untuk pertama kali sejak merebaknya pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020, sebesar 7,07% (yoY). Pemerintah berharap dengan semangat optimis dari semua elemen masyarakat untuk berjuang menghadapi tantangan berat di masa pandemi Covid-19 ini, mampu menghadirkan perubahan yang luar biasa menuju perbaikan yang berkelanjutan sehingga mempercepat pemulihhan ekonomi.

Aksi kolektif dan kolaborasi pemerintah (termasuk Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia), industri, dunia usaha dan masyarakat dalam rangka perluasan dan percepatan vaksinasi ini diharapkan mampu menciptakan kekebalan komunal (*herd immunity*) yang mendukung mobilitas masyarakat sehingga perekonomian dapat kembali bergerak. Selain itu diyakini turut membangun motivasi dan kepercayaan dunia usaha dan masyarakat untuk mempercepat mewujudkan terbentuknya ketahanan kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional.

Berdasarkan prognosis tahun 2021, Perseroan telah melakukan penjaminan kredit produktif terhadap KUMKM dengan volume penjaminan mencapai Rp1,81 triliun dan penjaminan non produktif dengan volume penjaminan mencapai Rp4,74 triliun.

Dalam rangka meningkatkan kinerja, Perseroan juga terus membangun komunikasi dan kepercayaan yang baik dengan berbagai mitra strategis dan memperluas jangkauan pemasaran sehingga berpotensi lebih banyak mitra yang dapat dilayani.

Upaya progresif tersebut tentunya tetap diimbangi dengan prinsip kehati-hatian (prudential), sehingga manajemen diharapkan dapat menjalankan Perseroan yang sehat, efisien, dan berbasis manajemen risiko. Perseroan juga dituntut untuk terus beradaptasi dengan perkembangan bisnis yang begitu cepat dan kompetitif.

Menyikapi berbagai peluang dan tantangan yang ada, maka Perseroan perlu menyusun rencana bisnis yang baik dan komprehensif. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi roadmap dalam meraih target dan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang. Adapun beban operasional dan non operasional yang ditargetkan dalam RKAP 2021, Perseroan masih menargetkan nilai-nilai yang masih dalam tahap wajar dan terukur.



ASUMSI-ASUMSI PENYUSUNAN RKAP 2022

ASUMSI MIKRO

Asumsi-asumsi makro yang digunakan dalam penyusunan RKAP 2022 adalah sebagai berikut:

ASUMSI-ASUMSI MAKRO RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN TAHUN 2022			
NO.	URAIAN	ASUMSI	
		RAPBN 2022	OUTLOOK 2021
1.	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (<i>yoY</i>)	5,0% - 5,5%	3,7% - 4,5%
2.	Laju Inflasi (<i>yoY</i>)	3,0%	1,8% - 2,5%
3.	Nilai Tukar Rupiah per USD	Rp14.350,-	Rp14.200,- - Rp14.600,-
4.	Suku Bunga SUN 10 Tahun	6,82%	6,34% - 7,24%
5.	Suku Bunga Acuan	3,00%	3%
6.	BBM Non-Subsidi (Pertamax)	Rp10.400,-/liter*	Rp10.400,-/liter*

* Sumber: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/>

ASUMSI MIKRO

Asumsi-asumsi mikro yang digunakan dalam penyusunan RKAP 2022 adalah sebagai berikut:

ASUMSI-ASUMSI MIKRO RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN TAHUN 2022			
NO.	URAIAN	ASUMSI	KETERANGAN
1.	Kenaikan IJP Accrual Basis	41%	Dari Prognosa 2021
2.	Kenaikan Beban Klaim	21%	Dari Prognosa 2021
3.	Kenaikan Subrogasi	21%	Dari Prognosa 2021
4.	Biaya Akuisisi	20%	
5.	Manajemen <i>Fee</i> dari Regaransi	15%	Dari IJP Regar Cash Basis
6.	Proporsi <i>Treaty</i> Regaransi	50 : 50	Produktif & Non Produktif
7.	Bunga Deposito	3%	
8.	Kenaikan Beban Operasional	35%	Dari Prognosa 2021
9.	Kenaikan Beban SDM	55%	Dari Prognosa 2021
10.	Kenaikan Beban Administrasi & Umum	47%	Dari Prognosa 2021



ASUMSI LAINNYA

Asumsi-asumsi lain yang digunakan dalam penyusunan RKAP 2022 adalah sebagai berikut:

ASUMSI-ASUMSI LAINNYA RENCANA KERJA DAN ANGgaran PERUSAHAAN TAHUN 2022

- a. Kasus Covid-19 terkendali dengan baik di level nasional dan daerah pada tahun 2022.
- b. Terbentuknya ketahanan kesehatan (kekebalan komunal/*herd immunity*).
- c. Kebijakan PPKM dihentikan.
- d. Pulihnya kepercayaan dunia usaha dan masyarakat sehingga mengakselerasi pertumbuhan ekonomi
- e. Proyek-proyek yang dibiayai oleh APBN/APBD berjalan sesuai jadwal.
- f. Kebijakan pemerintah dalam hal relaksasi kredit masih diperpanjang.
- g. Outstanding restrukturisasi kredit sebagai dampak Covid-19 masih tinggi.
- h. Persetujuan penambahan modal disetor dilakukan pada akhir tahun 2022 dan realisasinya di tahun 2023.



PROYEKSI-PROYEKSI RKAP TAHUN 2022

PROYEKSI LAPORAN POSISI KEUANGAN

PT JAMKRIDA JABAR
PROYEKSI LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2022

(dalam Jutaan Rupiah)

NO.	URAIAN	RKAP 2021	Prognosa 2021	RKAP 2022	GROWTH RKAP 2022/ RKAP 2021	GROWTH RKAP 2022/ Prognosa 2021
1	2	3	4	5	6 = (5-3)/3	7 = (5-4)/4
ASET						
1 ASET LANCAR						
	Kas & Bank	13,956	10,544	10,303	-26%	-2%
	Deposito	140,466	160,966	167,966	20%	4%
	CKKE Aset Keuangan	(12,579)	(12,516)	(12,516)	-1%	0%
	Piutang Re/Cogaransi	25,494	27,696	30,371	19%	10%
	Pendapatan Yang Masih Akan Diterima	1,864	3,027	3,201	72%	6%
	Biaya Dibayar Dimuka	19,519	16,826	20,394	4%	21%
	Aset Keuangan	65,573	63,436	80,436	23%	27%
	Aset Tersedia Untuk Dijual	2,495	2,495	2,495	0%	0%
	JUMLAH ASET LANCAR	256,789	272,475	302,651	18%	11%
2 ASET TIDAK LANCAR						
	Aset Tetap					
	Tanah	3,464	3,464	3,464	0%	0%
	Gedung Kantor	7,800	7,580	8,124	4%	7%
	Inventaris	3,171	3,124	4,342	37%	39%
	Kendaraan	4,184	4,184	4,198	0%	0%
	Nilai Perolehan Aset Tetap	18,618	18,352	20,127	8%	10%
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(4,992)	(5,033)	(6,171)	24%	23%
	Jumlah Aset Tetap	13,626	13,319	13,956	2%	5%
	Biaya Dibayar Dimuka - Jangka Panjang	81,790	78,141	82,417	1%	5%
	Aset Pajak Tangguhan	11,724	12,099	12,264	5%	1%
	Aset Lain-Lain					
	Nilai Perolehan Aset Lain-Lain	1,069	0,941	1,406	32%	49%
	Akumulasi Amortisasi Aset Lain-Lain	(0,860)	(0,843)	(1,078)	25%	28%
	Jumlah Aset Lain-Lain	0,208	0,097	0,327	57%	236%
	JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	107,348	103,656	108,965	2%	5%
	JUMLAH ASET	364,137	376,131	411,616	13%	9%
LIABILITAS DAN EKUITAS						
1 LIABILITAS JANGKA PENDEK						
	Utang Pajak	0,344	0,355	0,380	11%	7%
	Utang Re/Cogaransi	8,513	15,234	16,134	90%	6%
	Penampungan Sementara	4,279	10,898	10,398	143%	-5%
	Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Pendek	32,686	40,152	45,352	39%	13%
	Hutang Lancar Lainnya	6,701	0,348	0,347	-95%	0%
	JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	52,522	66,987	72,612	38%	8%
2 LIABILITAS JANGKA PANJANG						
	Cadangan - Cadangan	8,170	7,763	10,117	24%	30%
	Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Panjang	104,191	99,369	123,806	19%	25%
	Liabilitas Jangka Panjang	2,710	2,403	3,026	12%	26%
	JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	115,072	109,535	136,949	19%	25%
3 EKUITAS						
	Penyertaan Modal	153,200	153,200	153,200	0%	0%
	Cadangan Umum	37,784	40,139	41,700	10%	4%
	Laba (Rugi)	5,764	6,243	7,128	24%	14%
	Selisih Nilai Wajar Surat Berharga	0,074	(0,189)	(0,189)	-356%	0%
	Kerugian Imbalan Pasti Setelah Aset Pajak Tangguhan	(0,278)	0,216	0,216	-178%	0%
	JUMLAH EKUITAS	196,544	199,609	202,055	3%	1%
	JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	364,137	376,131	411,616	13%	9%



Total Aset pada RKAP 2022 diproyeksikan senilai Rp411,62 miliar atau naik sebesar 9% jika dibandingkan dengan Prognosa 2021 senilai Rp376,13 miliar.

Total Ekuitas pada RKAP 2022 diproyeksikan senilai Rp202,06 miliar atau naik sebesar 1% jika dibandingkan dengan Prognosa 2021 senilai Rp199,61 miliar.

Total Liabilitas Jangka Pendek pada RKAP 2022 diproyeksikan senilai Rp72,61 miliar atau naik sebesar 8% jika dibandingkan dengan Prognosa 2021 senilai Rp66,99 miliar.

Total Liabilitas Jangka Panjang pada RKAP 2022 diproyeksikan senilai Rp136,95 miliar atau naik sebesar 25% jika dibandingkan dengan Prognosa 2021 senilai Rp109,54 miliar.

PROYEKSI LAPORAN LABA (RUGI)

PT JAMKRIDA JABAR PROYEKSI LAPORAN LABA (RUGI) TAHUN 2022

(dalam Jutaan Rupiah)

NO.	URAIAN	RKAP 2021	Prognosa 2021	RKAP 2022	GROWTH RKAP 2022/RKAP 2021	GROWTH RKAP 2022/Prog. 2021
1	2	3	4	5	6 = (5-3) /3	7 = (5-4)/4
I	PENDAPATAN PENJAMINAN					
1.1	Imbal Jasa Penjaminan	151,138	148,058	208,293	38%	41%
1.2	Biaya Akuisisi	(20,439)	(23,685)	(33,332)	63%	41%
1.3	Beban Regaransi	(70,602)	(68,783)	(102,242)	45%	49%
1.4	Management Fee	10,057	8,986	16,545	65%	84%
	Imbal Jasa Penjaminan Bersih	70,155	64,576	89,265	27%	38%
II	BEBAN KLAIM					
2.1	Beban Klaim	(56,362)	(54,934)	(66,375)	18%	21%
2.2	Beban (Pemulihan) Cadangan Klaim	(0,500)	(0,636)	(1,028)	106%	62%
2.3	Pendapatan Subrogasi	2,187	2,293	2,778	27%	21%
	Beban Klaim Bersih	(54,675)	(53,277)	(64,625)	18%	21%
III	PENDAPATAN PENJAMINAN - BERSIH	15,480	11,299	24,640	59%	118%
IV	PENDAPATAN INVESTASI - BERSIH	12,701	12,761	12,946	2%	1%
	CKKE ASET KEUANGAN	2,481	2,481			-100%
V	BEBAN USAHA					
4.1	Beban Operasional	(3,019)	(2,728)	(3,687)	22%	35%
4.2	Beban SDM	(15,699)	(12,662)	(19,680)	25%	55%
4.3	Beban Administrasi dan Umum	(5,715)	(5,003)	(7,339)	28%	47%
	Jumlah Beban Usaha	(24,433)	(20,393)	(30,706)	26%	51%
VI	PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN	0,136	0,320	0,083	-39%	-74%
VII	LABA SEBELUM PAJAK	6,365	6,469	6,963	9%	8%
VIII	MANFAAT (BEBAN) PAJAK	(0,601)	(0,227)	0,165	128%	173%
IX	LABA TAHUN BERJALAN	5,764	6,243	7,128	24%	14%



Laba Tahun Berjalan pada RKAP 2022 diproyeksikan senilai Rp7,13 miliar atau tumbuh sebesar 14% jika dibandingkan dengan Prognosa 2021 senilai Rp6,24 miliar.

IJP Accrual Basis pada RKAP 2022 diproyeksikan senilai Rp208,29 miliar atau tumbuh sebesar 41% dibandingkan Prognosa 2021 senilai Rp148,06 miliar. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan target Volume Penjaminan dan IJP Cash Basis pada 2022.

Management Fee pada RKAP 2022 diproyeksikan senilai Rp16,55 miliar atau tumbuh sebesar 84% dibandingkan Prognosa 2021 senilai Rp8,99 miliar.

Biaya Akuisisi pada RKAP 2022 diproyeksikan senilai Rp33,33 miliar atau tumbuh sebesar 41% dibandingkan Prognosa 2021 senilai Rp23,69 miliar.

Pendapatan Investasi pada RKAP 2022 diproyeksikan senilai Rp12,95 miliar atau tumbuh sebesar 1% dibandingkan Prognosa 2021 senilai Rp11,30 miliar, hal ini disebabkan oleh pertumbuhan dana kelolaan investasi yang rendah dan penurunan rata-rata suku bunga deposito.

Pendapatan Subrogasi pada RKAP 2022 diproyeksikan senilai Rp2,79 miliar atau tumbuh sebesar 21% dibandingkan Prognosa 2021 senilai Rp2,29 miliar.

Beban Klaim pada RKAP 2022 diproyeksikan senilai Rp66,38 miliar atau tumbuh sebesar 21% dibandingkan Prognosa 2021 senilai Rp54,93 miliar, hal ini disebabkan oleh peningkatan Outstanding Volume Penjaminan dan proyeksi dihitung berdasarkan trend klaim tahun-tahun sebelumnya.

Beban Operasional pada RKAP 2022 diproyeksikan senilai Rp3,69 miliar atau tumbuh sebesar 35% dibandingkan Prognosa 2021 senilai Rp2,73 miliar seiring dengan target pengembangan dan peningkatan pasar penjaminan, peningkatan target penerimaan subrogasi, dan verifikasi lapangan atas pengajuan klaim.

Beban Regaransi pada RKAP 2022 diproyeksikan senilai Rp102,24 miliar atau tumbuh sebesar 49% dibandingkan Prognosa 2021 senilai Rp68,78 miliar, hal ini sejalan dengan proyeksi peningkatan IJP Cash Basis.

Beban SDM pada RKAP 2022 diproyeksikan senilai Rp19,68 miliar atau tumbuh sebesar 55% dibandingkan Prognosa 2021 senilai Rp12,66 miliar.

Beban Administrasi dan Umum pada RKAP 2022 diproyeksikan senilai Rp7,34 miliar atau tumbuh sebesar 47% dibandingkan Prognosa 2021 senilai Rp5,00 miliar.



Dalam rangka upaya penguatan permodalan, saat ini Perseroan masih dalam proses mengusulkan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 17 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Jamkrida Jabar.

PROYEKSI VOLUME PENJAMINAN

PT JAMKRIDA JABAR PROYEKSI VOLUME PENJAMINAN TAHUN 2022							
(dalam Ribuan Rupiah)							
No.	Uraian	RKAP 2021	Prognosa 2021	RKAP 2022	Capaian Prognosa 2021/RKAP 2021	Growth RKAP 2022/RKAP 2021	Growth RKAP 2022/Prognosa 2021
1	2	3	4	5	6 = 4/3	7 = (5-3)/3	8 = (5-4)/4
I	Per Skim						
1	Kredit Usaha Menengah	484.533.429	470.135.820	798.580.399	97%	65%	70%
2	Kredit Usaha Kecil	41.241.097	52.664.606	88.658.041	-	-	-
3	Kredit Usaha Mikro	121.525.668	215.507.744	269.384.680	177%	122%	25%
4	Kredit Koperasi	221.817.939	177.839.441	222.299.301	-	-	-
5	Kredit Konstruksi	703.204.299	567.886.669	710.416.622	81%	1%	25%
6	Bank Garansi	239.541.637	318.903.012	399.361.424	133%	67%	25%
7	Surety Bond	692.702	4.961.003	6.201.253	716%	795%	25%
8	Kredit Multiguna	4.913.484.583	4.743.383.663	6.469.416.991	97%	32%	36%
	Total	6.726.041.354	6.551.281.958	8.964.318.713	97%	33%	37%
II	Per Sektor						
1	Produktif	1.812.556.771	1.807.898.296	2.494.901.721	100%	38%	38%
2	Non Produktif	4.913.484.583	4.743.383.663	6.469.416.991	97%	32%	36%
	Total	6.726.041.354	6.551.281.958	8.964.318.713	97%	33%	37%

Pada RKAP 2022 diproyeksikan Volume Penjaminan senilai Rp8,96 triliun atau naik sebesar 37% jika dibandingkan dengan Prognosa 2021 senilai Rp6,55 triliun.

Perseroan optimis penjaminan sektor produktif tumbuh sebesar 38%, sedangkan sektor non produktif tumbuh sebesar 36%.



PROYEKSI OUTSTANDING PENJAMINAN

PT JAMKRIDA JABAR PROYEKSI OUTSTANDING PENJAMINAN TAHUN 2022 (dalam Ribuan Rupiah)							
No.	Uraian	RKAP 2021	Prognosa 2021	RKAP 2022	Capaian Prognosa 2021/RKAP 2021	Growth RKAP 2022/RKAP 2021	Growth RKAP 2022/Prognosa 2021
1	2	3	4	5	6 = 4/3	7 = (5-3)/3	8 = (5-4)/4
I	Per Skim						
1	Kredit Usaha Meneng	322.693.688	303.056.009	166.184.235	93,91%	-48,50%	-45,16%
2	Kredit Usaha Kecil	18.101.916	33.948.329	150.548.077	187,54%	731,67%	343,46%
3	Kredit Usaha Mikro	97.035.506	138.919.253	240.450.480	143,16%	147,80%	73,09%
4	Kredit Koperasi	183.446.751	114.637.747	252.384.805	62,49%	37,58%	120,16%
5	Kredit Konstruksi	478.805.896	366.067.549	752.946.516	76,45%	57,26%	105,69%
6	Bank Garansi	183.771.561	205.569.263	322.337.214	111,86%	75,40%	56,80%
7	Surety Bond	840.218	3.197.930	3.738.476	380,61%	344,94%	16,90%
8	Kredit Multiguna	4.208.097.418	4.774.441.223	4.893.780.914	113,46%	16,29%	2,50%
	Total	5.492.792.954	5.939.837.301	6.782.370.718	108,14%	23,48%	14,18%
II	Per Sektor						
1	Produktif	1.284.695.536	1.165.396.079	1.888.589.803	90,71%	47,01%	62,06%
2	Non Produktif	4.208.097.418	4.774.441.223	4.893.780.914	113,46%	16,29%	2,50%
	Total	5.492.792.954	5.939.837.301	6.782.370.718	108,14%	23,48%	14,18%

Pada RKAP 2022 diproyeksikan Outstanding Penjaminan senilai Rp6,78 triliun atau naik sebesar 14,18% jika dibandingkan dengan Prognosa 2021 senilai Rp5,94 triliun.

PROYEKSI IMBAL JASA PENJAMINAN

PT JAMKRIDA JABAR PROYEKSI IMBAL JASA PENJAMINAN CASH BASIS TAHUN 2022 (dalam ribuan rupiah)							
No.	Uraian	RKAP 2021	Prognosa 2021	RKAP 2022	Capaian Prognosa 2021/RKAP 2021	Growth RKAP 2022/RKAP 2021	Growth RKAP 2022/Prognosa 2021
1	2	3	4	5	6 = 4/3	7 = (5-3)/3	8 = (5-4)/4
I	Per Skim						
1	Kredit Usaha Menengah	15.611.407	15.539.921	26.116.882	100%	67%	68%
2	Kredit Usaha Kecil	1.888.693	2.114.968	3.718.547	112%	97%	76%
3	Kredit Usaha Mikro	2.204.643	3.827.463	4.784.329	174%	117%	25%
4	Kredit Koperasi	2.709.743	2.323.126	2.903.907	86%	7%	25%
5	Kredit Konstruksi	7.886.536	7.261.088	9.081.794	92%	15%	25%
6	Bank Garansi	2.005.956	2.806.931	3.514.491	140%	75%	25%
7	Surety Bond	-	96.044	120.055	-	-	25%
8	Kredit Multiguna	133.522.619	137.521.923	188.587.288	103%	41%	37%
	Total	165.829.597	171.491.463	238.827.292	103%	44%	39%
II	Per Sektor						
1	Produktif	32.306.979	33.969.540	50.240.004	105%	56%	48%
2	Non Produktif	133.522.619	137.521.923	188.587.288	103%	41%	37%
	Total	165.829.597	171.491.463	238.827.292	103%	44%	39%



Pada RKAP 2022 diproyeksikan Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) Cash Basis senilai Rp238,83 miliar atau naik sebesar 39% jika dibandingkan dengan Prognosa 2021 senilai Rp171,49 miliar.

Perseroan optimis IJP Cash Basis sektor produktif tumbuh sebesar 48% sedangkan sektor non produktif tumbuh 37%.

SASARAN DAN STRATEGI USAHA

SASARAN USAHA

Sasaran utama dalam penyusunan rencana bisnis jangka pendek atau RKAP 2022 adalah peningkatan jumlah terjamin/debitur di sektor produktif (KUMKM) di Jawa Barat sebagai bagian dari implementasi janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih yaitu menyediakan fasilitas jaminan kredit mesra atau masyarakat sejahtera dengan pinjaman modal usaha yang cukup mudah didapatkan bagi masyarakat Jawa Barat untuk modal dalam menjalankan usaha dengan tetap memperhatikan prinsip bisnis penjaminan, yaitu prudent, profitable, dan berdaya guna serta berbasis risiko.

Selain sasaran tersebut, sasaran lain yang menjadi prioritas Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Laba Setelah Pajak

Perolehan laba bersih (net profit/EAT) senilai Rp7,13 miliar atau meningkat 14% dari laba bersih Perseroan pada Prognosa 2021 yang senilai Rp6,24 miliar.

2. Pelayanan Mitra Strategis

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan, pelayanan kepada mitra merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan perusahaan. Penerbitan sertifikat penjaminan yang cepat dan tepat, serta penanganan klaim yang mudah dan pembayaran klaim yang benar dan tepat waktu menjadi komponen penting dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada mitra.

3. Teknologi Informasi

Pada era perkembangan teknologi informasi seperti saat ini yang berkembang dengan sangat pesat, Perseroan dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi informasi.



STRATEGI USAHA

1. Pengelolaan portofolio bisnis secara prudent untuk mempertahankan profitabilitas dan menjaga kesehatan finansial dan operasional.
2. Mendorong percepatan pemenuhan rasio penjaminan usaha produktif sesuai dengan regulasi.
3. Mengedepankan kerja sama resiprokal dan menguntungkan (*profitable*) dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential) dan pengelolaan manajemen risiko yang komprehensif.
4. Mengakselerasi penambahan modal untuk menjaga total gearing ratio.
5. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas melalui teknologi informasi.

KEBIJAKAN

Untuk mencapai Visi dan Misi perusahaan, perlu didukung oleh kebijakan-kebijakan dalam merespon percepatan dan dinamika yang berkembang di masyarakat serta sebagai landasan dalam penyusunan rencana bisnis perusahaan.

KEBIJAKAN BIDANG PENJAMINAN

1. Pemenuhan rasio penjaminan bagi usaha produktif.
2. Perluasan segmentasi pasar dan produk penjaminan.
3. Peningkatan penjaminan sektor produktif.
4. Peningkatan *market share* pada mitra eksisting.
5. Percepatan akseptasi penjaminan.
6. Optimalisasi penjaminan *online*.
7. Menjaga *Service Level Agreement*.

KEBIJAKAN BIDANG KEUANGAN

1. Pengelolaan investasi yang berpedoman pada peraturan dan regulasi dengan tetap mengutamakan prinsip prudential, profitable dan/atau berbasis resiprocal.
2. Kebijakan pengelolaan keuangan dan akuntansi adalah:
 - a. *Transparency*,
 - b. *Accountable*,
 - c. *Prudent*,



- d. *Anticipative*,
- e. *Timeline Base*,
- f. *Fairness*.

KEBIJAKAN BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM

1. Optimalisasi SDM eksisting dengan rotasi dan promosi berbasis kebutuhan dan kompetensi.
2. Implementasi program pengembangan SDM dengan mengikuti program pelatihan yang terstruktur.
3. Melakukan analisis jabatan (*job analysis*) dan analisis beban kerja (*workload analysis*).
4. Penyusunan indikator penilaian kinerja utama (*Key Performance Indicators*).
5. Kebijakan *Integrated Human Resources Management System* (IHRMS).
6. Pengelolaan aset Perseroan secara efektif dan efisien berbasis teknologi informasi.
7. Pengembangan dan pengimplementasian budaya perusahaan.

KEBIJAKAN BIDANG MANAJEMEN RISIKO, CLAIM, DAN SUBROGASI

1. Implementasi nilai-nilai *risk culture* dan *risk governance*.
2. Pelaksanaan aktivitas bisnis berbasis budaya manajemen risiko.
3. Penyelesaian klaim secara tepat waktu (sesuai *Service Level Agreement*), tepat jumlah dan tepat sasaran.
4. Penyelesaian restitusi secara tepat waktu (sesuai *Service Level Agreement*), tepat jumlah dan tepat sasaran.
5. Optimalisasi pengelolaan piutang subrogasi melalui sistem manajemen penagihan yang handal dan efektif.
6. Melakukan analisis terhadap beban klaim dengan metode pembayaran klaim berbasis pendapatan penjaminan, subrogasi, dan skala prioritas (*budget control*).
7. Pengelolaan risiko atas akseptasi penjaminan yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian, ketentuan perusahaan, dan regulasi (*compliance*).
8. Pembayaran beban regaransi (kepada perusahaan re-asuransi melalui broker) menggunakan skema *offset*.



KEBIJAKAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

1. Pemantauan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan dan regulasi khususnya di bidang penjaminan serta pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.
2. Fasilitasi komunikasi yang baik antara Perseroan dengan pemegang saham (shareholder) dan pemangku kepentingan lainnya (stakeholders).
3. Penyampaian laporan kepada shareholder dan regulator secara tepat waktu.
4. Peningkatan pengelolaan informasi dan standar layanan informasi publik.
5. Digitalisasi pengelolaan kearsipan dan tata kelola surat.
6. Peningkatan dan pengembangan layanan Sistem Manajemen Informasi Perseroan.
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk hukum (kebijakan dan legislasi) Perseroan.

KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERNAL

1. Peningkatan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal.
2. Optimalisasi pengawasan internal berbasis risiko.
3. Penerapan pengawasan internal yang independen dan profesional.
4. Penerapan sistem manajemen kinerja yang efisien dan efektif.
5. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan.
6. Penyusunan Pedoman Audit Berbasis Risiko.
7. Pengembangan Profesi dan Kompetensi Personil.

RENCANA KERJA OPERASIONAL

Rencana kerja operasional dalam rangka mencapai target perolehan Imbal Jasa Penjaminan dalam RKAP 2022 terbagi dalam 2 bidang, yaitu Bidang Pemasaran dan Teknik Penjaminan.

BIDANG PEMASARAN

1. Meningkatkan kegiatan pemasaran produk-produk penjaminan kredit yang disalurkan oleh lembaga keuangan baik bank maupun non bank (*cash loan* dan *non cash loan*).
2. Meningkatkan penetrasi pasar produk penjaminan produktif non kredit seperti *surety bond* dan *custom bond*.
3. Meningkatkan kerja sama dengan agen-agen *surety bond*.
4. Meningkatkan market share penjaminan produktif pada *captive* dan *non captive market*.
5. Memprioritaskan penjaminan produktif dan berjangka pendek.



6. Memperluas pasar baik jenis maupun wilayah secara prudent dan berbasis risiko.
7. Meningkatkan kegiatan monitoring dan evaluasi kerja sama penjaminan.
8. Meningkatkan realisasi kerja sama *co-guarantee* (kogaransi/ penjaminan bersama) eksisting dengan perusahaan penjaminan lainnya pada segmen produktif dan merintis kerja sama serupa yang saling menguntungkan.
9. Melakukan inisiasi kerja sama *co-branding* dengan perusahaan asuransi jiwa/umum.
10. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM bagian pemasaran.

BIDANG TEKNIK PENJAMINAN

1. Melakukan seleksi dan analisis kelayakan sebagai bagian dari implementasi manajemen risiko terhadap calon penerima jaminan dan calon terjamin.
2. Memperluas fitur produk penjaminan.
3. Mempercepat proses akseptasi atas pengajuan penjaminan *case by case* berbasis *scoring* dengan tetap mengedepankan prinsip prudential dan kemampuan analisis.
4. Merancang produk penjaminan baru dengan tetap mengedepankan kaidah-kaidah dasar penjaminan, yaitu *prudent*, *profitable*, berdaya guna, dan implementatif serta memperhitungkan potensi risikonya.
5. Meningkatkan layanan penjaminan sesuai *Service Level Agreement*.
6. Melakukan rekonsiliasi data penjaminan secara periodik.
7. Melakukan sosialisasi penggunaan Aplikasi Penjaminan *Online* dan *Host to Host* kepada seluruh admin mitra.
8. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM bagian teknik.
9. Melakukan kerja sama dengan aktuaris dalam penyusunan profil risiko setiap produk penjaminan.

RENCANA KERJA NON OPERASIONAL (SUBROGASI)

Rencana kerja non operasional yang akan dilakukan dalam rangka mencapai target perolehan pendapatan subrogasi pada RKAP 2022, antara lain:

1. Melakukan kunjungan secara berkala dan komunikasi intensif dengan penanggung jawab (*P/C*) penagihan subrogasi pada penerima jaminan di setiap kantor pusat/cabang bank.
2. Melakukan optimalisasi pengelolaan, penagihan, dan rekonsiliasi subrogasi baik secara langsung, bersama-sama penerima jaminan, atau surat secara berkala.
3. Menjajaki kerja sama dengan pihak ke-3 dalam rangka penagihan piutang subrogasi kepada terjamin (melalui agen), atau membentuk tim khusus penyelesaian subrogasi.



4. Melakukan survey *on the spot* untuk menggali informasi agar dapat mengklasifikasikan agunan yang potensial menjadi subrogasi.
5. Memungkinkan untuk ikut memasarkan atas agunan yang potensial dan menguntungkan dalam rangka percepatan pengembalian subrogasi kepada pihak ke-3.

RENCANA KERJA PENGADAAN

Dalam rangka mendukung kegiatan operasional Perseroan dalam mencapai target RKAP 2022, maka diperlukan dukungan dalam hal infrastruktur. Berikut ini rencana kerja pengadaan atau belanja modal pada tahun 2022, diantaranya:

1. Menyediakan kebutuhan bagian sistem manajemen informasi dalam pengembangan sistem informasi manajemen Perseroan.
2. Menyediakan tools pendukung dalam rangka memenuhi kebutuhan kantor.
3. Meningkatkan kualitas kenyamanan dan keamanan Gedung Perseroan.

RENCANA KERJA SEKRETARIS PERUSAHAAN

Dalam rangka mendukung kegiatan operasional Perseroan dalam mencapai target RKAP 2022, unit kerja Sekretaris Perusahaan yang membawahi kesekretariatan, perencanaan perusahaan, hukum, dan sistem manajemen informasi (TI) memiliki rencana kerja, antara lain:

1. Melakukan keterbukaan informasi publik, termasuk ketersediaan informasi dalam situs Web Perseroan.
2. Menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pesaham secara tepat waktu.
3. Menyelenggarakan dan mendokumentasikan Rapat Umum Pemegang Saham:
 - a. Mempersiapkan logistik untuk pelaksanaan RUPS dan laporan tahunan;
 - b. Menyiapkan materi RUPS;
 - c. Mempersiapkan tata tertib dan skenario RUPS;
 - d. Menyiapkan berita acara RUPS bersama-sama notaris dan bagian hukum.
4. Menyelenggarakan dan mendokumentasikan rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
5. Melaksanakan program orientasi terhadap perusahaan untuk Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
6. Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan secara tepat waktu.
7. Menciptakan citra baik Perseroan.
8. Mengkomunikasikan segala bentuk informasi tentang Perseroan kepada stakeholders.
9. Menjalin hubungan yang baik dengan media.
10. Meningkatkan pengelolaan media sosial Perseroan.



11. Melakukan digitalisasi pengarsipan dan pengelolaan pada dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kegiatan administrasi.
12. Meningkatkan kualitas penyusunan dan penyajian laporan perseroan.
13. Menyusun dan/atau me-review atas peraturan, kebijakan, dan legislasi Perseroan.
14. Menyusun peraturan dan kebijakan Perseroan yang baru.
15. Menyusun dan/atau me-review atas perjanjian kerja sama dan/atau yang setara.
16. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM pada unit kerja sekretaris perusahaan.
17. Penambahan SDM yang mengelola kehumasan.

RENCANA KERJA SISTEM MANAJEMEN INFORMASI (TI)

1. Menjamin ketersediaan dukungan teknologi informasi untuk menunjang operasional Perseroan.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana teknologi informasi untuk menunjang operasional Perseroan.
3. Mengembangkan layanan teknologi informasi yang terintegrasi dan terstandardisasi.
4. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM programmer.
5. Meningkatkan layanan kepada mitra:
 - a. Pengembangan Aplikasi Penjaminan *Online* dan *Host to Host*,
 - b. Penerbitan Sertifikat Penjaminan Elektronik (*e-certificate*).
6. Pengembangan dan *Upgrade/Rewrite*:
 - a. Aplikasi Keuangan dan Akuntansi;
 - b. Aplikasi Manajemen Risiko, Klaim, dan Subrogasi;
 - c. Aplikasi Informasi Penjaminan;
 - d. Aplikasi Manajemen SDM;
 - e. Mirroring dan penyesuaian Aplikasi Syariah;
 - f. Aplikasi *Scoring* Penjaminan;
 - g. Pengembangan dan pemeliharaan *server database*, *server aplikasi*, *server backup*, pemeliharaan jaringan LAN, dan internet;
 - h. Pengembangan sistem *Disaster Recovery Planning* dan *Disaster Recovery Center*;
 - i. Peningkatan pengelolaan penyajian data Perseroan.

RENCANA KERJA KEUANGAN DAN INVESTASI

1. Optimalisasi pendapatan investasi.
2. Pengkinian regulasi internal terkait manajemen investasi sesuai dengan perundangan yang berlaku.



3. Meningkatkan volume trading obligasi/sukuk dengan tetap berpegang pada prinsip proporsionalitas dan kehati-hatian.
4. Monitoring dan evaluasi kinerja *counterparty*.
5. Mengganti aset properti investasi dengan aset investasi yang lebih menguntungkan.
6. Pengendalian likuiditas keuangan dan beban operasional.
7. Melakukan pembayaran secara terencana dan tepat waktu.
8. Menyampaikan laporan keuangan dan pajak secara tepat waktu.
9. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM.
10. Mengimplementasikan PSAK 71, 72, dan 73.

RENCANA KERJA SDM DAN UMUM

1. Merealisasikan *people development* dan *organizational development*.
2. Melaksanakan *Training Needs Analysis* (TNA).
3. Melaksanakan *Job Analysis* untuk menghasilkan *Jobdesc*, Kualifikasi dan Kompetensi tiap jabatan dan *Workload Analysis*.
4. Menyusun SOP tiap jabatan.
5. Pengkinian regulasi internal terkait SDM.
6. Membuat/mengembangkan Integrated *Human Resources Management System* (HRMS) & *Key Performance Indicators* (KPI).
7. Membangun Budaya Perusahaan.
8. Mengelola aset perusahaan berbasis IT.
9. Pemeliharaan Aset Perusahaan berdasarkan skala prioritas.
10. Melakukan belanja modal sesuai dengan timeline yang telah disusun.

RENCANA KERJA KEGIATAN LAINNYA

Rencana Kerja Manajemen Risiko

1. Membuat kajian dan kebijakan terkait dengan mitigasi risiko terhadap semua produk penjaminan yang akan dipasarkan oleh perusahaan, sehingga diharapkan semua bisnis terukur risikonya.
2. Membuat kajian atas rencana kerja sama dengan mitra baru, sehingga diharapkan kerja sama dimaksud saling menguntungkan kedua belah pihak, compliance terhadap regulasi, dan terukur risikonya..



3. Membuat kajian atas rencana investasi menggunakan instrumen non deposito, sehingga diharapkan investasi dimaksud akan menguntungkan, *compliance* terhadap regulasi, dan terukur risikonya.
4. Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan manajemen risiko, khususnya penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi (*Integrated Risk Management*) sesuai dengan SOP yang ditetapkan perusahaan.
5. Melakukan optimalisasi atas kebijakan regaransi atas produk yang dipasarkan oleh perusahaan.
6. Meningkatkan layanan kepada mitra regaransi dalam hal penyampaian laporan bordero (*spreading risk*) maksimal tanggal 10 setiap bulannya.

Rencana Kerja Klaim

1. Melakukan analisa klaim secara optimal sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Meningkatkan layanan kepada mitra dalam hal pembayaran klaim dan restitusi sesuai dengan SOP (sesuai SLA dengan mitra) secara tepat waktu dan tepat jumlah.
3. Meningkatkan sistem pengelolaan klaim yang terintegrasi sehingga dapat menyajikan laporan secara real time.

Rencana Kerja Pengendalian

1. Menyajikan laporan rasio klaim (*risk and loss profile*), outstanding kredit yang dijamin, pemenuhan nilai penjaminan produktif dan *Gearing Ratio* (GR) baik untuk kebutuhan laporan internal dan laporan kepada pihak eksternal (OJK, pemegang saham dan mitra) secara rutin.
2. Meningkatkan sistem pengelolaan manajemen risiko, klaim, dan subrogasi yang terintegrasi.

Tata Kelola Perusahaan





TATA KELOLA PERUSAHAAN

KOMITMEN PENERAPAN GCG

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran dan kesetaraan.

PT Jamkrida Jabar ("Perusahaan") memiliki komitmen kuat untuk mengimplementasikan GCG secara konsisten dan berkelanjutan di dalam Perusahaan. Implementasi GCG merupakan pondasi penting untuk menggapai visi Perusahaan yaitu "*menjadi Perusahaan Penjamin Kredit Terpercaya yang Berkontribusi pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah*".

TUJUAN PENERAPAN GCG

Tujuan PT Jamkrida Jabar mengimplementasikan GCG adalah:

1. Sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan pengawasan dan pemberian saran-saran kepada Direksi dalam pengelolaan Perusahaan.
2. Sebagai pedoman bagi Direksi agar dalam menjalankan kegiatan sehari-hari Perusahaan dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dengan memperhatikan anggaran dasar, etika bisnis, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Sebagai pedoman bagi jajaran manajemen dan karyawan PT Jamkrida Jabar dalam melaksanakan kegiatan maupun tugasnya sehari-hari sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

DASAR PENERAPAN GCG

Implementasi GCG di PT Jamkrida Jabar mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti:

1. Undang-undang Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin.

3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 54/SEOJK.05/2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin.
4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor: 105 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah Yang Baik Provinsi Jawa Barat.

STRUKTUR DAN MEKANISME GCG

Penerapan prinsip-prinsip GCG di PT Jamkrida Jabar bertujuan untuk menghasilkan *outcome* yang baik, efektif, dan efisien, serta menumbuhkan nilai bagi pemegang saham (*shareholders*) dan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Perseroan telah menanamkan dalam budaya serta perilaku bisnis Perseroan, hal ini tercermin pada kewajaran dalam bertransaksi usaha, keterbukaan, dan perilaku manajemen dalam menjalankan bisnis penjaminan.

Perseroan telah membangun landasan maupun kerangka acuan untuk menunjang GCG, hal ini tertuang dalam:

1. Visi dan Misi Perseroan yang memberikan arah dan strategi pengembangan usaha secara jelas.
2. Struktur organisasi yang menggambarkan garis pertanggungjawaban secara jelas menyangkut unsur utama pelaksanaan tata kelola perusahaan yang mencakup Dewan Komisaris, Komite Audit, Direksi, Satuan Pengawas Internal, Divisi Manajemen Risiko dan Klaim, serta Sekretaris Perusahaan.
3. Fungsi pengawasan Dewan Komisaris.

Penerapan GCG bagi Perseroan tidak hanya keharusan dalam rangka memenuhi regulasi tetapi merupakan elemen fundamental yang mengacu pada *international best practices* untuk keberlangsungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Penerapan GCG yang baik dan komprehensif di beberapa industri dan perusahaan terbukti telah memberikan kontribusi yang positif dalam peningkatan nilai perusahaan (*value creation*) dan telah memberikan manfaat nyata bagi masing-masing industri dan Perseroan, antara lain meningkatnya daya saing dan kinerja perusahaan serta kepercayaan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik investor lokal maupun luar negeri.

Untuk mencapai hal tersebut, tentunya dibutuhkan komitmen bersama seluruh jajaran Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan pegawai Jamkrida Jabar untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan dalam menjalankan kegiatan bisnis penjaminan, yang

meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan.

Perusahaan percaya bahwa penerapan prinsip-prinsip dan praktik-praktik GCG yang konsisten akan memberikan manfaat, baik bagi Perusahaan maupun para Pemangku Kepentingan, yaitu dengan :

1. Meningkatkan kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan Perusahaan.
2. Meningkatkan kinerja Perusahaan, efisiensi, manajemen dan pelayanan kepada para Pemangku Kepentingan.
3. Melindungi Perusahaan dari intervensi eksternal dan tuntutan hukum
4. Menghindari terjadinya benturan kepentingan antara Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Pemegang Saham dengan Perusahaan.

PT Jamkrida Jabar menyadari pentingnya GCG dalam mendukung pertumbuhan usaha serta memberi nilai tambah bagi para Pemangku Kepentingan. Dalam mengimplementasikan GCG secara menyeluruh dan berkesinambungan, perusahaan berusaha menjalankan prinsip-prinsip dan praktik-praktik GCG berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT"), Perseroan Terbatas memiliki 3 (tiga) organ penting, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. RUPS juga merupakan wadah bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting terkait kelangsungan bisnis dan operasional Perusahaan. Keputusan yang diambil dalam RUPS didasari pada kepentingan perusahaan. Pemegang Saham tidak melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi untuk menjalankan hak sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Pengambilan keputusan RUPS dilakukan secara wajar dan transparan.

Sepanjang tahun 2021, Perseroan telah melaksanakan 1 kali Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), 2 kali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), dan 1 kali Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Buku 2020 diselenggarakan pada tanggal 28 Juni 2021 secara *hybrid* mengingat masih dalam masa pandemi Covid-19, yaitu bertempat di ruang rapat PT Jamkrida Jabar dan ruang virtual (*zoom meeting*) yang memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan Agenda Pertama

- a. Pemegang Saham menyetujui dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, Laporan Tahunan, dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 yang telah ditelaah oleh Komisaris Independen (Dewan Komisaris) dengan catatan sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat, antara lain agar segera menyelesaikan temuan-temuan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Otoritas Jasa Keuangan, serta menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pemegang Saham memberikan pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan sebagaimana tercantum dan disampaikan dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2020 dengan beberapa catatan sebagaimana tersebut di atas, selama dan sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan yang dilakukan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Keputusan Agenda Kedua

Pemegang Saham menyetujui dan mengesahkan usulan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020

3. Keputusan Agenda Ketiga

Pemegang Saham belum memutuskan usulan Perubahan Remunerasi Pengurus Perseroan karena memerlukan kajian lebih lanjut dan untuk hal tersebut akan dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa setelah Dewan Komisaris membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi.

4. Keputusan Agenda Keempat

Pemegang Saham menyetujui usulan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2021 dengan catatan sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.

Keputusan-keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 tersebut dituangkan dalam Akta No. 74 tanggal 28 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Rita Evryani, S.H.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Pertama diselenggarakan di Bandung, pada tanggal 25 November 2021 bertempat di Ruang Rapat Ballroom, Hotel Aryaduta Bandung, Jalan Sumatera No. 51 Kota Bandung, yang memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan RUPSLB

Pemegang Saham memutuskan untuk memberhentikan Teguh Budiman dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan. Adapun pemberian *acquit et de charge* mengikuti Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah bahwa pemberian *acquit et de charge* dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari Kantor Akuntan Publik dan disampaikan kepada RUPS Tahunan, selama dan sepanjang tindakan kepengurusan yang dilakukan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Keputusan Lainnya

Untuk mengisi kekosongan posisi Direktur Utama Perseroan, Pemegang Saham menunjuk Yanti Rachmawati selaku Direktur Utama yang berlaku efektif setelah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK.

Keputusan-keputusan dalam RUPSLB tersebut dituangkan dalam Akta No. 64 tanggal 25 November 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Mohamad Juania, S.H., M.Kn.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Kedua diselenggarakan pada tanggal 29 November 2021 bertempat di Ruang Rapat Ballroom, Hotel Mason Pine, Jalan Jalan Raya Parahyangan KM. 1.8 Kota Baru Parahyangan, Bandung, yang memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan Agenda Pertama

Pemegang Saham menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2022 dengan catatan dan masukan dari Pemegang Saham.

2. Keputusan Agenda Kedua

Pemegang Saham menyetujui dan mengesahkan penggunaan jasa Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan dan Akuntan Publik Aryo Wibisono untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.

3. Keputusan Agenda Ketiga

Pemegang Saham menyetujui dan mengesahkan perubahan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang mulai berlaku efektif untuk Tahun Buku 2022 dengan catatan pajak penghasilan akan ditanggung oleh masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris.

4. Keputusan Agenda Keempat

Pemegang Saham menyetujui pengangkatan Muhammad Taufiq Budi Santoso sebagai Komisaris Utama Perseroan dengan masa jabatan 4 (empat) tahun terhitung sejak dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK.

Keputusan-keputusan dalam RUPSLB Kedua tersebut dituangkan dalam akta No. 06 tanggal 29 November 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Yanti Yulianti, S.H., M.Kn.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA SIRKULER

RUPSLB Sirkuler Pertama

Berdasarkan Akta No. 45 tanggal 16 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Mohamad Juania, S.H., M.Kn. tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (Sirkuler) Perseroan sebagai berikut:

1. Pemegang Saham menyetujui pemberhentian Budi Setyono selaku Direktur Keuangan Perseroan dikarenakan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan pada tanggal 3 Januari 2021 sesuai dengan Keputusan RUPSLB Perseroan yang dituangkan dalam Akta No. 78 tanggal 26 November 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Mohamad Juania, S.H., M.Kn.
2. Atas pemberhentian tersebut, sesuai ketentuan Pasal 20 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, maka untuk selanjutnya susunan Direksi dan Komisaris dalam Perseroan adalah sebagai berikut:
 - Komisaris Independen : Dini Rosdini
 - Direktur : Teguh Budiman

RUPSLB Sirkuler Kedua

Berdasarkan Akta No. 74 tanggal 13 September 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Mohamad Juania, S.H., M.Kn. tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (Sirkuler) Perseroan sebagai berikut:

1. Pemegang Saham menyetujui pengangkatan Agus Subrata menjadi Direktur Operasional dan Yanti Rachmawati menjadi Direktur Keuangan dalam Perseroan dengan masa jabatan terhitung efektif sejak tanggal Akta RUPS ini sampai dengan tanggal 31 Agustus 2026 dan dapat diberhentikan sewaktu-waktu apabila ada kebijakan dari Pemegang Saham.
2. Atas pengangkatan tersebut, sesuai ketentuan Pasal 20 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, maka untuk selanjutnya susunan Direksi dan Komisaris dalam Perseroan adalah sebagai berikut:
 - Komisaris Independen : Dini Rosdini
 - Direktur Utama : Teguh Budiman
 - Direktur Operasional : Agus Subrata
 - Direktur Keuangan : Yanti Rachmawati

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Berdasarkan Akta No. 07 tanggal 21 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Yanti Yulianti, S.H., M.Kn. tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai berikut:

1. Pemegang Saham memutuskan dan menyetujui atas pengangkatan dan penetapan Muhammad Taufiq Budi Santoso selaku Komisaris Utama Perseroan dengan masa jabatan 4 (empat) tahun terhitung sejak dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
2. Sehingga selanjutnya susunan Pengurus Perseroan adalah menjadi sebagai berikut:
 - Komisaris Utama : Muhammad Taufiq Budi Santoso
 - Komisaris Independen : Dini Rosdini
 - Direktur Keuangan : Yanti Rachmawati
 - Direktur Operasional : Agus Subrata



PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif dalam mengelola perusahaan.

Seluruh anggota Direksi Perseroan telah memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Pengangkatan anggota Direksi dilakukan RUPS.
- b. Telah memenuhi ketentuan *fit & proper test* dari Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Perseroran Terbatas dan ketentuan GCG terkait dan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Pemegang Saham.
- c. Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
- d. Anggota Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
- e. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.
- f. Seluruh anggota Direksi merupakan Warga Negara Indonesia.
- g. Seluruh anggota Direksi memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di bidang operasional lembaga keuangan.

KOMPOSISI DIREKSI

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Lulus dan Nomor <i>Fit and Proper Test</i>	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan (tahun)	Kewarganegaraan	Domisili
1	Teguh Budiman	Direktur Utama	13-10-2020 Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No.: KEP-300/NB.11/2020	Akta No. 77 tanggal 26-11-2020 Masa Jabatan 4 tahun 26-11-2020 s.d. ditutupnya RUPS Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024	Indonesia	Indonesia

2	Yanti Rachmawati	Direktur Keuangan	08-07-2021 Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No.: KEP-442/NB.11/2021	Akta No. 74 tanggal 13-09-2021 Masa Jabatan 5 tahun s.d. 31-08-2026	Indonesia	Indonesia
3	Agus Subrata	Direktur Operasional	08-07-2021 Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No.: KEP-432/NB.11/2021	Akta No. 74 tanggal 13-09-2021 Masa Jabatan 5 tahun s.d. 31-08-2026	Indonesia	Indonesia

Selama tahun 2021, terdapat perubahan susunan Direksi yaitu sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Tanggal Pemberhentian oleh RUPS
1	Teguh Budiman	Direktur Utama	Akta No. 77 tanggal 26-11-2020	Akta No. 64 tanggal 25-11-2021*
2	Budi Setyono	Direktur Keuangan	Akta No. 01 tanggal 03-01-2017	Akta No. 45 tanggal 16 Februari 2021**

* Untuk mengisi kekosongan posisi Direktur Utama Perseroan, Para Pemegang Saham menunjuk Yanti Rachmawati selaku Direktur Utama yang berlaku efektif setelah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK.

** Yang bersangkutan telah berakhir masa jabatannya.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan. Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab demi untuk kepentingan Perseroan, mengelola bisnis dan urusan Perseroan dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan dengan aktivitas Perseroan. Direksi bertindak secara cermat, berhati-hati dan dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting yang relevan dalam pelaksanaan tugasnya. Direksi menggunakan wewenang yang dimiliki untuk kepentingan Perseroan semata.

Direksi mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Tugas pokok Direksi adalah :
 - a) Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan



- dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas Perseroan;
- b) Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
 - 2. Direksi bertanggungjawab penuh melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
 - 3. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - 4. Dalam melaksanakan tugasnya, perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus menginformasikan atau mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, yaitu:
 - a. Setiap perubahan penyertaan saham Perseroan pada perusahaan lain baik berupa pengalihan saham, pengurangan saham, maupun peningkatan saham. Direksi harus mendapatkan persetujuan Komisaris Utama dan salah satu anggota Komisaris. Atau apabila Komisaris Utama berhalangan, maka untuk tindakan tersebut Direksi harus mendapatkan persetujuan dari 2 (dua) orang anggota Komisaris Perseroan.
 - b. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan atau sama lain harus mendapatkan persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para Pemegang Saham yang memiliki sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
 - c. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan hutang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan di atas, wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.
 - 5. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama tersebut telah disetujui dalam Rapat Direksi. Jika Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - 6. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggungjawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam Surat Kuasa. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Frekuensi Rapat Direksi yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun

Sesuai POJK No.3/POJK.05/2017, tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin, pasal 17 bahwa "Direksi Lembaga Penjamin wajib menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan".

Selama tahun 2021, Direksi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 11 (sebelas) kali, dimana 3 (tiga) kali rapat diselenggarakan setelah bergabungnya Direktur Keuangan dan Direktur Operasional berdasarkan RUPS Sirkulir tanggal 13 September 2021, dengan 2 (dua) kali rapat diantaranya diselenggarakan setelah diberhentikannya Direktur Utama pada RUPS-LB tanggal 25 November 2021, dengan jumlah kehadiran sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media Elektronik	
1	Teguh Budiman	7	2	75%
2	Yanti Rachmawati	3	-	100%
3	Agus Subrata	3	-	100%

Selama tahun 2020, Direksi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 9 (sembilan) kali, dimana 2 (dua) kali rapat diselenggarakan setelah diberhentikannya Direktur Utama dan Direktur Operasional pada RUPS LB tanggal 28 Agustus 2020, serta 1 (satu) kali rapat setelah bergabungnya Direktur Utama yang baru, dengan jumlah kehadiran sebagai berikut :

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan arahan kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Seluruh anggota Dewan Komisaris PT Jamkrida Jabar telah memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan RUPS.
- Telah memenuhi ketentuan uji kelayakan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Perseroan Terbatas dan ketentuan GCG terkait, dan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.



- c. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
- d. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan oleh RUPS.
- e. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.
- f. Seluruh anggota Dewan Komisaris merupakan Warga Negara Indonesia.

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Lulus dan Nomor <i>Fit and Proper Test</i>	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan (tahun)	Kewarga-negaraan	Domisili
1	Muhammad Taufiq Budi Santoso	Komisaris Utama	03-12-2021 Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No.: KEP-801/NB.11/2021	Akta No. 07 Tanggal 21-12-2021 Masa Jabatan 4 Tahun	Indonesia	Indonesia
2	Dini Rosdini	Komisaris Independen	17-09-2019 Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No.: KEP-532/NB.11/2019	Akta No. 39 Tanggal 26-11-2019 Masa Jabatan 4 Tahun	Indonesia	Indonesia

Selama tahun 2021, terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris yaitu sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS
1	Muhammad Taufiq Budi Santoso	Komisaris Utama	Akta No. 07 Tanggal 21-12-2021

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas Dewan Komisaris adalah:

1. Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengelolaan Perseroan yang dilakukan Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk rencana pengembangan Perseroan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan, pelaksanaan ketentuan-

ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Melakukan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan RUPS dan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
3. Melaksanakan kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada RUPS.
4. Meneliti dan menelaah Laporan Triwulanan, Semesteran, dan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tersebut. Apabila Komisaris menolak untuk menandatangani laporan tersebut, maka penolakan beserta alasannya harus dinyatakan secara tertulis.
5. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan.
6. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan Perseroan.
7. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan.

Agar fungsi pengawasan dan fungsi pemberi nasihat sebagaimana dimaksud di atas dapat dilaksanakan dengan efektif, maka Dewan Komisaris bertugas pula:

1. Memberikan pendapat dan nasihat kepada manajemen tentang penentuan visi, misi, *culture* dan *value* dari Perseroan.
2. Melakukan kajian dan memberikan pendapat tentang strategi usaha yang perlu diterapkan oleh Perseroan.
3. Melakukan penilaian, memberikan pendapat serta nasihat sistem pengelolaan sumber daya manusia.
4. Melakukan penilaian, memberikan pendapat serta nasihat atas sistem pengendalian resiko.
5. Melakukan penilaian dan memberikan pendapat serta nasihat atas Rancangan *Business Plan* dan penjabarannya di dalam RKAP Tahunan.
6. Memberikan persetujuan atas keputusan-keputusan bisnis strategis yang menurut Peraturan Perundang-undangan dan keputusan RUPS harus disetujui oleh Dewan Komisaris.
7. Memberikan penilaian atas laporan auditor internal maupun eksternal dan memberikan nasihat kepada manajemen atas hal-hal yang perlu ditindaklanjuti.
8. Memberikan persetujuan atas RKAP yang diajukan oleh Direksi Perseroan setelah melakukan pemeriksaan dan pembicaraan dengan Direksi.
9. Melakukan pengawasan secara periodik atas pelaksanaan RKAP dan memberikan pendapat/persetujuan atas perubahan RKAP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Menyampaikan laporan pengawasan kepada Pemegang Saham.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas di antara masing-masing anggota Dewan Komisaris agar secara khusus melakukan pengawasan terhadap bidang-bidang tertentu, yang dituangkan baik dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris maupun dalam hasil keputusan Rapat Koordinasi Dewan Komisaris.

Frekuensi rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun

Sesuai POJK No.3/POJK.05/2017, tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin, pasal 31 bahwa "Dewan Komisaris Lembaga Penjamin wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan".

Selama tahun 2020, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat sebanyak 20 (dua puluh) kali, dimana 7 (tujuh) kali rapat diselenggarakan setelah diberhentikannya Komisaris Utama dan Komisaris pada RUPS LB tanggal 28 Agustus 2020, dengan jumlah kehadiran sebagai berikut:

Selama tahun 2021, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat sebanyak 19 (sembilan belas) kali, dimana tidak ada rapat yang diselenggarakan setelah bergabungnya Komisaris Utama berdasarkan hasil kelulusan *fit and proper test* OJK dan RUPS tanggal 21 Desember 2021, dengan jumlah kehadiran sebagai berikut :

No.	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media Elektronik	
1	Muhammad Taufiq Budi Santoso	0	0	0%
2	Dini Rosdini	10	9	100%

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dewan Pengawas Syariah merupakan badan independen yang direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan memegang peranan penting bagi Perseroan sebagai pengawas penerapan prinsip-prinsip syariah dalam setiap kegiatan operasional Unit Usaha Syariah.

KOMPOSISI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Lulus dan Nomor <i>Fit and Proper Test</i>	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan (tahun)	Kewarga-negaraan	Domisili
1	Zaini Abdul Malik	Ketua DPS	16-03-2015 Salinan Keputusan Dewan Komisioner OJK No.: KEP-488/NB.1/2015	Akta No. 38 tanggal 28-11-2014	Indonesia	Indonesia
2	Khuzin Abu Faqih	Anggota DPS	16-03-2015 Salinan Keputusan Dewan Komisioner OJK No.: KEP-489/NB.1/2015	Akta No. 38 tanggal 28-11-2014	Indonesia	Indonesia

Selama tahun 2021 tidak terdapat perubahan susunan DPS.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah:

1. Dewan Pengawas Syariah bertugas dan berwenang untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direksi, mengawasi aspek syariah kegiatan operasional Unit Usaha Syariah milik Perseroan, serta sebagai wakil Unit Usaha Syariah Perseroan pada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
2. Pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat serta saran yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud diatas dilakukan terhadap:
 - a. Kegiatan Penjaminan Syariah;
 - b. Akad Penjaminan Syariah yang dipasarkan oleh Unit Usaha Syariah milik Perseroan;
 - c. Praktik pemasaran Penjaminan Syariah yang dilakukan oleh Unit Usaha Syariah milik Perseroan.
3. Anggota Dewan Pengawas Syariah berhak memperoleh informasi dari Direksi mengenai Unit Usaha Syariah milik Perseroan secara lengkap dan tepat waktu.

Dalam hal Dewan Pengawas Syariah menilai terdapat kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang terkait dengan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah, Dewan pengawas Syariah wajib meminta penjelasan kepada anggota Direksi atas kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah.



Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun

Sesuai POJK No.3/POJK.05/2017, tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin, pasal 40 bahwa "DPS wajib menyelenggarakan rapat DPS paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun".

Selama tahun 2021 telah diselenggarakan rapat DPS sebanyak 4 (empat) kali, dengan jumlah kehadiran sebagai berikut :

No.	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media Elektronik	
1	Zaini Abdul Malik	4	-	100%
2	Khozin Abu Faqih	4	-	100%

KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE PERSEROAN DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Jamkrida Jabar Nomor: KEP-0008/DEKOM/JJ/VI/2021 Tentang Komite Perseroan Di Bawah Dewan Komisaris, Pasal 2 Komponen Komite Perseroan di Bawah Dewan Komisaris disebutkan bahwa:

Komite Perseroan di bawah Dewan Komisaris terdiri atas:

1. Komite Audit;
2. Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
3. Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Perusahaan.

1. Komite Audit

- a. PT Jamkrida Jabar sebagai Lembaga Penjamin yang memiliki wilayah operasional nasional wajib membentuk Komite Audit sebagaimana tercantum dalam POJK Nomor: 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin Pasal 29 ayat (1).
- b. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Jamkrida Jabar Nomor: KEP-0001/DEKOM/JJ/I/2020 tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Komite Audit, membentuk Komite Audit PT Jamkrida Jabar dan mengangkat:
 - 1) Dini Rosdini (Komisaris Independen) sebagai Ketua Komite Audit.

- 2) Prima Yusi Sari sebagai Anggota Komite Audit.
dengan masa jabatan masing-masing terhitung sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
Baik Ketua maupun Anggota Komite Audit memiliki keahlian di bidang akuntansi.

c. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi:

- 1) Membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan;
- 2) Memberikan usulan calon auditor eksternal kepada Dewan Komisaris untuk kemudian ditunjuk dan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan biaya jasa pelaksanaan audit;
- 3) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan;
- 4) Melakukan penelaahan atas ket�atan terhadap peraturan perundang-undangan;
- 5) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan auditor eksternal atas jasa yang diberikannya;
- 6) Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perusahaan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- 7) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan;
- 8) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan;
- 9) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

d. Frekuensi Rapat Komite Audit

No.	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media Elektronik	
1	Dini Rosdini	6	6	100%
2	Prima Yusi Sari	6	6	100%

e. Program Kerja Komite Audit dan Realisasinya

No.	Program Kerja	Realisasi
1	Review atas PKPT Satuan Pengawas Internal (SPI)	Terlaksana
2	Review atas Kinerja Keuangan	Terlaksana
3	Review atas Kinerja Pengawas Satuan Pengawas Internal (SPI)	Terlaksana
4	Program Kerja	Terlaksana
5	Monitoring Proses Audit Eksternal	Terlaksana
6	Pembahasan Hasil Audit KAP	Terlaksana
7	Koordinasi dengan Satuan Pengawas Internal (SPI)	Terlaksana
8	Monitoring unit kerja Perseroan	Terlaksana

PROFIL KOMITE AUDIT



DINI ROSDINI
Ketua Komite Audit

PROFIL

Profil dapat dilihat pada Bagian Dewan Komisaris



PRIMA YUSI SARI
Anggota Komite Audit

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR
Lahir di Palembang, 24 Agustus 1975.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- S2 Ilmu Manajemen di Universitas Indonesia tahun 2000.
- S1 Akuntansi di Universitas Padjadjaran tahun 1998.

RIWAYAT PENUNJUKAN

Diangkat dan ditetapkan sebagai Anggota Komite Audit PT Jamkrida Jabar sejak tanggal 06 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

RIWAYAT PEKERJAAN

- Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (1999-sekarang).
- Anggota Komite Audit PT Dirgantara Indonesia (Persero) (2013-2020).
- Anggota Komite Audit PT BUMN Hijau Lestari I (2015-2016).

2. Komite Nominasi dan Remunerasi

- a. Selain Komite Audit, Dewan Komisaris PT Jamkrida Jabar dapat membentuk komite lain guna menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
- b. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Jamkrida Jabar Nomor: KEP-0010/DEKOM/JJ/VIII/2021 tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Komite Nominasi dan

Remunerasi, membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi PT Jamkrida Jabar dan mengangkat:

- 1) Dini Rosdini (Komisaris Independen) sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.
- 2) Wa Ode Zusnita Muizu sebagai Anggota Independen Komite Nominasi dan Remunerasi.
- 3) Muji Rohmad sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

dengan masa jabatan masing-masing terhitung sejak tanggal 02 Agustus 2020 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki keahlian di bidang akuntansi.

Anggota Independen Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki keahlian di bidang ilmu manajemen.

c. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi:

- 1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, dan/atau DPS;
 - b) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi;
 - c) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, dan/atau DPS;
 - d) Struktur remunerasi;
 - e) Kebijakan atas remunerasi;
 - f) Besaran atas remunerasi.
- 2) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau DPS berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- 3) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian pencapaian target dan kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau DPS;
- 4) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau DPS;
- 5) Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau DPS untuk disampaikan kepada RUPS;

- 6) Melakukan evaluasi terhadap struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

d. Frekuensi Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

No.	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media Elektronik	
1	Dini Rosdini	-	2	67%
2	Wa Ode Zusnita Muizu	-	3	100%
3	Muji Rohmad	-	3	100%

e. Program Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi

No.	Program Kerja	Realisasi
1	Review Remunerasi Pengurus	Terlaksana
2	Review SOP	Terlaksana

PROFIL KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI



DINI ROSDINI
Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi

PROFIL

Profil dapat dilihat pada Bagian Dewan Komisaris



WA ODE ZUSNITA MUIZU

Anggota Komite Nominasi dan
Remunerasi

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR

Lahir di Kendari, 14 Oktober 1977.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- S3 Manajemen di Universitas Padjadjaran tahun 2008.
- S2 Manajemen di Universitas Padjadjaran tahun 2004.
- S1 Manajemen di Universitas Halu Oleo tahun 2000.

RIWAYAT PENUNJUKAN

Diangkat dan ditetapkan sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Jamkrida Jabar sejak tanggal 02 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

RIWAYAT PEKERJAAN

Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (s.d. sekarang).



MUJI ROHMAD
**Anggota Komite Nominasi dan
Remunerasi**

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR
Lahir di Bantul, 15 Agustus 1970.

RIWAYAT PENDIDIKAN
D4 Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi
Negara (STAN) tahun 1998.

RIWAYAT PENUNJUKAN

Diangkat dan ditetapkan sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Jamkrida Jabar sejak tanggal 02 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

RIWAYAT PEKERJAAN

- Kepala Divisi Keuangan dan Umum PT Jamkrida Jabar (2018-sekarang).
- Manajer Umum Keuangan PT Lintas Media Telekomunikasi (2014-2018).
- Kepala Divisi Keuangan, Akunting, & Perpajakan Bosowa Resources Group, PT Bosowa Resources, PT Bosowa Mining, PT Bosowa Pasir Bara (2010-2013).
- HMD Consulting (2010).
- Auditor pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan (2000-2009)

3. Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Perusahaan

Sampai dengan 31 Desember 2021, Dewan Komisaris PT Jamkrida Jabar belum membentuk Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Perusahaan.

4. Kewenangan Komite Perseroan Di Bawah Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Perseroan Di Bawah Dewan Komisaris mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses seluruh dokumen, pencatatan, dan informasi tentang pegawai, dana, asset, dan sumber daya Perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, DPS, Divisi yang mengelola Sumber Daya Manusia (SDM), pegawai dan pihak terkait lainnya.
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau DPS.
- d. Apabila diperlukan, Komite dapat melibatkan tenaga ahli dan/atau konsultan/pihak independen yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya, dengan mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.
- e. Apabila diperlukan, Komite dapat membentuk tim yang bersifat *ad-hoc* dengan kriteria dan periode pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis pekerjaannya.

KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE PERSEROAN DI BAWAH DIREKSI

Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: KEP-0024/DIR/JJ/XII/2017 tentang Komite Perseroan Di Bawah Direksi, Pasal 2 Komponen Komite Perseroan di Bawah Direksi disebutkan bahwa:

Komite Perseroan di bawah Direksi terdiri atas:

1. Komite Investasi;
 2. Komite Penjaminan;
 3. Komite Klaim; dan
 4. Komite Nominasi dan Remunerasi Karyawan.
1. **Komite Investasi** terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan 1 (satu) orang Ketua merangkap sebagai anggota, yang merupakan Direktur Keuangan, serta anggota lainnya yang dapat berasal dari:
 - a. Direktur Utama untuk nilai investasi lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - b. Kepala Divisi dan/atau Kepala Bagian yang membawahi fungsi Keuangan dan Umum; dan
 - c. Kepala Divisi dan/atau Kepala Bagian yang membawahi fungsi Manajemen Risiko.
 2. **Komite Penjaminan** terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan keanggotaan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi Nomor: KEP-0012/DIR/JJ/VII/2017 tentang Wewenang Memutuskan Penjaminan dan Menandatangani

Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) serta Sertifikat Penjaminan berikut perubahannya, serta Keputusan Direksi Nomor: KEP-0013/DIR/JJ/VII/2017 tentang Wewenang Memutuskan Kafalah dan Menandatangani Surat Persetujuan Prinsip Kafalah (SP2K) serta Sertifikat Kafalah berikut perubahannya.

3. **Komite Klaim** terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan anggota sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi Nomor: KEP-0006/DIR/JJ/II/2016 tentang Wewenang Memutuskan dan Menandatangani Keputusan Klaim Kredit, yaitu:
 - a. Bahwa permohonan klaim kredit untuk setiap Terjamin dengan jumlah pengajuan:
 - 1) Sampai dengan jumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk semua jenis kredit, termasuk kredit pola potong gaji, baik kredit pola potong gaji secara langsung maupun melalui Kopkar/Koppeg yang disalurkan oleh Penerima Jaminan (Bank maupun Non Bank).
 - 2) Sampai dengan jumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk kredit konstruksi/pengadaan barang.Komite Klaim diketuai oleh Kepala Divisi Manajemen Risiko & Klaim dengan beranggotakan Kepala Divisi Penjaminan dan Kepala Divisi Keuangan & Umum.
 - b. Bahwa permohonan klaim kredit untuk setiap Terjamin dengan jumlah pengajuan klaim sebagaimana disebutkan pada poin a sampai dengan jumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), maka Komite Klaim diketuai oleh Direktur Keuangan, dengan beranggotakan Direktur Operasional, Kepala Divisi Penjaminan, Kepala Divisi Keuangan & Umum, serta Kepala Divisi Manajemen Risiko & Klaim.
 - c. Bahwa Permohonan klaim kredit untuk setiap Terjamin dengan jumlah pengajuan klaim di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan masalah khusus lainnya yang memerlukan keputusan bersama Direksi, maka Komite Klaim diketuai oleh Direktur Utama, dengan beranggotakan Direksi secara lengkap, Kepala Divisi Penjaminan, Kepala Divisi Keuangan & Umum, serta kepala Divisi Manajemen Risiko & Klaim.
4. **Komite Nominasi dan Remunerasi Karyawan** terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan 1 (satu) orang Ketua merangkap sebagai anggota, yang merupakan Direktur Keuangan, serta anggota lainnya yang dapat berasal dari:
 - a. Direksi;
 - b. Kepala Divisi atau Kepala Bagian dan/atau Staf yang membawahi fungsi pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM);
 - c. Kepala Divisi atau Kepala Bagian yang mewakili setiap Divisi di Perusahaan.
5. Program kerja terkait tugas dan tanggung jawab Komite di bawah Direksi

Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: KEP-0024/DIR/JJ/XII/2017 tentang Komite Perseroan di bawah Direksi, tugas dan tanggung jawab komite lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Tugas dan tanggung jawab Komite Investasi antara lain:
 - 1) Membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan investasi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan investasi yang telah ditetapkan;
 - 2) Menelaah dan memberikan saran kepada Direksi terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan;
 - 3) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.
- b. Tugas dan tanggung jawab Komite Penjaminan antara lain:
 - 1) Membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan operasional penjaminan, mengawasi dan melaksanakan kebijakan operasional penjaminan yang telah ditetapkan;
 - 2) Melakukan Analisa kelayakan dan manajemen risiko dari setiap pengajuan permohonan penjaminan;
 - 3) Memberikan keputusan penjaminan;
 - 4) Menandatangani SP3 dan SP atas nama Terjamin/Debitur;
 - 5) Menelaah dan memberikan saran kepada Direksi terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan;
 - 6) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.
- c. Tugas dan tanggung jawab Komite Klaim antara lain:
 - 1) Membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan klaim dan mengawasi pelaksanaan kebijakan klaim yang telah ditetapkan;
 - 2) Melakukan analisa kelayakan dan manajemen risiko dari setiap pengajuan permohonan klaim;
 - 3) Memberikan keputusan klaim;
 - 4) Menelaah dan memberikan saran kepada Direksi terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan;
 - 5) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.
- d. Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi Karyawan antara lain:
 - 1) Memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai:
 - a) Nominasi promosi, mutasi, demosi bagi Karyawan;
 - b) Struktur remunerasi untuk Karyawan yang meliputi gaji, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau *variable*;
 - c) Kebijakan atas remunerasi untuk Karyawan;



- d) Besaran atas remunerasi untuk Karyawan.
- 2) Membantu Direksi melakukan penilaian pencapaian target dan kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing Karyawan;
- 3) Melakukan evaluasi terhadap struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- 4) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDITOR INTERNAL, DAN AUDITOR EKSTERNAL

1. Fungsi kepatuhan

- a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan

Direktur Utama

- b. Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan

Sekretaris Perusahaan dan Satuan Pengawas Internal

- c. Pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

1) Sekretaris Perusahaan:

Tujuan Jabatan:

Melakukan penegakan kepatuhan terhadap regulasi otoritas industri serta ketentuan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Compliance Officer*).

Tugas dan Kewenangan:

- a) Mempublikasikan informasi terkini tentang Perseroan dalam berbagai media, baik cetak maupun elektronik
- b) Memfasilitasi pencatatan dan penyimpanan notulensi Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris.
- c) Menyelenggarakan Rapat Manajemen, Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris (Rapat Pengurus) dan Rapat Umum Pemegang Saham.
- d) Mengikuti perkembangan *core business* perseroan, terutama perubahan pada hukum dan peraturan

- e) Memberikan saran kepada Direksi tentang kepatuhan pada ketentuan regulasi yang berlaku.
- 2) Satuan Pengawas Internal (SPI)
- Tujuan Jabatan:
- Membantu Direksi merencanakan, mengelola, mengawasi dan mengendalikan kegiatan audit operasional dan keuangan serta kegiatan penyusunan SOP di Perusahaan dalam batasan standar perusahaan dan peraturan pemerintah yang berlaku dengan sasaran untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar dan/atau peraturan yang ada.
- Tugas dan Kewenangan:
- a) Merancang, mengusulkan, mengimplementasi serta mengevaluasi rencana program/kebijakan SPI dalam rangka mendukung tercapainya tujuan perusahaan
 - b) Merencanakan dan membuat program audit, menjadualkan implementasi audit dalam rangka memastikan kesesuaian dengan peraturan/prosedur/efisiensi/fungsi kontrol manajemen yang diharapkan
 - c) Mengawasi dan memantau kegiatan operasional, menganalisa, memeriksa, melaporkan serta memberi rekomendasi dalam rangka memastikan kesesuaian dengan prosedur dan meningkatkan efisiensi
 - d) Mengawasi dan memantau kegiatan keuangan, menganalisa, memeriksa, melaporkan serta memberi rekomendasi dalam rangka memastikan bahwa distribusi kas dan penggunaannya sesuai dengan prosedur serta efisien.
 - e) Mengadakan koordinasi dengan departemen terkait dalam melakukan penyusunan standar operasi dan prosedur (SOP); mengelola dan memonitor pelaksanaannya dalam rangka memastikan keberadaan dan kesesuaian pelaksanaannya
 - f) Melakukan control & monitoring atas pelaksanaan audit program serta melaporkan hasil temuan audit kepada manajemen dengan disertai rekomendasi perbaikannya.
 - g) Merumuskan, menyusun, mengusulkan, dan melaksanakan kebijakan, sistem dan prosedur, serta SOP Unit Kerja SPI
 - h) Melaksanakan dan mengawasi penerapan GCG di bidang tugasnya.
- d. Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan

Perusahaan memiliki tingkat kesehatan keuangan yang memadai, dengan parameter rasio likuiditas, *gearing ratio*, rasio rentabilitas dan penilaian sendiri (*self assessment*) tata kelola perusahaan yang baik, sebagaimana dinyatakan dalam tabel dibawah ini :

No.	Jenis Rasio	Tahun 2021
1.	LIKUIDITAS	
a.	<i>Current Ratio</i>	354,31%
2.	<i>GEARING RATIO</i>	
a.	<i>Gearing Ratio</i> Produktif	6,69 x
b.	<i>Total Gearing Ratio</i>	30,75 x
3.	RENTABILITAS	
a.	Rasio <i>Return on Asset (ROA)</i>	3,59%
b.	Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	93,89%
c.	Rasio Klaim terhadap Pendapatan Imbal Jasa	87,81%
4.	Penilaian Sendiri (<i>self assessment</i>) tata kelola perusahaan yang baik.	
	Hasil Penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) tata kelola perusahaan yang baik PT Jamkrida Jabar mendapatkan nilai 90,56 (sembilan puluh koma lima puluh enam) dengan predikat "Sangat Baik", sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 54/SEOJK.05/2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Lembaga Penjamin.	

- e. Kepemilikan unit kerja atau fungsi dalam menangani & menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen

No.	Penanggung Jawab	Pimpinan Unit Kerja/ Pelaksana Fungsi
1	Catur Priyo Widodo	Kadiv. Manajemen Risiko & Klaim
2	Pamungkas Hendro H.	Sekretaris Perusahaan
3	Irwan Budhi Setiawan	Kepala UUS

Sesuai dengan Keputusan Direksi PT Jamkrida Jabar Nomor KEPT-0006/DIRUT/VII/2017 tanggal 8 Agustus 2017, tentang Penugasan Pejabat Pelayanan Pengaduan.

2. Fungsi Auditor Internal (SPI)

Efektivitas dan cakupan pelaksanaan tugas auditor internal dalam menilai seluruh aspek dan unsur kegiatan.



- a. Ruang lingkup pekerjaan audit
 - 1) Memeriksa dan menilai untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal Perusahaan telah memadai, serta berfungsi secara efektif, efisien dan ekonomis dalam mencapai tujuan dan sasaran Perusahaan, menjamin kehandalan informasi keuangan dan informasi operasional serta menjaga dan melindungi aset Perusahaan.
 - 2) Melaksanakan audit operasional dan ketaatan atas kegiatan manajemen yang bertujuan untuk menilai efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan, kehandalan informasi dan pelaporan perusahaan, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
 - 3) Melaksanakan audit lanjutan (audit khusus) terhadap kasus yang memiliki indikasi terjadinya kecurangan (*fraud*).
 - 4) Melaksanakan audit kinerja atas perencanaan dan program kerja masing-masing unit kerja dan penilaian kesesuaianya dengan tujuan perusahaan serta penilaian terhadap manajemen risiko.
 - 5) Melaksanakan penugasan khusus/tambahan yang relevan dengan ruang lingkup tugas SPI.
 - 6) Ruang lingkup dan frekuensi audit yang dilakukan SPI tergantung pada situasi dan kondisi tertentu seperti hasil audit sebelumnya, materialitas tingkat risiko yang melingkupi suatu kegiatan, kecukupan pengendalian internal, dan ketersediaan sumber daya SPI.
- b. Struktur atau kedudukan satuan kerja audit internal
 - 1) SPI berkedudukan langsung di bawah Direktur Utama.
 - 2) SPI dipimpin oleh seorang Kepala SPI.
 - 3) Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- c. Independensi auditor internal
 - 1) SPI secara organisasi dan pribadi harus independen terhadap aktivitas yang sedang diaudit sehingga dapat memberikan pendapat dan rekomendasi yang tidak memihak dan berprasangka buruk dalam pelaksanaan dan pelaporan auditnya. Independen dapat dicapai melalui kedudukan dalam perusahaan dan obyektivitas auditor yaitu:
 - a) Kepala SPI harus ditempatkan pada posisi langsung di bawah Direktur Utama sehingga pelaksanaan audit internal mendapat dukungan sepenuhnya dari Direksi dan unit kerja perusahaan, tanpa campur tangan pihak manapun;

- b) SPI tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan operasional yang meliputi perencanaan, pengembangan, implementasi dan pelaporan unit kerja perusahaan untuk memastikan kredibilitas hasil pengawasannya.
 - c) SPI harus bebas dari intervensi pihak manapun dalam penetapan lingkup pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan, serta dalam pengkomunikasian hasil audit kepada pihak yang berwenang.
 - d) SPI dilarang mempunyai rasa ketakutan, loyalitas, serta ambisi yang dapat berpengaruh terhadap aktivitas yang sedang dilakukan, sehingga dapat mempengaruhi tanggung jawab penugasannya.
- 2) SPI dikatakan bertindak obyektif bila bersikap independen dan tidak bias, serta menghindari kemungkinan timbulnya benturan kepentingan.
- a) SPI harus memiliki sikap mental yang obyektif, independen dan menghindari kemungkinan benturan kepentingan dalam melakukan tugas pengawasan.
 - b) SPI harus yakin dapat mengambil keputusan profesionalnya secara bebas, hasil kerjanya handal, dapat dipercaya dan bebas dari pengaruh pihak luar sehingga dapat menghasilkan laporan yang obyektif serta dapat dipakai semua pihak terkait
- 3) SPI harus menjaga integritas melalui:
- a) SPI dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun dari pegawai, klien ataupun mitra perusahaan sehingga dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya.
 - b) SPI harus menunjukkan sikap mental yang jujur dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawabnya.
 - c) SPI tidak boleh secara sadar terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat merusak citra.
- d. Uraian tugas satuan kerja audit internal
- Dalam melaksanakan tugasnya, SPI memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:
- 1) Membantu Direksi dalam memenuhi tanggung-jawab pengelolaan perseroan, dengan cara audit atas ketaatan, operasional, dan kinerja seluruh kegiatan unit kerja perusahaan secara terpadu atas ketaatan, kelengkapan dan penggunaan dari pengendalian akuntansi, keuangan dan pengendalian lainnya serta memberikan saran-saran perbaikan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada masing-masing unit kerja dan perusahaan.
 - 2) Membantu Direksi dalam upaya meningkatkan terwujudnya GCG, mendorong efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan, peningkatan pengelolaan risiko dan kinerja perusahaan serta penerapan etika bisnis;
 - 3) Membantu Direksi untuk memberikan perhatian atas terjadinya perubahan lingkungan industri, risiko bisnis yang mungkin timbul, peluang upaya

peningkatan efisiensi dan efektivitas dan hal-hal lain yang mempengaruhi kinerja perusahaan;

- 4) Mendorong unit-unit kerja di lingkungan Perusahaan dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal dan pencapaian target kinerja unit kerja dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran Perusahaan;
- 5) Memberikan penilaian tentang kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan dan pengelolaan risiko atas kegiatan perusahaan;
- 6) Melaporkan hal-hal yang penting yang berkaitan dengan kelemahan dan peluang perbaikan proses pengendalian keuangan dan operasional kegiatan perusahaan;
- 7) Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan diaudit, mengevaluasi serta menilai tingkat risiko kegiatan-kegiatan tersebut dalam kaitannya dengan perencanaan audit;
- 8) Memberikan laporan berkala atas hasil-hasil pelaksanaan audit semester, tahunan, dan audit lanjutan (audit khusus) serta kecukupan sumber daya audit;
- 9) Memberikan rekomendasi perbaikan atas proses bisnis dan pengendalian internal perusahaan;
- 10) Memantau pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas Laporan Hasil Audit (LHA).

e. Profil Kepala Satuan Kerja Audit Internal/SPI

Belum Ada

Rencananya pada tahun 2022 posisi Kepala SPI akan diisi.

f. Jumlah pegawai pada Satuan Kerja Audit Internal/SPI

Jumlah pegawai yang berada dibawah Unit Kerja SPI PT Jamkrida Jabar saat ini, hanya 1 (satu) orang staf.

g. Laporan hasil pelaksanaan tugas audit internal

Laporan hasil pelaksanaan audit internal disampaikan langsung oleh internal audit kepada Direktur Utama.

Laporan tersebut berisi rekomendasi dan tindakan perbaikan, serta tanggapan dari sektor terkait.

3. Fungsi auditor eksternal

Efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan kepatuhan Lembaga Penjamin terhadap ketentuan, antara lain mengenai penyediaan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal, sehingga memungkinkan auditor eksternal

memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaatan, dan kesesuaian laporan keuangan Lembaga Penjamin dengan standar audit yang berlaku.

Pada saat pemeriksaan oleh Auditor Eksternal telah dilakukan komunikasi dan kerja sama yang baik antara Auditor Eksternal dan pihak Manajemen yang dilakukan secara intensif.

Direksi mendukung adanya temuan-temuan yang terkait dengan kebijakan akuntansi, interpretasi standar akuntansi yang berlaku, perkembangan peraturan OJK dan lain-lain.

Direksi juga memantau secara aktif tindak lanjut temuan pemeriksaan Auditor Eksternal tersebut sehingga diharapkan temuan serupa tidak terulang di masa mendatang.

Penerapan Fungsi Audit Eksternal telah berjalan dengan baik, yang dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Perseroan selalu menunjuk Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di OJK.
- b. Penunjukan AP dan KAP yang sama oleh Perseroan tidak lebih dari 5 (lima) tahun buku berturut-turut.
KAP yang melakukan audit laporan keuangan Perseroan selama 5 (lima) tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel dibawah.
- c. Penunjukan AP dan KAP telah memperoleh persetujuan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris.
- d. Penugasan pemeriksaan kepada AP telah memenuhi aspek-aspek:
 - 1) Kapasitas KAP yang ditunjuk;
 - 2) Legalitas perjanjian kerja;
 - 3) Ruang lingkup audit;
 - 4) Standar profesional akuntan publik; dan
 - 5) Komunikasi antara OJK dengan KAP yang ditunjuk.
- e. AP yang ditunjuk telah:
 - 1) Menyampaikan hasil audit dan *management letter* kepada Perseroan tepat waktu.
 - 2) Mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.

AP dan KAP yang melakukan audit laporan keuangan PT Jamkrida Jabar selama 5 (lima) tahun terakhir:

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan Publik dan Nomor Registrasi di OJK	Biaya Auditor Eksternal
2021	Hertanto, Grace, Karunawan (HGK)	Aryo Wibisono AP.1290	Rp150.000.000,00
2020	Hertanto, Grace, Karunawan (HGK)	Aryo Wibisono AP.1290	Rp150.000.000,00
2019	Bambang Sudaryono & Rekan	1. Drs. Bambang Sudaryono, Ak., MBA AP.0739 2. Drs. Sudarmadji Herry Sutrisno, Ak., MM., CPA AP.0411	Rp 82.500.000,00
2018	Bambang Sudaryono & Rekan	1. Drs. Bambang Sudaryono, Ak., MBA AP.0739 2. Drs. Sudarmadji Herry Sutrisno, Ak., MM., CPA AP.0411	Rp 82.500.000,00
2017	Husni, Mucharam & Rasidi (HMR)	Supandi	Rp 99.000.000,00

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
 - a. Direksi bertanggung jawab terhadap penerapan strategi dan kebijakan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan tata kelola teknologi informasi serta memberikan laporan kepada Dewan Komisaris.
 - b. Dewan Komisaris, mengawasi tingkat efektifitas dan pelaksanaan kebijakan secara keseluruhan.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penggunaan teknologi informasi

Kebijakan manajemen risiko, prosedur dan penggunaan teknologi informasi, mengharuskan perseroan patuh terhadap ketentuan dan regulasi yang telah ditetapkan.



3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko pemanfaatan teknologi informasi

Kebijakan ini menetapkan prinsip dan proses manajemen risiko yang dilaksanakan dengan tahapan: identifikasi risiko, penilaian risiko, penanganan risiko dan monitoring serta evaluasi.

4. Struktur organisasi sistem informasi

Organisasi Pengelolaan Sistem Manajemen Informasi PT Jamkrida Jabar terdiri atas:

- a. Staf Senior SMI sebagai penanggung jawab *hardware* dan jaringan.
- b. Staf SMI sebagai penanggung jawab *software*.

5. Sistem pengendalian internal atas penggunaan teknologi informasi

Sistem pengendalian internal atas penggunaan teknologi informasi mengacu kepada SOP Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen dan Pedoman *Disaster Recovery Plan* Perseroan.

6. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh

Kepatuhan terhadap kebijakan dan panduan risiko secara reguler dipantau oleh unit kerja yang bersangkutan.

PENERAPAN KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DPS, DAN KARYAWAN

1. Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

- a. Remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*), kompensasi berbasis saham, tantiem dan bentuk remunerasi lainnya.

Pada tahun 2021 Perusahaan memberikan remunerasi dalam bentuk non natura kepada Direksi, Dewan Komisaris dan DPS yaitu berupa gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan pajak, tunjangan cuti (khusus Direksi), tunjangan hari raya, insentif, serta tantiem yang berasal dari laba bersih Perseroan.



- b. Fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura yaitu penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya.

Pada tahun 2021 terdapat fasilitas lain bagi Direksi, Dewan Komisaris dan DPS, antara lain tunjangan Purna Jabatan (Direksi dan Komisaris), tunjangan transportasi (khusus Direksi), tunjangan komunikasi, asuransi kesehatan, dan mobil dinas (khusus Direksi).

2. Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun

- a. Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang ditetapkan RUPS

Pada tahun 2021, RUPS menetapkan kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun bagi Direksi, Dewan Komisaris dan DPS antara lain berupa gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan pajak, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, insentif, serta tantiem yang berasal dari laba bersih Perseroan.

- b. Remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota DPS dan jumlah seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain

3 Orang Direksi, 2 Orang Dewan Komisaris, dan 2 orang Dewan Pengawas Syariah

Jumlah yang diterima dalam satu tahun		Remunerasi*)	Fasilitas lain dalam bentuk natura**)
Direksi	Jumlah Direksi	3	3
	Nominal (Jutaan Rupiah)	1.762,6	188,8
Dewan Komisaris	Jumlah Dewan Komisaris	2	2
	Nominal (Jutaan Rupiah)	399,8	55,8
DPS	Jumlah DPS	2	2
	Nominal (Jutaan Rupiah)	118,1	21,4

Keterangan:

*) Termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*), kompensasi berbasis saham, tantiem, dan bentuk remunerasi lainnya dalam bentuk non natura

**) Perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dan sebagainya.

- c. Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) tahun secara tunai	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris	Jumlah DPS
Di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	0	0	0
Di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) s.d Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	1	0	0

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) tahun secara tunai	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris	Jumlah DPS
Di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s.d Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	0	0	0
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kebawah	2	2	2

Jumlah yang tercantum diambil dari total THP Bruto per Tahun Buku 2021

3. Rasio gaji tertinggi dan terendah

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai pada bulan terakhir tahun pelaporan.

Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan berikut:

- ratio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah;
- ratio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan terendah;
- ratio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah; dan
- ratio gaji anggota Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi.



Rasio gaji

- a) 5,94 : 1
- b) 1,16 : 1
- c) 1,16 : 1
- d) 2,25 : 1

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN PERUSAHAAN

Perseroan telah menyusun dan menyajikan laporan sesuai dengan ketentuan mengenai transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan dengan rincian sebagai berikut:

1. Perseroan telah menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.
2. Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dipublikasikan melalui [website www.jamkridjabar.co.id](http://www.jamkridjabar.co.id) dan media cetak.
3. Informasi mengenai produk-produk jasa penjaminan yang diterbitkan oleh perseroan tersedia pada *website*.

RENCANA STRATEGIS PERUSAHAAN

1. Rencana strategis jangka pendek periode 1 (satu) tahun.
 - a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan melalui tata kelola perusahaan berbasis risiko.
 - b. Memperkuat portofolio produk penjaminan eksisting dan baru.
 - c. Mendorong sinergi dengan BUMD lainnya yang berorientasi pada profitabilitas.
 - d. Memperkuat portofolio usaha dan investasi dengan meningkatkan hasil investasi.
 - e. Memperkuat dan mengembangkan jejaring kemitraan untuk penetrasi & perluasan pasar melalui investasi sebagai resiprokal.
 - f. Meningkatkan efektivitas dan standardisasi proses kerja serta efisiensi proses internal dalam layanan klaim.
 - g. Meningkatkan kompetensi dan produktivitas SDM.
 - h. Meningkatkan budaya sadar risiko dan penerapan *risk management* yang *prudent*.
 - i. Meningkatkan pendapatan, market share, dan profitability dengan mengedepankan *underwriting* yang *prudent*.
 - j. Meningkatkan penerimaan piutang reasuransi.
 - k. Meningkatkan penerimaan piutang subrogasi.



- I. Mengembangkan aplikasi teknologi informasi.
- m. Mengusulkan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Jamkrida Jabar.
2. Rencana strategis jangka menengah periode 3 (tiga) tahun.
 - a. Memperluas jaringan pemasaran melalui penambahan kantor pemasaran/unit pelayanan di beberapa kabupaten/kota.
 - b. Mengintegrasikan infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi secara terpadu.
 - c. Mendorong pemenuhan modal dasar Perseroan senilai Rp300 miliar.
 - d. Mengusulkan perubahan status badan hukum dari Perseroan Terbatas menjadi Perseroda dan peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp300 miliar menjadi Rp1 triliun (proyeksi) melalui mekanisme perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat.
3. Rencana strategis jangka panjang periode 5 (lima) tahun.
 - a. Mendorong pemenuhan modal dasar Perseroan senilai Rp1 triliun (proyeksi).
 - b. Memperluas layanan dan jangkauan pemasaran pada perbankan BUKU 3 dan 4.
 - c. Memperkuat dan memperluas jaringan pemasaran melalui pembukaan kantor perwakilan.
 - d. Melakukan *spin off* Unit Usaha Syariah.
4. Rencana Kerja & Anggaran Tahunan
 - a. Proyeksi Volume Penjaminan tahun 2022 adalah senilai Rp8,96 triliun atau naik sebesar 37% jika dibandingkan dengan Prognosa 2021 senilai Rp6,55 triliun.
 - b. Proyeksi pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) *cash basis* tahun 2022 adalah senilai Rp238,83 miliar atau naik sebesar 39% jika dibandingkan dengan Prognosa 2021 senilai Rp171,49 miliar.
 - c. Proyeksi Total Aset tahun 2022 adalah senilai Rp411,62 miliar atau naik sebesar 13% jika dibandingkan dengan Prognosa 2021 senilai Rp376,14 miliar.
 - d. Proyeksi Total Ekuitas tahun 2022 adalah senilai Rp202,06 miliar atau naik sebesar 38% jika dibandingkan dengan Prognosa 2021 senilai Rp66,99 miliar.
 - e. Proyeksi Total Liabilitas Jangka Pendek tahun 2022 adalah senilai Rp72,61 miliar atau naik sebesar 3% jika dibandingkan dengan Prognosa 2021 senilai Rp199,62 miliar.
 - f. Proyeksi Total Liabilitas Jangka Panjang tahun 2022 adalah senilai Rp136,95 miliar atau naik sebesar 19% jika dibandingkan dengan Prognosa 2021 senilai Rp109,54 miliar.
 - g. Proyeksi Laba Tahun Berjalan tahun 2022 adalah senilai Rp7,13 miliar atau tumbuh sebesar 14% jika dibandingkan dengan Prognosa 2021 senilai Rp6,24 miliar.

- h. Proyeksi IJP Accrual Basis tahun 2022 adalah senilai Rp208,29 miliar atau tumbuh sebesar 41% dibandingkan Prognosa 2021 senilai Rp148,06 miliar. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan target Volume Penjaminan dan IJP Cash Basis pada 2022.
- i. Proyeksi Management Fee tahun 2022 adalah senilai Rp16,55 miliar atau tumbuh sebesar 84% dibandingkan Prognosa 2021 senilai Rp8,99 miliar.
- j. Proyeksi Biaya Akuisisi tahun 2022 adalah senilai Rp33,33 miliar atau tumbuh sebesar 41% dibandingkan Prognosa 2021 senilai Rp23,69 miliar.
- k. Proyeksi Pendapatan Investasi tahun 2022 adalah senilai Rp12,95 miliar atau tumbuh sebesar 1% dibandingkan Prognosa 2021 senilai Rp11,30 miliar, hal ini disebabkan oleh pertumbuhan dana kelolaan investasi yang rendah dan penurunan rata-rata suku bunga deposito.
- l. Proyeksi Pendapatan Subrogasi tahun 2022 adalah senilai Rp2,79 miliar atau tumbuh sebesar 21% dibandingkan Prognosa 2021 senilai Rp2,29 miliar.
- m. Proyeksi Beban Klaim tahun 2022 adalah senilai Rp66,38 miliar atau tumbuh sebesar 21% dibandingkan Prognosa 2021 senilai Rp54,93 miliar, hal ini disebabkan oleh peningkatan Outstanding Volume Penjaminan dan proyeksi dihitung berdasarkan trend klaim tahun-tahun sebelumnya.
- n. Proyeksi Beban Operasional tahun 2022 adalah senilai Rp3,69 miliar atau tumbuh sebesar 35% dibandingkan Prognosa 2021 senilai Rp2,73 miliar seiring dengan target pengembangan dan peningkatan pasar penjaminan, peningkatan target penerimaan subrogasi, dan verifikasi lapangan atas pengajuan klaim.
- o. Proyeksi Beban Regaransi tahun 2022 adalah senilai Rp102,24 miliar atau tumbuh sebesar 49% dibandingkan Prognosa 2021 senilai Rp68,78 miliar, hal ini sejalan dengan proyeksi peningkatan IJP Cash Basis.
- p. Proyeksi Beban SDM tahun 2022 adalah senilai Rp19,68 miliar atau tumbuh sebesar 55% dibandingkan Prognosa 2021 senilai Rp12,66 miliar.
- q. Proyeksi Beban Administrasi dan Umum tahun 2022 adalah senilai Rp7,34 miliar atau tumbuh sebesar 47% dibandingkan Prognosa 2021 senilai Rp5,00 miliar.

PENGUNGKAPAN KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG MENCAPAI 5% (LIMA PER SERATUS) ATAU LEBIH, YANG MELIPUTI JENIS DAN JUMLAH LEMBAR SAHAM

No.	Nama	Kategori Kepemilikan Saham *)	Jumlah Nominal Kepemilikan Saham	Persentase Kepemilikan Saham
1	Tidak Ada	A	Nihil	Nihil
		B	Nihil	Nihil
		C	Nihil	Nihil
		D	Nihil	Nihil

Keterangan:

- A. Lembaga Penjamin yang bersangkutan;
- B. Lembaga Penjamin lain;
- C. Perusahaan jasa keuangan selain Lembaga Penjamin; dan
- D. Perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.

PENGUNGKAPAN HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN ANGGOTA DPS DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DPS LAIN, DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PT JAMKRIDA JABAR

- Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham PT Jamkrida Jabar

No.	Nama	Hubungan dengan	Bentuk Hubungan				Keterangan	
			Keuangan		Keluarga			
			Ya	Tidak	Ya	Tidak		
1	Teguh Budiman	Direksi lainnya		✓		✓		
		Dewan Komisaris		✓		✓		
		DPS		✓		✓		
		Pemegang saham		✓		✓		

2	Yanti Rachmawati	Direksi lainnya		✓		✓	
		Dewan Komisaris		✓		✓	
		DPS		✓		✓	
		Pemegang saham		✓		✓	
3	Agus Subrata	Direksi lainnya		✓		✓	
		Dewan Komisaris		✓		✓	
		DPS		✓		✓	
		Pemegang saham		✓		✓	

2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS, dan/atau pemegang saham PT Jamkrida Jabar

No.	Nama	Hubungan dengan	Bentuk Hubungan				Keterangan	
			Keuangan		Keluarga			
			Ya	Tidak	Ya	Tidak		
1	Muhammad Taufiq Budi Santoso	Direksi		✓		✓		
		Dewan Komisaris lainnya		✓		✓		
		DPS		✓		✓		
		Pemegang saham		✓		✓		
2	Dini Rosdini	Direksi		✓		✓		
		Dewan Komisaris lainnya		✓		✓		
		DPS		✓		✓		
		Pemegang saham		✓		✓		

3. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota DPS dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham PT Jamkrida Jabar

No.	Nama	Hubungan dengan	Bentuk Hubungan				Keterangan	
			Keuangan		Keluarga			
			Ya	Tidak	Ya	Tidak		
1	Zaini Abdul Malik	Direksi		✓		✓		
		Dewan Komisaris		✓		✓		
		DPS lainnya		✓		✓		
		Pemegang saham		✓		✓		



2	Khozin Abu Faqih	Direksi		✓		✓	
		Dewan Komisaris		✓		✓	
		DPS lainnya		✓		✓	
		Pemegang saham		✓		✓	

Keterangan:

Hubungan keuangan adalah apabila seseorang menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Lembaga Penjamin, Lembaga Penjamin yang pemegang saham pengendalinya adalah anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Lembaga Penjamin, dan/atau pemegang saham pengendali Lembaga Penjamin.

Hubungan keluarga adalah memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik hubungan vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi orang tua kandung/tiri/angkat, saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atauistrinya, anak kandung/tiri/angkat, kakak/nenek kandung/tiri/angkat, cucu kandung/tiri/angkat, saudara kandung/ tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya, mertua, besan, suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat, kakak atau nenek dari suami atau istri, suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat, dan saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya.

PENGUNGKAPAN HAL PENTING LAINNYA

1. Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal

Tidak Ada

2. Transaksi material dengan pihak terkait

Tidak Ada

3. Benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi

No.	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan*)
1	-	-	-	-	-

Keterangan:

*) Tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku

Selama tahun 2021, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan di Perseroan

4. Informasi material lain mengenai PT Jamkrida Jabar

Tidak ada

5. Pengunduran diri atau pemberhentian Komisaris Independen

Tidak ada

6. Sertifikasi

No.	Materi Sertifikasi	Tanggal	Penyelenggara
1	<i>E-Integrating Risk Management and Compliance</i>	23 Februari 2021	GRC Management
2	Pelatihan Sertifikasi Pengawas Syariah	01 September 2021	LSP MUI
3	<i>E-Learning dan Ujian RCC CRGP</i>	22 Oktober 2021	LSP MKS
4	<i>Master Class Program Series XXI</i>	02 - 03 Desember 2021	LSPMR

7. Tenaga kerja asing

Selama tahun 2021, Perseroan tidak menggunakan tenaga kerja asing.

No.	Nama	Jabatan	Nomor <i>Fit and Proper Test</i>	KITAS		IMTA	
				Izin Kerja	Masa Berlaku	No. Izin	Masa Berlaku
1	-	-	-	-	-	-	-

8. Jumlah penyimpangan internal (*internal fraud*)

Selama tahun 2021, tidak terdapat penyimpangan internal (*internal fraud*) yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap Perseroan.



Penyimpangan internal dalam 1 (satu) tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh		
	Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan Anggota DPS	Pegawai Tetap	Pegawai Tidak Tetap
Total penyimpangan	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaian	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-

9. Permasalahan hukum

Selama tahun 2021, Perseroan tidak memiliki permasalahan hukum baik perdata maupun pidana.

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap	Nihil	Nihil
a. b.		

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Dalam proses penyelesaian di pengadilan dan di lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk kasus perdata	Nihil	Nihil
a.		
b.		
Total	Nihil	Nihil

10. Etika bisnis Perusahaan

Etika bisnis yang dijadikan acuan bagi Perseroan dan seluruh karyawan termuat dalam Pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja (*Code of Conduct*) PT Jamkrida Jabar.

Laporan *Corporate Social Responsibility*





LAPORAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas lingkungan dan masyarakat.

Sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial Perseroan kepada lingkungan dan masyarakat, maka Perseroan secara rutin tiap tahunnya menyalurkan Dana CSR kepada sasaran yang tepat, baik itu kepada korban bencana alam, kepada yayasan yatim piatu, ataupun bantuan lainnya. Dana CSR diambil dari keuntungan Perseroan yang disisihkan setiap tahunnya.

Berikut ini adalah penyaluran dana CSR PT Jamkrida Jabar pada periode tahun 2021:

DAFTAR PENYALURAN DANA CSR PERIODE TAHUN 2021

No.	Nama Kegiatan	Tanggal Pencairan Dana	Besaran Dana (Rp)
1	Bantuan Dana Kegiatan Yayasan Insan Kamil Kalimasada	10-Feb-21	10.000.000
2	Bantuan Dana Kegiatan Bale Zakat dan Sodaqoh (Bazas)	31-Mar-21	2.500.000
3	Bantuan Dana Kegiatan Pengadaan Tempat Sampah kepada RW 11 Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buahbatu, Bandung	05-Apr-21	500.000
4	Bantuan Dana Kegiatan "Salimah Peduli, Bersama Dhuafa Menghadapi Wabah"	20-Apr-21	2.000.000
5	Bantuan Dana Kegiatan BUBO5 (Buka Bersama On The Screen ke-5)	20-Apr-21	10.000.000
6	Bantuan Dana Kegiatan Ramadhan Yayasan Andalusia Insani	29-Apr-21	2.000.000
7	Bantuan Dana Kegiatan "Terpesona Ramadhan" Lembaga Amil Zakat Indonesia Berbagi	04-Mei-21	2.500.000
8	Bantuan Dana Kegiatan Yayasan Daarul Qudwah Madani	04-Mei-21	2.000.000
9	Bantuan Dana Kegiatan Hari Raya Kepada RW 11 Kel. Sekejati, Bandung	10-Mei-21	1.000.000
10	Bantuan Dana Kegiatan Lailatul Coding Kadin Jabar	10-Mei-21	5.000.000
11	Bantuan Dana Kegiatan Yayasan Nafilatul Husna Attaullah	10-Mei-21	5.000.000
12	Bantuan Dana Kegiatan Yayasan AlHasan Ciputat Jayamukti	11-Mei-21	2.000.000
13	Bantuan Dana Kegiatan Jawa Barat Transparan	11-Mei-21	1.000.000
14	Bantuan Dana Kegiatan Pengadaan Tabung Baru Isi Oksigen dalam Rangka Penanganan Covid-19 di Jawa Barat	22-Jul-21	60.000.000
15	Bantuan Dana Kegiatan Vaksinasi Ganesha	20-Agu-21	25.000.000
16	Bantuan Dana Kegiatan JAPRI Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat	18-Okt-21	15.000.000



17	Bantuan Dana Kegiatan Maulid Nabi Madrasah Diniyah Takmiliyah Al-Masum	18-Okt-21	2.500.000
18	Bantuan Dana Kegiatan Pembangunan Mesjid Al-Aziiz, Sukamenak, Margahayu, Kab. Bandung	03-Nov-21	2.500.000
19	Bantuan Dana Kegiatan Rihlah Barhu Tasikmalaya - Lampung	03-Des-21	10.000.000
20	Bantuan Dana Kegiatan Dauroh Marhalah 3 Pengurus KAMMI Wilayah Jabar	15-Des-21	1.500.000
21	Bantuan Dana Bencana di Kab. Lumajang, Jawa Timur via Jabar Quick Response	21-Des-21	10.000.000
TOTAL			172.000.000

Adapun capaian Realisasi Dana CSR Tahun 2021 terhadap Anggaran Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No.	Realisasi Tahun 2020	Anggaran Tahun 2021*)	Realisasi Tahun 2021	Capaian 2021 vs Anggaran 2021	Growth Realisasi 2021 vs Realisasi 2020
1	Rp144.643.662	Rp298.797.242	Rp172.000.000	57,56%	18,91%

*) Anggaran CSR sebesar Rp298.797.242,- terdiri dari Anggaran CSR sesuai dengan Akta RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 No. 74 tanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp124.179.667,- sebagai bagian dari penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020 dan Anggaran CSR dalam RKAP 2021 sebesar Rp174.617.575,-

Laporan Audit





AUDIT REPORT 2021

LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
DISERTAI LAPORAN AUDIT INDEPENDENT



PT JAMKRIDA JABAR

LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2021

dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen

PT JAMKRIDA JABAR
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2021
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Halaman

Daftar Isi

Surat Pernyataan Direksi

Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan

Laporan Posisi Keuangan	1 - 2
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	3
Laporan Perubahan Ekuitas	4
Laporan Arus Kas	5
Catatan Atas Laporan Keuangan	6 - 41



**Surat Pernyataan Direksi
Tentang Tanggung Jawab
Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021
PT Jamkrida Jabar**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Yanti Rachmawati
Alamat kantor : Jalan Soekarno-Hatta No. 592 Buah batu Bandung, Jawa Barat 40286

Jabatan : Direktur Utama

Nama : Agus Subrata

Alamat kantor : Jalan Soekarno-Hatta No. 592 Buah batu Bandung, Jawa Barat 40286

Jabatan : Direktur Operasional

Menyatakan bahwa:

1. Saya bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Jamkrida Jabar ("Perusahaan") pada tanggal 31 Desember 2021 dan untuk periode 12 bulan yang berakhir pada tanggal tersebut;
 2. Laporan keuangan PT Jamkrida Jabar telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, dan;
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Jamkrida Jabar telah dimuat secara lengkap dan benar.
 - b. Laporan keuangan PT Jamkrida Jabar tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
 3. Saya bertanggungjawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Jamkrida Jabar.

3. Saya bertanggungjawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Jamkrida Jabar.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bandung, 14 April 2022

METERAI TEMPEL

6AJX781877589

Vanti Rachmawati
Direktur Utama

Agus Subrata
Direktur Operasional



Nomor : 00113/2.1000/AU.1/08/1290-2/1/IV/2022

Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Jamkrida Jabar

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Jamkrida Jabar ("Perusahaan") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.



Palma Tower, 18th Floor Lot F&G
Jl. RA Kartini II-S Kav. 06 TB Simatupang, Jakarta Selatan 12310
Phone : +6221-75930431, 75930432, 75930433 Fax : +6221-75930434
Email : info@hgkfirms.com Web : www.hgkfirms.com www.TIAGnet.com
NIUKAP : KEP-929/KM.1/2014 - S-30/MK.1/2015



Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Jamkrida Jabar tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

KAP Hertanto, Grace, Karunawan

Aryo Wibisono, S.E., CPA.
Nomor Izin Akuntan Publik No : AP.1290



Jakarta, 14 April 2022

PT JAMKRIDA JABAR
LAPORAN POSISI KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	4	156.208.333.827	187.692.641.037
Dikurangi: Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian		(4.405.112.016)	(13.497.571.767)
Surat Berharga	2d, 3a, 3b, 9	78.971.226.001	63.482.837.592
Dikurangi: Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian		(136.839.191)	(1.563.069.474)
Piutang Re/Cogaransi	2e, 5	63.283.024.935	8.784.558.543
Dikurangi: Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian		(4.560.598.252)	--
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	2d, 2j, 6	12.815.535.320	1.306.355.721
Dikurangi: Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian		(852.506.852)	--
Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka	2f, 8a	20.439.926.860	16.840.152.576
Piutang Lain-lain	7	152.336.038	79.179.963
Properti Investasi	10	<u>2.495.100.000</u>	<u>2.495.100.000</u>
Total Aset Lancar		<u>324.410.426.670</u>	<u>265.620.184.191</u>
ASET TIDAK LANCAR			
Beban Dibayar Dimuka	2f, 8b	65.501.955.501	56.017.394.440
Aset Tetap - Bersih	2g, 3b, 11	13.246.954.273	13.337.301.918
Aset Pajak Tangguhan	2o, 20d	10.534.785.140	12.325.176.578
Aset Lain-Lain	2i, 2k, 12	<u>229.610.850</u>	<u>152.516.054</u>
Total Aset Tidak Lancar		<u>89.513.305.764</u>	<u>81.832.388.990</u>
JUMLAH ASET		<u>413.923.732.434</u>	<u>347.452.573.181</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT JAMKRIDA JABAR
LAPORAN POSISI KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang Pajak	20, 21a	502.229.949	390.483.466
Utang Re/Cogaransi	13	43.040.330.699	6.553.051.703
Utang Klaim	14	—	1.914.592.578
Beban yang Masih Harus Dibayar	15	514.272.643	377.243.525
Penampungan Sementara	16	11.793.690.936	6.133.524.634
Utang Lancar Lainnya	17	244.746	5.245.250
Pendapatan Diterima Dimuka *)	18a	<u>35.709.287.859</u>	<u>31.265.555.018</u>
Total Liabilitas Jangka Pendek		<u>91.560.056.832</u>	<u>46.639.696.174</u>
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Pendapatan Diterima Dimuka *)	18b	98.071.338.960	91.801.662.454
Cadangan Klaim	2r, 19	18.908.364.728	6.482.596.741
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	2n, 20	<u>2.126.352.620</u>	<u>2.347.153.380</u>
Total Liabilitas Jangka Panjang		<u>119.106.056.308</u>	<u>100.631.412.575</u>
JUMLAH LIABILITAS		<u>210.666.113.140</u>	<u>147.271.108.749</u>
EKUITAS			
Modal	22	153.200.000.000	153.200.000.000
Modal dasar sebesar dari 30.000 lembar saham, modal ditempatkan dan disetor penuh per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebanyak 15.320 lembar saham dengan nilai nominal Rp 10.000.000 per lembar saham.			
Cadangan Umum	22	40.139.066.131	35.601.299.677
Saldo Laba	22	10.585.165.700	8.730.878.772
Selisih Nilai Wajar Surat Berharga	2d, 3a, 3b, 8	(569.214.323)	2.927.569.407
Selisih Pengukuran Kembali Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	2n, 20	<u>(97.398.214)</u>	<u>(278.283.424)</u>
JUMLAH EKUITAS		<u>203.257.619.294</u>	<u>200.181.464.432</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>413.923.732.434</u>	<u>347.452.573.181</u>

*) Reklasifikasi Akun, Lihat Catatan 31

Catatan atas laporan keuangan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT JAMKRIDA JABAR
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
PENDAPATAN PENJAMINAN			
Imbal Jasa Penjaminan / Kafalah	2p, 23	183.093.487.470	130.550.626.733
Beban Akuisiisi	2p, 23	(30.728.197.910)	(22.669.038.213)
Restitusi IJP	2p, 23	(3.202.339.341)	(2.467.490.149)
Manajemen Fee	2p, 23	17.534.896.772	7.397.624.253
Beban Regaransi *)	2p, 23	(90.364.193.737)	(57.600.884.828)
JUMLAH PENDAPATAN PENJAMINAN		76.333.653.254	55.210.837.796
BEBAN KLAIM			
Beban Klaim	2t, 25	(63.389.134.331)	(42.487.066.581)
Pemulihan (Pembentukan) Cadangan Klaim	2t, 25	(3.637.832.410)	2.725.385.218
JUMLAH BEBAN KLAIM		(67.026.966.741)	(39.761.681.363)
PENDAPATAN PENJAMINAN BERSIH		9.306.686.513	15.449.156.433
Pendapatan Investasi	2d, 2j, 24	14.965.350.435	17.265.452.830
Pendapatan Subrogasi	2r, 27	2.621.926.441	1.815.942.976
Pendapatan (Beban) Lain-lain	28	3.522.747.378	(13.257.261.723)
BEBAN USAHA			
Beban Operasional	26	(2.872.876.377)	(1.379.402.701)
Beban Sumber Daya Manusia	26	(10.514.469.094)	(11.817.030.102)
Beban Administrasi dan Umum	26	(5.301.953.833)	(3.883.745.395)
JUMLAH BEBAN USAHA		(18.689.299.304)	(17.080.178.198)
LABA SEBELUM PAJAK		11.727.411.463	4.193.112.318
BEBAN PAJAK PENGHASILAN			
Beban Pajak Kini	2o, 21b	--	--
Manfaat Pajak Tangguhan	2o, 21d	(1.142.245.763)	4.537.766.453
JUMLAH BEBAN PAJAK PENGHASILAN		(1.142.245.763)	4.537.766.453
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		10.585.165.700	8.730.878.772
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
POS-POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASIKAN KE LABA RUGI			
Pengukuran Kembali Kewajiban Imbalan Kerja		231.904.116	(89.438.531)
Pajak Tangguhan Terkait Pengukuran Kembali		(51.018.906)	22.359.633
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja			
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
POS-POS YANG AKAN DIREKLASIFIKASIKAN KE LABA RUGI			
Keuntungan (Kerugian) Aset Keuangan yang			
Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif		(2.899.656.960)	2.247.643.470
Pajak Tangguhan Terkait Pengukuran Keuntungan			
(Kerugian Aset Keuangan yang Diukur Pada Nilai Wajar			
Melalui Penghasilan Komprehensif		(597.126.769)	494.481.563
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		(3.315.898.519)	2.675.046.135
LABA KOMPREHENSIF		7.269.267.181	11.405.924.906

*) Reklasifikasi Akun, Lihat Catatan 31

Catatan atas laporan keuangan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT JAMKRIDA JABAR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Modal Disetor	Cadangan Umum	Selisih Nilai Wajar Obligasi	Keuntungan (kerugian) imbalan pasti setelah aset pajak tangguhan	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas
Saldo Per 31 Desember 2019		153.200.000.000	4.094.651.887	87.155.374	(211.204.526)	3.907.910.588	161.078.513.323
Dampak penyesuaian transisi atas penerapan PSAK 71 dan 72	--	30.529.670.143	--	--	--	--	30.529.670.143
Saldo per 1 Januari 2020		153.200.000.000	34.624.322.030	87.155.374	(211.204.526)	3.907.910.588	191.088.183.466
Modal Disetor	21	--	--	--	--	--	--
Cadangan Umum	21	--	976.977.647	--	--	(976.977.647)	--
Pembagian Dividen	21	--	--	--	--	(1.996.942.310)	(1.996.942.310)
Bonus dan Tantiem	21	--	--	--	--	(855.832.418)	(855.832.418)
CSR	21	--	--	--	--	(78.158.213)	(78.158.213)
Laba Tahun Berjalan	--	--	--	--	--	8.730.878.772	8.730.878.772
Selisih Nilai Wajar Obligasi	2d, 3a, 3b, 8	--	--	2.840.414.033	--	--	2.840.414.033
Penghasilan komprehensif lain	--	--	--	--	--	--	--
imbalan kerja setelah aset pajak tangguhan	2n. 19	--	--	--	(67.078.898)	--	(67.078.898)
Saldo per 31 Desember 2020		153.200.000.000	35.601.299.677	2.927.569.407	(278.283.424)	8.730.878.772	200.181.464.432
Modal Disetor	21	--	--	--	--	--	--
Cadangan Umum	21	--	4.537.766.454	--	--	(4.537.766.454)	--
Pembagian Dividen	21	--	--	--	--	(2.812.946.319)	(2.812.946.319)
Bonus dan Tantiem	21	--	--	--	--	(1.205.548.422)	(1.205.548.422)
CSR	21	--	--	--	--	(174.617.577)	(174.617.577)
Laba Tahun Berjalan	--	--	--	--	--	10.585.165.700	10.585.165.700
Selisih Nilai Wajar Obligasi	2d, 3a, 3b, 8	--	--	(3.496.783.730)	--	--	(3.496.783.730)
Penghasilan komprehensif lain	--	--	--	--	--	--	--
imbalan kerja setelah aset pajak tangguhan	2n. 19	--	--	--	180.885.210	--	180.885.210
Saldo per 31 Desember 2021		153.200.000.000	40.139.068.131	(569.214.323)	(97.398.214)	10.585.165.700	203.257.619.294

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT JAMKRIDA JABAR
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan dari Penjaminan	181.151.829.558	83.622.695.642	
Pembayaran Klaim	(54.601.198.755)	(35.414.956.395)	
Pembayaran kepada Karyawan dan Pemasok	(139.175.644.222)	(36.827.696.993)	
Pembayaran Pajak	137.029.118	(738.614)	
Pendapatan Subrogasi	2.621.926.441	1.815.942.980	
Pendapatan lain-lain	(1.582.837.552)	3.348.844.798	
KAS BERSIH DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS OPERASI	(11.448.895.412)	16.544.091.418	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Penempatan Aset Keuangan	(18.388.045.369)	(11.973.659.457)	
Penerimaan Investasi	3.456.170.836	17.048.963.019	
Pengeluaran Untuk Pengadaan Aset Tetap	(833.330.151)	(2.758.285.575)	
Penerimaan atas Penjualan Aset Tetap	--	426.000.000	
Pelepasan (Pengadaan) Aset Lain lain	(77.094.796)	2.771.204	
KAS BERSIH DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS INVESTASI	(15.842.299.480)	2.745.789.191	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Pembagian Dividen	(2.812.946.319)	(1.996.942.310)	
Pembagian Bonus dan Tantiem	(1.205.548.422)	(855.832.418)	
CSR	(174.617.577)	(78.158.213)	
KAS BERSIH DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN	(4.193.112.318)	(2.930.932.941)	
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(31.484.307.210)	16.358.947.668	
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	187.692.641.037	171.333.693.369	
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	4	156.208.333.827	187.692.641.037
Kas dan Setara Kas terdiri atas :			
Kas	48.799.667	353.933.580	
Giro Bank	14.293.509.122	15.372.682.419	
Deposito	141.866.025.038	171.966.025.038	
Jumlah Kas dan Setara Kas	156.208.333.827	187.692.641.037	

Catatan atas laporan keuangan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian Perusahaan dan informasi umum

PT JAMKRIDA JABAR, selanjutnya disebut "Perusahaan", dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 9 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.01/2011, dan telah diakta berdasarkan akta No. 03 tanggal 03 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Yuliani Idawati, S.H.Sp.N. Notaris di Kota Bandung. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-56159.AH.01.01 tahun 2012.

Perusahaan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan Perusahaan dapat membuka cabang sebagaimana telah ditetapkan oleh direksi dengan persetujuan dewan komisaris.

Perusahaan mempunyai Unit Usaha Syariah pada tahun 2015. Unit Usaha Syariah dibentuk oleh Keputusan Direksi PT JAMKRIDA JABAR Nomor: Kep-0008/DIR/JJ/II/2014 tanggal 24 Maret 2014 tentang Panitia Pembentukan Unit Syariah dan telah mendapat izin dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dengan Nomor: SR-5/NB.223/2015 tanggal 10 Februari 2015 tentang Pemberian Izin Pembentukan Unit Usaha Syariah PT JAMKRIDA JABAR.

Perusahaan dalam menjalankan usahanya telah memperoleh izin-izin sebagai berikut:

- 1) Salinan Keputusan Dewan Komisioner No. Kep.05/D.05/2013 tanggal 3 Januari 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penjaminan Kredit Kepada PT JAMKRIDA JABAR.
- 2) Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 503/014/DP-SKJ/II/2015 tanggal 17 Februari 2015 dari Pemerintah Kota Bandung.
- 3) Nomor Izin Berusaha (NIB) 9120304971535 yang ditetapkan pada tanggal 13 September 2019.
- 4) Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) No. 101114618463 tanggal 12 September 2018 dari Pemerintah Kota Bandung.
- 5) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 31.625.184.2-422.000 dari Direktorat Jenderal Pajak Keuangan Republik Indonesia.

b. Usaha

Perusahaan bergerak dalam bidang penjamin pembiayaan kepada usaha mikro, kecil menengah dan koperasi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perusahaan dapat melaksanakan:

- Penjaminan kredit untuk penguatan modal bagi koperasi dan UMKM.
- Penjaminan pinjaman yang disalurkan koperasi pada anggotanya.
- Penjaminan penyaluran uang pinjaman dengan jaminan gadai dan fidusia.
- Penjaminan kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan BUMN dalam rangka Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.
- Penjaminan surat utang.
- Penjaminan transaksi dagang.
- Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (*surety bond*).
- Penjaminan bank garansi.
- Penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri.
- Penjaminan *letter of credit*.
- Penjaminan keabeanan.
- Jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha penjaminan.
- Penyediaan informasi terjamin terkait dengan kegiatan usaha penjaminan.
- Penjaminan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kafalah Pembiayaan Syariah adalah suatu kegiatan pelengkap bagi suatu pembiayaan dengan pola syariah, dengan demikian harus terdapat akad/perjanjian pembiayaan antara Terjamin (*Makfuul 'Anhu*) dan Penerima Jaminan (*Makfuul Lahu*). Namun demikian karena Kafalah Pembiayaan berfungsi sebagai substitusi agunan maka PT Jamkrida Jabar melalui penerbitan Surat Persetujuan Prinsip Kafalah dapat menjadi dasar ditandatangannya suatu perjanjian pembiayaan. Seluruh kegiatan Kafalah Pembiayaan mengacu pada fatwa DSN-MUI.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM (LANJUTAN)

c. Tempat Usaha

Perusahaan beroperasi di Jalan Soekarno-Hatta No. 592 Buah batu Bandung, Jawa Barat 40286. Tujuan pendirian PPKD (Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah) untuk meningkatkan penyaluran kredit produktif dan peningkatan LDR dari BPR, Bank Umum dan BPR yang terdapat di wilayah PPKD.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan kegiatan perekonomian daerah. Dari sisi sosial lingkungan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan.

d. Susunan Pengurus

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Jamkrida Jabar Nomor 38 tanggal 28 November 2014 dan Surat Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor : U-388/DSN-MUI/XI/2014 tanggal 27 November 2014 yang merekomendasikan dan menetapkan Zaini Abdul Malik, S. Ag., MA sebagai Ketua dan Khozin Abu Faqih, Lc sebagai Wakil Ketua.

Berdasarkan Akta Keputusan Pemegang Saham (Sirkuler) Nomor: 77 tanggal 26 November 2020, susunan pengurus PT Jamkrida Jabar pada 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Dewan Pengawas Syariah

Ketua	: Zaini Abdul Malik, S. Ag., MA
Anggota	: Khozin Abu Faqih, Lc.

Dewan Komisaris

Komisaris Independen	: Dini Rosdini
----------------------	----------------

Direksi

Direktur Utama	: Teguh Budiman
Direktur Keuangan	: Budi Setyono

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Jamkrida Jabar Nomor 38 tanggal 28 November 2014 dan Surat Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor : U-388/DSN-MUI/XI/2014 tanggal 27 November 2014 yang merekomendasikan dan menetapkan Zaini Abdul Malik, S. Ag., MA sebagai Ketua dan Khozin Abu Faqih, Lc sebagai Wakil Ketua.

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Pemegang Umum Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada tanggal 21 Desember 2021, susunan pengurus PT Jamkrida Jabar pada 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Dewan Pengawas Syariah

Ketua	: Zaini Abdul Malik, S. Ag., MA
Anggota	: Khozin Abu Faqih, Lc.

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Muhammad Taufiq Budi Santoso
Komisaris Independen	: Dini Rosdini

Direksi

Direktur Keuangan	: Yanti Rachmawati
Direktur Operasional	: Agus Subrata

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Sesuai Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 39 tanggal 26 November 2019, Pemegang Saham menyetujui dan mengesahkan untuk mengangkat serta menetapkan Ny. Dini Rosdini sebagai Komisaris Independen untuk periode 2019-2023.

Sesuai Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 74 tanggal 13 September 2021, Pemegang Saham menyetujui dan mengesahkan untuk mengangkat Tuan Agus Subrata dan Nyonya Yanti Rachmawati sebagai Direksi untuk periode 2021-2026.

Kebijakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan yang diterapkan oleh Perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi di Indonesia. Standar Akuntansi yang diterapkan secara konsisten dalam penyajian laporan keuangan adalah sebagai berikut:

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan PT JAMKRIDA JABAR disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Laporan keuangan disusun berdasarkan azas akrual dengan menggunakan konsep nilai perolehan, kecuali untuk akun-akun tertentu yang diukur dengan dasar sebagaimana dijelaskan di dalam kebijakan akuntansi terkait.

Laporan arus kas disajikan dengan menggunakan metode langsung, yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan menjadi aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp).

b. Penggunaan Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi

Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, manajemen Perusahaan menggunakan pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi kebijakan akuntansi, jumlah aset dan liabilitas serta pengungkapan aset dan liabilitas kontinjenji pada laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

Estimasi dan asumsi yang digunakan ditelaah secara berkesinambungan. Revisi atas estimasi akuntansi diakui pada periode dimana estimasi tersebut direvisi dan periode yang akan datang yang dipengaruhi oleh revisi estimasi tersebut.

c. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

Pada tanggal 1 Januari 2020, Perusahaan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") baru yang berlaku efektif sejak tanggal tersebut. Penyesuaian terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan telah dibuat berdasarkan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi. Penerapan PSAK baru yang signifikan adalah PSAK 71 "Instrumen Keuangan", PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan". Dampak dari penerapan PSAK baru tersebut dijelaskan di bawah ini.

PSAK 71 "Instrumen Keuangan"

PSAK 71 menggantikan ketentuan PSAK 55 yang terkait dengan pengakuan, klasifikasi dan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan, penghentian pengakuan instrumen keuangan, penurunan nilai aset keuangan dan akuntansi lindung nilai.

Perusahaan menerapkan model baru kerugian ekspektasian dengan perkiraan masa depan, menggunakan pendekatan yang disederhanakan untuk piutang usaha dan pendekatan umum untuk aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan lainnya.

Sesuai ketentuan transisi PSAK 71, Perusahaan telah memilih untuk tidak menyajikan kembali periode komparatif. Dampak kumulatif dari penerapan PSAK 71 pada tanggal 31 Desember 2019 akan diakui oleh Perusahaan sebagai penyesuaian saldo laba per 1 Januari 2020.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

c. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (Lanjutan)

PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"

Sesuai dengan ketentuan PSAK 72, Perusahaan telah menerapkan metode pengakuan pendapatan menggunakan penilaian yang dipersyaratkan dalam standar baru. Berdasarkan PSAK 72, pendapatan diakui ketika pengendalian atas barang atau jasa yang dijanjikan telah berpindah kepada pelanggan.

Sesuai ketentuan transisi PSAK 72, Perusahaan telah memilih untuk tidak menyajikan kembali periode komparatif. Dampak kumulatif dari penerapan PSAK 72 pada tanggal 31 Desember 2019 akan diakui oleh Perusahaan sebagai penyesuaian saldo laba per 1 Januari 2020.

PSAK dan ISAK Lainnya

Penerapan dari standar dan interpretasi baru berikut, tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak berdampak signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya:

- Amandemen PSAK No.1: Penyajian Laporan Keuangan.
- Amandemen PSAK No. 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan.
- Penyesuaian 2019 PSAK No. 1: Penyajian Laporan Keuangan.
- Revisi 2019 Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan.
- PSAK No. 73: Sewa.
- PSAK No. 15 (Amandemen 2017): Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama.

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

(i) Klasifikasi

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;
- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bungan (SPPI) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memenuhi kriteria SPPI.

Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Saat pengakuan awal Perusahaan dapat membuat penetapan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengukur aset yang memenuhi persyaratan untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada nilai wajar melalui laba rugi, apabila penerapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai "*accounting mismatch*".

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

(i) Klasifikasi (Lanjutan)

Penilaian Model Bisnis

Model bisnis ditentukan pada level yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Penilaian model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan, tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut:

- Bagaimana kinerja dari model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dievaluasi dan dilaporkan kepada personil manajemen kunci Perusahaan;
- Apakah risiko yang mempengaruhi kinerja dari model bisnis (termasuk aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis) dan khususnya bagaimana cara aset keuangan tersebut dikelola; dan
- Bagaimana penilaian kinerja pegelola aset keuangan (sebagai contoh, apakah penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual diperoleh).

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga

Untuk tujuan penilaian ini, pokok didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada saat pengakuan awal. Bunga didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan risiko kredit terkait jumlah pokok terutang pada periode waktu tertentu dan juga risiko dan biaya peminjaman standar, dan juga marjin laba.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan kontraktual, termasuk apakah aset keuangan mengandung persyaratan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual.

Dalam melakukan penilaian, Perusahaan mempertimbangkan:

- Peristiwa kontijensi yang akan mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual;
- Fitur *leverage*;
- Persyaratan pembayaran dimuka dan perpanjangan kontraktual;
- Persyaratan mengenai klaim yang terbatas atas arus kas yang berasal dari aset spesifik; dan
- Fitur yang dapat mengubah nilai waktu dari elemen uang.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan kedalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;
- Liabilitas keuangan lain. Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laba rugi saat pengakuan liabilitas.

(ii) Pengakuan awal

- a. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.
- b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah/dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

(ii) Pengakuan awal (Lanjutan)

Perusahaan, pada pengakuan awal, dapat menetapkan aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laba rugi (opsi nilai wajar). Opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketetapan sebagai berikut:

- Penetapan sebagai opsi nilai wajar mengurangi atau mengeliminasi ketidak-konsistensi pengukuran dan pengakuan (*accounting mismatch*) yang dapat timbul; atau
- Aset keuangan dan liabilitas keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen kunci berdasarkan nilai wajar; atau
- Aset keuangan dan liabilitas keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan, tetapi tidak dapat mengukur derivatif melekat secara terpisah.

(iii) Pengukuran setelah pengakuan awal

Kebijakan akuntansi berlaku sejak 1 Januari 2020

Aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur pada nilai wajarnya.

Aset keuangan kelompok biaya perolehan diamortisasi dan liabilitas keuangan lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(iv) Penghentian pengakuan

a. Aset keuangan dihentikan pengakuan jika:

- Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- Perusahaan telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga dibawah kesepakatan pelepasan, dan antara (a) Perusahaan telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Perusahaan tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mentransfer kendali atas aset.

Ketika Perusahaan telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah memasuki kesepakatan pelepasan dan tidak mentransfer serta tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan Perusahaan yang berkelanjutan atas aset tersebut.

Pinjaman yang diberikan dihapus bukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistik mengenai pengembalian pinjaman atau hubungan normal antara Grup dan debitur telah berakhir. Pinjaman yang tidak dapat dilunasi tersebut dihapus bukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai.

b. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuan jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

(v) Reklasifikasi aset keuangan

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020

Perusahaan mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat sebesar nilai wajarnya.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi direklasifikasi ke laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada wajar.

(vi) Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus buku dan nilainya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika Perusahaan memiliki hak yang berkekutan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Hal yang berkekutan hukum harus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan di dalam situasi bisnis yang normal, peristiwa kegagalan atau kebangkrutan dari entitas atas seluruh pihak lawan.

(vii) Pengukuran biaya diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh tempatnya, dan dikurangi penurunan nilai.

(viii) Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Jika tersedia, Perusahaan mengukur nilai wajar dari suatu instrumen dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen terkait. Suatu pasar dianggap aktif bila harga yang dikuotasi tersedia sewaktu-waktu dari bursa, pedagang efek (*dealer*), perantara efek (*broker*), kelompok industri, badan pengawas (*pricing service or regulatory agency*), dan merupakan transaksi pasar aktual dan teratur terjadi yang dilakukan secara wajar.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

(ix) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020

- Perusahaan mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasi pada instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
- Tidak ada penyisihan kerugian kredit ekspektasi pada investasi instrumen ekuitas.
- Perusahaan mengukur cadangan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasi sepanjang umurnya, kecuali untuk hal berikut, diukur sejumlah kerugian kredit ekspektasi 12 bulan.
- Instrumen utang yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan.
- Instrumen keuangan lainnya yang risiko kreditnya tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Perusahaan menganggap instrumen utang memiliki risiko kredit yang rendah ketika peringkat risiko kreditnya setara dengan definisi *investment grade* yang dipahami secara global.

Kerugian kredit ekspektasi 12 bulan adalah bagian dari kerugian kredit ekspektasi sepanjang umurnya yang merepresentasikan kerugian kredit ekspektasi yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengukuran kerugian kredit ekspektasi

Kerugian kredit ekspektasi adalah estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit yang diukur sebagai berikut:

- aset keuangan yang tidak memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasi diukur sebesar selisih antara nilai kini dari seluruh kekurangan kas (yaitu selisih antara arus kas yang terutang pada Perusahaan sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Perusahaan).
- aset keuangan yang memburuk pada tanggal pelaporan. Kerugian kredit ekspektasi diukur sebesar selisih antara jumlah tercatat bruto dan nilai kini arus kas masa depan yang diestimasi.
- kontrak jaminan keuangan, kerugian kredit ekspektasi diukur sebesar selisih antara pembayaran yang diperkirakan untuk mengganti pemegang atas kerugian kredit terjadi dikurangi jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan.

Aset keuangan yang memburuk

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan menilai apakah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan instrumen utang yang dicatat pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain mengalami penurunan nilai kredit (memburuk). Aset keuangan memburuk ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi.

Bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit (memburuk) termasuk data yang dapat diobservasi mengenai peristiwa berikut ini:

- pelanggaran kontrak, seperti peristiwa gagal bayar atau peristiwa tunggakan.
- hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.
- pembelian atau penerbitan aset keuangan dengan diskon sangat besar yang mencerminkan kerugian kredit yang terjadi.

Aset keuangan yang Dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk (*Purchased or originated credit impaired financial assets - POCI*)

Aset keuangan dikategorikan sebagai POCI apabila terdapat bukti objektif penurunan nilai pada saat pengakuan awal. Pada saat pengakuan awal, tidak ada penyisihan kerugian kredit yang diakui karena harga pembelian atau nilainya telah termasuk estimasi kerugian kredit sepanjang umurnya. Selanjutnya, perubahan kerugian kredit sepanjang umurnya, apakah positif atau negatif, diakui dalam laporan laba rugi sebagai bagian dari cadangan kerugian penurunan nilai.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

(ix) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (Lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020 (Lanjutan)

Aset keuangan yang memburuk (Lanjutan)

Penyajian penyisihan kerugian kredit ekspektasi dalam laporan posisi keuangan

Penyisihan kerugian kredit ekspektasi disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut:

- aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, penyisihan kerugian kredit ekspektasi disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto aset;
- komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, penyisihan kerugian ekspektasi disajikan sebagai provisi;
- instrumen utang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, penyisihan kerugian ekspektasi tidak diakui dalam laporan posisi keuangan karena jumlah tercatat dari aset-aset ini adalah nilai wajarnya. Namun demikian penyisihan kerugian kredit ekspektasi diungkapkan dan diakui dalam penghasilan komprehensif lain

e. Piutang Regaransi

Pembayaran klaim ke penerima jaminan yang menjadi tanggungan mitra *co-guarantee* dan mitra *re-guarantee* dicatat sebagai piutang dalam penyelesaian.

Pengakuan piutang dalam penyelesaian dilakukan setiap terjadi pembayaran klaim yang menjadi tanggungan mitra *co-guarantee* dan mitra *re-guarante*.

Piutang dalam penyelesaian diakui sebagai piutang *co-guarantee* pada saat mitra *co-guarantee* mengaksep atau mengakui piutang dalam penyelesaian tersebut sebagai utangnya (sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja sama antara Perusahaan dengan mitra *co-guarantee*), namun pembayaran belum dilakukan.

f. Beban Dibayar Dimuka

Beban dialokasikan sesuai dengan masa manfaat tiap-tiap biaya dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

Beban *co-guarantee*, beban *re-guarantee*, beban akuisisi dibayar di muka diamortisasi secara proporsional mengikuti pola pengakuan pendapatan Imbal Jasa Penjaminan/ Kafalah.

g. Aset Tetap

Perusahaan menerapkan PSAK No. 16 (Revisi 2011), "Aset Tetap". Revisi PSAK No. 16 ini mengatur akuntansi tanah dan mencabut PSAK No. 47, "Akuntansi Tanah". Penerapan SAK revisi ini tidak berdampak signifikan terhadap laporan keuangan.

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai (jika ada). Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi rutin yang signifikan dilakukan, yang merupakan suatu kondisi untuk menentukan kelangsungan operasional suatu jenis aset tetap, biaya atas masing-masing inspeksi signifikan tersebut diakui ke dalam jumlah tercatat ("carrying amount") aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

g. Aset Tetap (Lanjutan)

Aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus, berdasarkan taksiran masa manfaat laporan, sebagai berikut:

Bangunan Gedung	Masa Manfaat (tahun)
Bangunan Gedung	20-30
Instalasi	15
Inventaris Kantor	2-10
Kendaraan Bermotor	5

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuan pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuan.

Biaya pinjaman, termasuk rugi selisih kurs, yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau konstruksi aset tetap dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan tersebut. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat aset tersebut telah selesai dan siap untuk digunakan.

Tanah dinyatakan sebesar harga perolehan dan tidak diamortisasi karena manajemen berpendapat bahwa besar kemungkinan hak atas tanah tersebut dapat diperbarui/diperpanjang pada saat jatuh tempo.

Selanjutnya PSAK No. 48, "Penurunan Nilai Aset", mengharuskan nilai aset dikaji ulang atas kemungkinan penurunan pada nilai wajarnya yang disebabkan oleh peristiwa atau perubahan keadaan yang menyebabkan nilai tercatat aset mungkin tidak dapat dipulihkan.

Nilai residu aset adalah jumlah yang diperkirakan akan diperoleh entitas saat ini atau merupakan taksiran nilai atau potensi arus kas masuk apabila aset tersebut dijual pada saat penarikan/penghentian (*retirement*) aset.

Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan direview, dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

h. Aset Tidak Berwujud

Apabila nilai tercatat aset lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual neto dan nilai yang dipakai.

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya dihapuskan dari akun tersebut. Keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi. Apabila nilai tercatat aset lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual neto dan nilai yang dipakai.

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan jika nilai tercatat aset lebih besar dari estimasi jumlah yang dapat dipulihkan.

Pada setiap tanggal pelaporan Perusahaan melakukan rinvu periodik aset tetap untuk memastikan sisa masa manfaat, nilai residu, dan metode penyusutan masih sesuai dengan estimasi sebelumnya.

Pada setiap tanggal pelaporan Perusahaan melakukan penelaahan untuk memutuskan apakah terdapat indikasi penurunan nilai.

Aset tidak berwujud pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset tak berwujud terdiri dari harga beli, termasuk bea masuk dan pajak pembelian yang tidak dapat direstitusi, setelah dikurangi diskon dan rabat dan semua biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

h. Aset Tidak Berwujud (Lanjutan)

Setelah pengakuan awal, aset tidak berwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Perusahaan menilai apakah umur manfaat aset tidak berwujud terbatas atau tidak terbatas dan, jika terbatas, jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit serupa yang dihasilkan selama umur manfaat. Aset tidak berwujud dianggap oleh Perusahaan memiliki umur manfaat tidak terbatas jika, berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode aset diperkirakan menghasilkan arus kas neto untuk entitas.

Jumlah tersusutkan aset tidak berwujud dengan umur manfaat terbatas dialokasikan secara sistematis selama umur manfaatnya. Amortisasi dimulai ketika aset tersebut digunakan, yakni ketika aset berada pada lokasi dan dalam kondisi untuk beroperasi sesuai dengan cara yang dimaksudkan oleh manajemen. Amortisasi dihentikan pada tanggal yang lebih awal antara ketika aset tersebut dikelompokkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual (atau dimasukkan dalam kelompok aset lepasan yang diklasifikasikan dalam aset yang dimiliki untuk dijual). Metode amortisasi yang digunakan menggambarkan perkiraan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomi masa depan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, maka digunakan metode garis lurus.

1. Lisensi

Lisensi disajikan berdasarkan harga perolehan lisensi memiliki masa manfaat yang terbatas dan disajikan berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi.

Amortisasi dihitung dengan menggunakan metode garis lurus dan bertujuan untuk mengalokasikan harga perolehan lisensi selama estimasi masa manfaatnya (3-5 tahun).

2. Piranti Lunak Komputer

Lisensi piranti lunak komputer yang diperoleh dikapitalisasi sebesar biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan membuat piranti lunak tersebut siap untuk digunakan. Biaya ini diamortisasi selama estimasi masa manfaatnya (4 tahun). Amortisasi dihitung dengan menggunakan metode garis lurus dan bertujuan untuk mengalokasikan harga perolehan lisensi selama estimasi masa manfaatnya (4 tahun).

Biaya yang berhubungan dengan pengembangan atau pemeliharaan program piranti lunak komputer diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Biaya-biaya yang terkait langsung dengan produksi piranti lunak yang unik dan dapat diidentifikasi serta dikendalikan oleh Perusahaan dan kemungkinan besar akan memberikan manfaat ekonomi yang melebihi biayanya dalam jangka waktu lebih dari satu tahun, diakui sebagai aset tak berwujud. Biaya-biaya langsung ini meliputi, antara lain, biaya karyawan yang turut mengembangkan piranti lunak dan porsi biaya overhead yang terkait.

Biaya pengembangan piranti lunak komputer yang diakui sebagai aset dan diamortisasi menggunakan metode garis lurus selama estimasi masa manfaatnya (tidak lebih dari empat tahun).

Pada setiap tanggal pelaporan Perusahaan melakukan rinvu periodik atas aset tak-berwujud untuk memastikan periode amortisasi dan metode amortisasi masih sesuai dengan estimasi sebelumnya.

i. Penurunan Nilai Aset Non Keuangan

Nilai tercatat dari aset yang bukan aset keuangan milik Perusahaan, kecuali aset pajak tangguhan, ditelaah setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat indikasi penurunan nilai. Jika indikasi tersebut ada, maka nilai yang dapat dipulihkan dari aset tersebut akan diestimasi.

Nilai yang dapat diperoleh kembali dari suatu aset atau unit penghasil kas adalah sebesar jumlah yang lebih tinggi antara nilai pakainya dan nilai wajar aset atau unit penghasil kas dikurangi biaya untuk menjual. Dalam menilai nilai pakai, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai sekarang dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar saat ini terhadap nilai kas kini dan risiko spesifik terhadap aset tersebut.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

i. Penurunan Nilai Aset Non Keuangan (Lanjutan)

Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, aset yang tidak dapat diuji secara individual akan digabungkan dalam kelompok yang lebih kecil yang memberikan arus kas masuk dari penggunaan berkelanjutan yang sebagian besar independen terhadap arus kas masuk atas aset lainnya atau kelompok aset ("unit penghasil kas" atau "UPK").

Penyisihan penurunan nilai diakui jika nilai tercatat dari suatu aset atau UPK melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Penyisihan penurunan nilai diakui pada laporan laba rugi tahun berjalan.

Pemulihan rugi penurunan nilai, untuk aset non keuangan, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi.

j. Pendapatan Bunga/ Bagi Hasil

Pendapatan bunga diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tetap mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umum dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perusahaan mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

k. Aset Lain-Lain

Merupakan aset diluar *software* dengan kriteria aset ini dapat memberikan manfaat ekonomi masa datang, dan dapat memberikan nilai lebih bagi Perusahaan dan untuk mendapatkannya akibat dari transaksi atau kejadian.

l. Sewa

Biaya pinjaman, termasuk rugi selisih kurs, yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau konstruksi aset tetap dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan tersebut. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat aset tersebut telah selesai dan siap untuk digunakan.

Pada awal masa sewa, *lessee* mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan kewajiban dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Pembayaran sewa minimum dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan kewajiban. Beban keuangan dialokasikan ke setiap periode selama masa sewa. Aset sewaan yang dimiliki oleh *lessee* dengan dasar sewa pembiayaan disusutkan konsisten dengan metode yang sama yang digunakan untuk aset yang dimiliki sendiri, atau disusutkan secara penuh selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan umur manfaat aset sewaan, jika tidak ada kepastian yang memadai bahwa *lessee* kepemilikan pada akhir masa sewa.

Selisih lebih hasil penjualan dan nilai tercatat yang terjadi dari suatu transaksi jual dan sewa-balik ("sale-and-lease back") yang merupakan sewa pembiayaan ditangguhkan dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus ("straight-line method") selama sisa manfaat aset yang bersangkutan.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

m. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat ke dalam Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing disesuaikan ke dalam Rupiah untuk mencerminkan nilai kurs rata-rata antara kurs jual dan kurs beli yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia pada hari terakhir transaksi perbankan pada tahun tersebut. Laba atau rugi selisih kurs yang terjadi dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan.

n. Imbalan Kerja Karyawan

Perusahaan mengakui kewajiban kerja karyawan berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003 ("Undang-Undang") dan PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja".

Perusahaan menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja". Revisi SAK ini antara lain memperbolehkan entitas untuk menerapkan metode sistematis atas pengakuan yang lebih cepat dari keuntungan/kerugian aktuaria yang timbul dari imbalan pasti, antara lain pengakuan langsung keuntungan/kerugian yang terjadi pada tahun berjalan ke dalam pendapatan komprehensif lain.

Perusahaan memilih metode ini dalam pengakuan keuntungan/kerugian aktuaria, karenanya penerapan awal PSAK No. 24 (Revisi 2013) ini berdampak signifikan terhadap laporan keuangan Perusahaan.

Untuk program iuran pasti, kontribusi yang terutang diakui sebagai beban pada tahun berjalan.

Berdasarkan PSAK No. 24 (Revisi 2013), beban imbalan pasca kerja manfaat pasti ditentukan dengan metode penilaian aktuaris *Projected Unit Credit* dan keuntungan dan kerugian aktuaria diakui pada tahun dimana keuntungan dan kerugian terjadi dalam pendapatan komprehensif lain.

Biaya jasa lalu atas pengenalan program manfaat pasti atau perubahan utang imbalan dari program yang ada diamortisasi sepanjang tahun sampai imbalan tersebut menjadi hak atau *vested*.

Beban imbalan jangka panjang lainnya ditentukan dengan metode penilaian aktuaris *Projected Unit Credit* di mana keuntungan dan kerugian aktuaria dan biaya jasa lalu langsung diakui dalam tahun berjalan.

Keuntungan dan kerugian aktuarial diakui sebagai penghasilan atau beban apabila akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial neto yang belum diakui pada akhir tahun pelaporan sebelumnya melebihi jumlah yang lebih besar di antara 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal tersebut dan 10% dari nilai wajar aset program pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian ini diakui dengan metode garis lurus sepanjang rata-rata sisa masa kerja dari karyawan.

o. Pajak Penghasilan

Perusahaan menerapkan PSAK No. 46 (Revisi 2014), "Pajak Penghasilan" yang menetapkan perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan dalam memperhitungkan konsekuensi pajak kini dan mendatang dari pemulihan (penyelesaian) jumlah tercatat aset (liabilitas) masa depan yang diakui dalam laporan posisi keuangan dan transaksi dan kejadian lain dari tahun kini yang diakui dalam laporan keuangan. SAK revisi ini juga mensyaratkan entitas untuk mencatat kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan sebagai bagian dari "Beban Pajak Kini" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Perusahaan juga menyajikan bunga/denda, jika ada, sebagai bagian dari "Beban Pajak Kini". Penerapan awal SAK revisi ini tidak berdampak terhadap laporan keuangan Perusahaan.

Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak tahun berjalan. Aset dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer pada setiap tanggal laporan antara aset dan kewajiban untuk tujuan komersial aset dan kewajiban untuk tujuan perpajakan. Manfaat pajak masa yang akan datang, seperti rugi pajak yang dapat dikompensasi, juga diakui apabila besar kemungkinan manfaat tersebut dapat direalisasi.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

o. Pajak Penghasilan (Lanjutan)

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang akan berlaku pada saat aset dipulihkan atau kewajiban dilunasi, yaitu dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau yang secara substantif telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan.

Perubahan nilai tercatat aset dan kewajiban pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada operasi tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Perubahan atas kewajiban perpajakan dicatat ketika ketetapan pajak diterima atau jika keberatan diajukan oleh Perusahaan, ketika hasil dari keberatan tersebut telah ditentukan.

p. Imbal Jasa Penjaminan, Imbal Jasa Kafalah, *Fee Based Income* Bank Pelaksana, dan Beban Regaransi

Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP), Imbal Jasa Kafalah (IJK), *fee based income* bank pelaksana dan beban regaransi diakui sejak Sertifikat Penjaminan (SP) dan Sertifikat Kafalah (SK) diterbitkan.

Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan, Imbal Jasa Kafalah, *fee based income* bank pelaksana dan beban regaransi diakui selama jangka waktu penjaminan dan dialokasikan berdasarkan bulan terbitnya Sertifikat Penjaminan (SP) dan Sertifikat Kafalah (SK).

Batas waktu maksimal pengakuan Imbal Jasa Penjaminan (IJP), Imbal Jasa Kafalah (IJK), *fee based income* bank pelaksana dan beban regaransi adalah 4 tahun dan diakui ulang tahun. Mulai November 2016 pengakuan Imbal Jasa Penjaminan (IJP), Imbal Jasa Kafalah (IJK), *fee based income*, biaya komisi agen dan beban regaransi diakui sesuai jangka waktu kredit.

Pendapatan imbalan jasa penjaminan/kafalah disajikan secara bruto sebelum dikurangkan beban komisi agen, beban *co-guarantee* dan beban *re-guarantee*.

Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan Imbal Jasa Kafalah (IJK) yang sudah diterima namun belum diakui sebagai pendapatan disajikan sebagai pendapatan diterima dimuka. *Fee based income* bank pelaksana dan beban regaransi yang sudah dibayarkan namun belum diakui sebagai beban disajikan sebagai beban dibayar dimuka.

Sejak 1 Januari 2020, Perusahaan menerapkan PSAK No. 72 yang mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 langkah analisa sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
3. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan dijanjikan dalam kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Perusahaan membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak.
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah marjin.
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki pengendalian atas barang atau jasa tersebut).

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

p. **Imbal Jasa Penjaminan, Imbal Jasa Kafalah, *Fee Based Income* Bank Pelaksana, dan Beban Regaransi (Lanjutan)**

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan 2 cara, yaitu:

- a. Kewajiban pelaksanaan yang diselesaikan sepanjang waktu
Perusahaan mengalihkan pengendalian barang atau jasa sepanjang waktu, umumnya Perusahaan menyelesaikan kewajiban pelaksanaan dan mengakui pendapatan sepanjang waktu jika pelanggan secara simultan menerima dan mengonsumsi manfaat yang disediakan oleh kinerja Perusahaan saat Perusahaan melaksanaan kewajiban pelaksanaanya tersebut.
- b. Kewajiban pelaksanaan yang diselesaikan pada waktu tertentu
Jika kewajiban pelaksanaan tidak diselesaikan sepanjang waktu, maka Perusahaan menyelesaikan kewajiban pelaksanaan pada waktu tertentu. Untuk menentukan waktu tertentu dimana pelanggan memperoleh pengendalian atas aset yang dijanjikan dan Perusahaan menyelesaikan kewajiban pelaksanaan.

Besarnya tarif imbal jasa penjaminan ditentukan berdasarkan hasil dari identifikasi hak dan kewajiban pelaksanaan dalam kontrak, dalam perspektif bisnis penjaminan, hak dan kewajiban dimaksud merupakan risiko yang akan dan telah dialihkan sesuai dengan yang dinyatakan dalam kontrak. Kontrak dimaksud memiliki jangka waktu pelaksanaan, maka dari itu kewajiban pelaksanaan entitas diukur berdasarkan risiko yang akan dan telah dilepas sepanjang kontrak berlaku.

Pendapatan imbal jasa penjaminan diakui sejak bulan sertifikat penjaminan diterbitkan dan diamortisasi sesuai dengan besarnya risiko yang terealisasi sepanjang jangka waktu penjaminan.

Imbal jasa penjaminan atas resiko yang dialihkan ke penjamin ulang diakui sebagai beban premi penjaminan ulang yang diakui sesuai pola pengakuan imbal jasa penjaminan. Biaya-biaya atas perolehan kontrak diakui sebagai biaya inkremental, biaya tersebut secara eksplisit dibebankan kepada pelanggan, biaya tersebut diamortisir secara sistematisk sesuai pola pengakuan imbal jasa penjaminan. Penerimaan dari pelanggan atas resiko yang belum terealisasi diakui sebagai pendapatan ditangguhkan.

q. **Utang Klaim**

Utang klaim merupakan utang Perusahaan kepada bank pemberi pinjaman yang dijamin oleh Perusahaan. Utang klaim yang tercatat adalah utang yang telah diproses dan disetujui namun belum dibayar. Utang klaim dinyatakan sebesar prosentase penjaminan atas baki debit pinjaman yang macet.

r. **Cadangan Klaim**

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020

Estimasi atas klaim yang terjadi baik sudah dilaporkan maupun belum dilaporkan diakui sebagai cadangan klaim. Perusahaan telah membentuk cadangan klaim sesuai dengan PSAK 71 terkait kontrak jaminan. Cadangan klaim dihitung menggunakan basis *Estimated Credit Loss (ECL)* dengan memperhatikan faktor-faktor makro ekonomi terkait yang berhubungan dengan kemungkinan klaim terjadi.

Estimasi klaim atas risiko yang telah dialihkan ke penjaminan ulang diakui sebagai piutang penjamin ulang dan diukur secara sistematisk sesuai dengan pola pengukuran cadangan klaim yang didasari dari selisih antara total saldo penjaminan bruto dan total saldo penjaminan netto.

Perubahan jumlah utang klaim, sebagai akibat proses penelaahan lebih lanjut dan perbedaan antara jumlah utang klaim dengan klaim yang dibayarkan, diakui dalam laporan laba rugi pada tahun terjadinya perubahan.

Hak subrogasi atas klaim diakui sebagai pendapatan subrogasi pada saat hak subrogasi dapat direalisasi.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

s. Transaksi dengan Pihak-Pihak yang Berelasi

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 7, "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi".

- 1) Orang atau anggota keluarga terdekatnya berelasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama terhadap entitas pelapor,
 - ii. Memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor; atau
 - iii. Personal manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk pelapor.
- 2) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari Perusahaan yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain),
 - ii. Suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama bagi entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu Perusahaan, dimana entitas lain tersebut adalah anggotanya),
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama,
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga,
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari suatu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor,
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam butir (a),
 - vii. Orang yang diidentifikasi, dalam butir (a) (i) memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau anggota manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Seluruh transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan atau tidak dilakukan berdasarkan persyaratan dan kondisi yang sama dengan yang diberlakukan kepada pihak ketiga telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

t. Beban Klaim

Beban klaim setelah dikurangi bagian penjamin ulang, dicatat pada saat terjadinya kerugian. Beban klaim yang telah disetujui oleh komite klaim namun belum dilakukan pembayaran dicatat sebagai utang klaim.

u. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Perusahaan pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 pada laporan keuangan, manajemen harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut, berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajemen berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan dan asumsi signifikan yang dibuat oleh manajemen, yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (LANJUTAN)

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

a. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam PSAK No. 71. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

b. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Berlaku sejak 1 Januari 2020

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Perusahaan menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Perusahaan mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Perusahaan membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Perusahaan mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Perusahaan mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

c. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

a. Nilai Wajar Aset Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (LANJUTAN)

Estimasi dan Asumsi (Lanjutan)

b. Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap

Masa manfaat dari aset tetap Perusahaan diestimasi berdasarkan jangka waktu aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif berdasarkan bidang usaha yang sama, evaluasi teknis internal dan pengalaman dengan aset sejenis. Estimasi masa manfaat setiap aset ditetapkan secara berkala dan diperbarui jika estimasi berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan karena pemakaian, usang secara teknis atau komersial serta keterbatasan hak atau pembatasan lainnya terhadap penggunaan aset. Dengan demikian, hasil operasi di masa mendatang mungkin dapat terpengaruh secara signifikan oleh perubahan dalam jumlah dan waktu terjadinya biaya karena perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas. Penurunan estimasi masa manfaat ekonomis setiap aset tetap akan menyebabkan kenaikan beban penyusutan dan penurunan nilai tercatat aset tetap tersebut.

c. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Perusahaan.

d. Imbalan Kerja jangka Panjang

Penentuan liabilitas imbalan kerja jangka panjang dipengaruhi oleh asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah tersebut. Asumsi asumsi tersebut dijelaskan dalam Catatan 18 dan mencakup, antara lain, tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Hasil aktual yang berbeda dengan asumsi Perusahaan diakumulasi dan diamortisasi ke masa depan dan oleh karena itu, secara umum berdampak pada beban yang diakui dan liabilitas yang tercatat pada periode-periode mendatang. Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi asumsi yang digunakan adalah tepat dan wajar, namun demikian, perbedaan signifikan pada hasil aktual, atau perubahan signifikan dalam asumsi asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah liabilitas imbalan kerja jangka panjang.

e. Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai tercatat asset pada laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak jika kemungkinan besar jumlah laba kena pajak akan memadai untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui. Estimasi manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah asset pajak tangguhan yang diakui berdasarkan kemungkinan waktu terealisasinya dan jumlah laba kena pajak pada masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan.

f. Cadangan Klaim dan Piutang Regaransi

Cadangan klaim dan Piutang Regaransi diukur dengan mengacu pada penurunan nilai yang diatur dalam PSAK 71, dan estimasi yang dibentuk dengan mempertimbangkan perkembangan klaim yang telah terjadi, nilai seluruh penjaminan, faktor ekonomi yang relevan dan terkorelasikan, serta probabilitas tertimbang atas skenario-skenario ekonomi yang mungkin terjadi.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

4. KAS DAN SETARA KAS

Kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Kas	48.799.667	353.933.580
Giro Bank		
Bank Umum	9.270.592.379	6.986.375.573
Bank BPR Syariah	2.070.552.785	3.711.295.128
Bank BPR	2.058.604.588	3.812.020.095
Bank Umum Syariah	893.759.370	862.991.623
Jumlah Giro Bank	14.293.509.122	15.372.682.419
Deposito		
Bank Umum	67.276.025.038	81.276.025.038
Bank BPR Syariah	27.275.000.000	32.275.000.000
Bank Umum Syariah	27.550.000.000	39.550.000.000
Bank BPR	19.765.000.000	18.865.000.000
Jumlah Deposito	141.866.025.038	171.966.025.038
Jumlah Kas dan Setara Kas	156.208.333.827	187.692.641.037
Dikurangi: Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian	(4.405.112.016)	(13.497.571.767)
Jumlah Kas dan Setara Kas - Bersih	151.803.221.811	174.195.069.270

Penempatan deposito PT Jamkrida Jabar pada tanggal 31 Desember 2021 di beberapa bank di Indonesia mendapatkan tingkat suku bunga dari 2,50% p.a. s/d 11,00% p.a dan per 31 Desember 2020 mendapatkan tingkat suku bunga dari 4,25% p.a. s/d 9,50%.

Perubahan Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian

	Tahun yang Berakhir Pada Tanggal	31-Dec-21	31 Desember 2020
Saldo Awal	13.497.571.767	--	--
Penyesuaian atas Implementasi PSAK 71	--	4.421.648.791	4.421.648.791
Pemulihan Tahun Berjalan	9.092.459.751	--	9.075.922.976
Penyisihan Tahun Berjalan	--	9.075.922.976	9.075.922.976
Saldo Akhir	4.405.112.016	13.497.571.767	

5. PIUTANG RE/COGARANSI

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Piutang Re/Cogaransi	63.283.024.935	8.784.558.543
Jumlah Piutang Re/Cogaransi	63.283.024.935	8.784.558.543
Dikurangi: Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian	(4.560.598.252)	--
Jumlah Piutang Re/Cogaransi - Bersih	58.722.426.683	8.895.260.635

Perubahan Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian

	31 Desember 2021
Saldo Awal	--
Pemulihan Tahun Berjalan	--
Penyisihan Tahun Berjalan	4.560.598.252
Saldo Akhir	4.560.598.252

Piutang Re/Cogaransi merupakan tagihan atas klaim dan restitusi kepada broker Best One Asia Reinsurance Broker (BOARE), PT Jakarta Raya Pialang Reasuransi (JAKRE) dan PT Jamkrida Banten.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, piutang estimasian atas Re/Cogaransi masing-masing sebesar Rp12.545.147.099 dan Rp3.757.211.523 (Lihat catatan 19).

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

6. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

Pendapatan yang masih harus diterima pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Pendapatan <i>Management Fee</i>	11.699.694.558	616.520.535
Pendapatan Bunga Investasi	1.115.840.762	689.835.186
Jumlah Pendapatan yang Masih Harus Diterima	12.815.535.320	1.306.355.721
Dikurangi: Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian	(852.506.852)	--
Jumlah Pendapatan yang Masih Harus Diterima - Bersih	11.963.028.468	--

Pendapatan yang masih harus diterima merupakan pendapatan bunga investasi yang berasal dari deposito, pendapatan kupon obligasi atas investasi, komisi atas Re/Cogaransi (*management fee*).

Perubahan Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian

	31 Desember 2021
Saldo Awal	--
Pemulihan Tahun Berjalan	--
Penyisihan Tahun Berjalan	852.506.852
Saldo Akhir	852.506.852

Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian merupakan cadangan atas pendapatan *management fee*

7. PIUTANG LAIN-LAIN

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Piutang Karyawan	142.695.864	71.429.467
Piutang Lainnya	9.640.174	7.750.496
Jumlah Piutang Lain-lain	152.336.038	79.179.963

8. UANG MUKA DAN BEBAN DIBAYAR DIMUKA

Beban dibayar dimuka pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari :

a. **Beban Dibayar Dimuka Jangka Pendek**

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
IJP Re/Cogaransi	14.317.857.394	11.445.220.929
Biaya Akuisisi	5.945.917.872	5.179.302.443
Beban Operasional Dibayar Dimuka	138.794.094	185.629.204
Uang Muka	37.357.500	30.000.000
Jumlah Beban Dibayar Dimuka Jangka Pendek	20.439.926.860	16.840.152.576

b. **Beban Dibayar Dimuka Jangka Panjang**

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
IJP Re/Cogaransi	48.348.635.864	40.293.239.977
Biaya Akuisisi	17.153.319.637	15.724.154.463
Jumlah Beban Dibayar Dimuka Jangka Panjang	65.501.955.501	56.017.394.440

Beban operasional dibayar dimuka dialokasikan sesuai dengan masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus. Masa manfaat asuransi kendaraan, asuransi kesehatan dan sewa kendaraan sesuai dengan jangka waktu kontrak atau polis.

Beban IJP Re/Cogaransi, Biaya Akuisisi diamortisasi sesuai dengan pola pengakuan Imbal Jasa Penjaminan dengan menggunakan pola risiko.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

8. UANG MUKA DAN BEBAN DIBAYAR DIMUKA (LANJUTAN)

Imbal jasa penjaminan atas resiko yang dialihkan ke penjamin ulang diakui sebagai beban premi penjaminan ulang yang diakui sesuai pola pengakuan imbal jasa penjaminan. Biaya-biaya atas perolehan kontrak diakui sebagai biaya inkremental, biaya tersebut secara eksplisit dibebankan kepada pelanggan, biaya tersebut diamortisir secara sistematis sesuai pola pengakuan imbal jasa penjaminan. Penerimaan dari pelanggan atas resiko yang belum terealisasi diakui sebagai pendapatan ditangguhkan.

Beban dibayar dimuka Re/Cogaransi merupakan pembayaran IJP dan IJK tahun berjalan dan tahun-tahun lalu ke mitra Re/Cogaransi yang akan menjadi beban di tahun-tahun mendatang.

Manajemen berkeyakinan biaya dibayar dimuka untuk IJP dan IJK Re/Cogaransi dan fee based income bank telah dialokasikan sesuai jangka waktu penjaminan.

9. SURAT BERHARGA

Aset Keuangan yang Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif

Surat Berharga	Kupon	Jatuh Tempo	Rating	31 Desember 2021	31 Desember 2020
FR 72	8,25%	5/15/2036	--	32.000.000.000	19.398.000.000
FR 68	8,38%	3/15/2034	--	7.000.000.000	2.166.000.000
FR 89	6,88%	5/15/2051	--	5.000.000.000	--
PBS 012	8,60%	4/15/2034	--	5.000.000.000	--
FR 76	7,38%	5/15/2048	--	5.000.000.000	5.115.000.000
Waskita Karya THP II TH 2018	8,25%	2/23/2023	idA	3.000.000.000	3.000.000.000
PLN Th 2019 SERI C	8,70%	6/6/2027	idAAA	2.000.000.000	2.000.000.000
PT Bank BJB	8,15%	12/6/2022	idAA-	1.000.000.000	1.016.000.000
PT PP THP I 2020	9,90%	2/27/2023	idA	1.000.000.000	1.000.000.000
PBS 028	7,75%	10/15/2046	--	--	5.252.500.000
PLN Th 2019 SERI B	8,70%	6/6/2027	idAAA	--	2.000.000.000
PT Multi Sarana	8,50%	6/25/2022	--	--	2.000.000.000
PBS 15	8,00%	7/15/2047	--	--	1.057.000.000
Harga Perolehan				61.000.000.000	44.004.500.000
Selisih Nilai Wajar Surat Berharga				5.811.843.460	2.324.400.000
Jumlah Obligasi yang Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif				66.811.843.460	46.328.900.000
Reksadana					
Reksadana MNC Dana SBN				1.000.000.000	6.000.000.000
Harga Perolehan				1.000.000.000	6.000.000.000
Selisih Nilai Wajar Reksadana				126.205.716	107.977.499
Jumlah Reksadana				1.126.205.716	6.107.977.499

Aset Keuangan yang Diukur Pada Biaya Perolehan yang Diamortisasi

Surat Berharga	Kupon	Jatuh Tempo	Rating	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Hutama Karya	8,07%	6/6/2027	idAAA	6.000.000.000	6.000.000.000
Waskita Karya THP I TH 2017	8,50%	10/6/2022	idA	5.000.000.000	5.000.000.000
Harga Perolehan				11.000.000.000	11.000.000.000
Diskonto Obligasi				--	--
<i>Premium Obligasi</i>				33.176.825	45.960.093
Jumlah Obligasi yang Diukur Pada Biaya Perolehan yang Diamortisasi				11.033.176.825	11.045.960.093
Jumlah Aset Keuangan				78.971.226.001	63.482.837.592
Dikurangi: Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian				(136.839.191)	(1.563.069.474)
Jumlah Aset Keuangan - Bersih				78.834.386.810	61.919.768.118

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
 (Disajikan dalam Rupiah penuh)

9. SURAT BERHARGA (LANJUTAN)

Aset Keuangan Perusahaan merupakan Investasi dalam bentuk Obligasi yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif dan obligasi yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Penentuan kategori aset keuangan dilakukan oleh manajemen.

Perubahan Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian

	Tahun yang Berakhir Pada Tanggal	
	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Saldo Awal	1.563.069.474	--
Penyesuaian atas Implementasi PSAK 71	--	151.425.000
Pemulihan Tahun Berjalan	1.666.500.000	1.411.644.474
Penyisihan Tahun Berjalan	240.269.717	--
Saldo Akhir	136.839.191	1.563.069.474

10. PROPERTI INVESTASI

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Saldo Awal	2.495.100.000	2.472.000.000
Penambahan	--	--
Keuntungan atas perubahan nilai wajar	--	23.100.000
Saldo Akhir	2.495.100.000	2.495.100.000

Akun properti investasi merupakan investasi dalam bentuk tanah dan bangunan yang tidak digunakan untuk kegiatan operasional Perusahaan, tetapi untuk mendapatkan manfaat ekonomi bagi Perusahaan berupa pendapatan sewa.

Aset-aset tersebut telah dilakukan penilaian ulang oleh penilai independen pada tanggal 18 Februari 2020 dengan laporan yang diterbitkan oleh KJPP Aditya Iskandar & Rekan No. 00156/2.0003-01/PI/07/0293/1/III/2020 dan 0153/2.0003-01/PI/07/0293/1/III/2020 pada tanggal 2 Maret 2020 dengan nilai sebesar Rp2.495.100.000.

11. ASET TETAP

	31 Desember 2021			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Harga Perolehan				
Inventaris Kantor	2.682.103.127	237.167.451	--	2.919.270.578
Kendaraan	3.757.590.000	447.985.000	--	4.205.575.000
Gedung	7.379.822.329	148.177.700	--	7.528.000.029
Tanah	3.463.500.000	--	--	3.463.500.000
Aset dalam Penyelesaian	--	--	--	--
Jumlah	17.283.015.456	833.330.151	--	18.116.345.607
Akumulasi penyusutan				
Inventaris Kantor	(1.852.006.827)	(270.563.703)	--	(2.122.570.530)
Kendaraan	(1.236.826.313)	(479.942.938)	--	(1.716.769.251)
Gedung	(856.880.398)	(173.171.155)	--	(1.030.051.553)
Jumlah	(3.945.713.538)	(923.677.796)	--	(4.869.391.334)
Nilai buku	13.337.301.918			13.246.954.273

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

11. ASET TETAP (LANJUTAN)

	31 Desember 2020			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Harga Perolehan				
Inventaris Kantor	1.952.739.327	729.363.800	--	2.682.103.127
Kendaraan	2.887.890.000	1.903.650.000	(1.033.950.000)	3.757.590.000
Gedung	7.254.550.554	125.271.775	--	7.379.822.329
Tanah	3.463.500.000	--	--	3.463.500.000
Aset dalam Penyelesaian	626.031.600	--	(626.031.600)	--
Jumlah	16.184.711.481	2.758.285.575	(1.659.981.600)	17.283.015.456
Akumulasi penyusutan				
Inventaris Kantor	(1.528.168.503)	(323.838.324)	--	(1.852.006.827)
Kendaraan	(1.645.138.876)	(367.149.937)	775.462.500	(1.236.826.313)
Gedung	(686.228.579)	(170.651.819)	--	(856.880.398)
Jumlah	(3.859.535.958)	(861.640.080)	775.462.500	(3.945.713.538)
Nilai buku	12.325.175.523			13.337.301.918

Perusahaan telah mengasuransikan aset tetap untuk menutup kemungkinan kerugian terhadap risiko kebakaran, pencurian, dan bencana alam dengan nilai pertanggungan asuransi sebesar Rp15.000.000.000 pada PT Asuransi Jasa Raharja Putera.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke tiap-tiap akun aset tetap yang bersangkutan dan penyusutan dimulai pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan sesuai tujuannya semula.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah pertanggungan asuransi tersebut telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian yang terjadi atas aset tetap yang dipertanggungkan.

Penjualan aset tetap pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020
Harga Jual	426.000.000
Nilai Buku	258.487.500
Keuntungan penjualan aset	167.512.500

12. ASET LAIN-LAIN

Aset lain-lain pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari :

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Software	912.388.255	801.803.255
Aset Dalam Penyelesaian	63.177.000	--
Aset Lainnya	22.000.000	22.000.000
Harga Perolehan Aset Lain-Lain	997.565.255	823.803.255
Akumulasi Amortisasi Software	(745.954.405)	(655.245.534)
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya	(22.000.000)	(16.041.667)
Akumulasi Amortisasi Aset Lain-Lain	(767.954.405)	(671.287.201)
Nilai Buku Aset Lain-lain	229.610.850	152.516.054

Software merupakan lisensi perangkat lunak komputer dan diamortisasi selama 4 tahun.

Aset lainnya merupakan pemeringkatan atas PT Jamkrida Jabar dan sistem SDM PT Jamkrida Jabar dengan estimasi empat tahun dan metode amortisasi yang digunakan metode garis lurus.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

13. UTANG RE/COGARANSI

Utang Re/Cogaransi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Utang Regaransi:		
<i>Best One Asia Reinsurance Broker (BOARE)</i>	41.843.888.104	5.358.901.111
PT Jakarta Raya Pialang Reasuransi (JAKRE)	1.196.442.595	1.150.544.056
Utang Co-garansi:		
PT Jamkrida Jakarta	--	43.606.536
Jumlah Utang Re/Cogaransi	43.040.330.699	6.553.051.703

Utang kepada broker *Best One Asia Reinsurance Broker (BOARE)*, PT Jamkrida Jakarta dan PT Jakarta Raya Pialang Reasuransi (JAKRE) merupakan utang premi IJP dan IJK yang harus dibayarkan Perusahaan untuk mengalihkan risiko klaim yang diakibatkan meninggal, PHK dan macet atas terjamin atas Kredit Multiguna, KCR, Mikro dan Umum. Dicatat secara akrual sesuai dengan tarif yang ditetapkan Perusahaan.

14. UTANG KLAIM

Utang Klaim pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari :

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Utang Klaim	--	1.914.592.578
Jumlah Utang Klaim	--	1.914.592.578

Utang klaim merupakan kewajiban kepada penerima penjaminan dimana beban klaim telah disetujui oleh Komite Klaim namun belum dilakukan pembayaran.

15. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Beban yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari :

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Beban Umum yang masih harus dibayar	306.042.218	25.045.023
Biaya Pegawai Yang Masih Harus dibayar	85.194.924	85.141.945
Cadangan CSR	73.649.143	78.158.213
Biaya Komisi Agen	49.386.358	188.898.344
Jumlah Beban Yang Masih Harus Dibayar	514.272.643	377.243.525

Merupakan kewajiban Perusahaan yang masih harus dibayar kepada vendor atas kerjasama yang dilakukannya dengan PT Jamkrida Jabar, biaya keamanan, insentif dan uang makan, transport, uang lembur karyawan dan biaya komisi agen bulan Desember 2021 yang biasa dibayarkan setiap tanggal 7 bulan berikutnya.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

16. PENAMPUNGAN SEMENTARA

Penampungan sementara per 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Penampungan IJP Bank Umum	9.014.335.193	4.270.417.568
Penampungan IJP Bank BPR	996.177.163	658.710.900
Penampungan IJP Bank Syariah	680.830.495	1.072.690.541
Jumlah Penampungan Sementara IJP	10.691.342.851	6.001.819.009
Penampungan Sementara Subrogasi	1.102.348.085	131.705.625
Jumlah Penampungan Sementara	11.793.690.936	6.133.524.634

Akun Penampungan IJP terdiri dari Imbal Jasa Penjaminan yang telah diterima namun belum diterbitkan Sertifikat Penjaminan (SP) dan Sertifikat Kafalah (SK)-nya, serta kelebihan pembayaran IJP dan IJK.

Penampungan sementara subrogasi merupakan bagian yang harus dibayar kepada pihak Re/Cogaransi atas pendapatan subrogasi yang telah diterima oleh perusahaan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan.

17. UTANG LANCAR LAINNYA

Utang lancar lainnya pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Utang Lancar Lain-lain	244.746	5.245.250
Jumlah Utang Lancar Lainnya	244.746	5.245.250

18. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari:

a. Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Pendek

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Imbal Jasa Penjaminan Jangka Pendek	32.601.809.176	28.876.492.800
Imbal Jasa Kafalah Jangka Pendek	3.107.478.683	2.389.062.218
Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Pendek	35.709.287.859	31.265.555.018

b. Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Panjang

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Imbal Jasa Penjaminan Jangka Panjang	94.938.140.222	86.106.264.138
Imbal Jasa Kafalah Jangka Panjang	3.133.198.738	5.695.398.316
Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Panjang	98.071.338.960	91.801.662.454

Imbal Jasa Penjaminan dan Imbal Jasa Kafalah diterima dimuka merupakan pembayaran IJP dan IJK penjaminan tahun berjalan dari Terjamin kepada Perusahaan yang akan menjadi pendapatan di tahun-tahun mendatang.

Besarnya tarif imbal jasa penjaminan ditentukan berdasarkan hasil dari identifikasi hak dan kewajiban pelaksanaan dalam kontrak, dalam perspektif bisnis penjaminan, hak dan kewajiban dimaksud merupakan risiko yang akan dan telah dialihkan sesuai dengan yang dinyatakan dalam kontrak. Kontrak dimaksud memiliki jangka waktu pelaksanaan, maka dari itu kewajiban pelaksanaan entitas diukur berdasarkan risiko yang akan dan telah dilepas sepanjang kontrak berlaku.

Pendapatan imbal jasa penjaminan diakui sejak bulan sertifikat penjaminan diterbitkan dan diamortisasi sesuai dengan besarnya risiko yang terealisasi sepanjang jangka waktu penjaminan.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

19. CADANGAN KLAIM

Cadangan klaim pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari :

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Saldo Awal	6.482.596.741	4.050.464.351
Penyesuaian atas Implementasi PSAK 71		
Cadangan Klaim	--	6.211.425.798
Pembentukan Cadangan Klaim	12.425.767.987	--
Pemulihan Cadangan Klaim	--	(3.779.293.408)
Jumlah Cadangan Klaim	18.908.364.728	6.482.596.741

Piutang Estimasi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari :

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Saldo Awal	3.757.211.523	--
Pembentukan Piutang Estimasi	8.787.935.576	4.764.240.760
Penyesuaian atas Implementasi PSAK 71 pembentukan piutang estimasi	--	(1.007.029.237)
Jumlah Piutang Estimasi	12.545.147.099	3.757.211.523

Cadangan Klaim merupakan pembentukan cadangan atas klaim yang mungkin akan terjadi di tahun-tahun mendatang atas penjaminan yang belum jatuh tempo.

Cadangan klaim minimal yang dibentuk telah sesuai dengan PSAK 71 terkait kontrak jaminan, cadangan klaim dihitung menggunakan basis *Estimated Credit Loss (ECL)* dengan memperhatikan faktor-faktor makro ekonomi terkait yang berhubungan dengan kemungkinan klaim terjadi.

20. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

Liabilitas imbalan pasca kerja pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari :

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	1.834.011.406	1.967.916.012
Kewajiban Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya	292.341.214	379.237.368
Jumlah Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	2.126.352.620	2.347.153.380

Standar akuntansi PSAK 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja" berlaku efektif untuk laporan keuangan dengan periode dimulai atau setelah tanggal 1 Januari 2015 dan diterapkan secara retrospektif.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perusahaan mencatat liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan berdasarkan perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan metode "*Projected Unit Credit*".

Perhitungan kewajiban imbalan pasca kerja berikut didasarkan pada Laporan Aktuaris yang dilakukan oleh PT Padma Radya Aktuaria dengan rincian sebagai berikut:

Imbalan Pasca Kerja

a. **Rekonsiliasi NKKIP dan Nilai Wajar Aset Program atas Aset dan Kewajiban**

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	1.834.011.406	1.967.916.012
Nilai wajar Aset	--	--
Status Pendanaan	1.834.011.406	1.967.916.012
Jumlah lain yang diakui	--	--
Kewajiban diakui di laporan posisi keuangan	1.834.011.406	1.967.916.012

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

20. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (LANJUTAN)

b. Mutasi Kewajiban dan Aset yang Diakui di Laporan Posisi Keuangan

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Kewajiban awal periode	1.967.916.012	1.389.732.898
Beban yang diakui di laba/rugi	15.859.479	382.309.801
Kerugian (keuntungan) komprehensif lainnya	(39.291.085)	195.873.313
Penyesuaian atas koreksi	--	--
Pembayaran Manfaat	(110.473.000)	--
Kewajiban akhir periode	1.834.011.406	1.967.916.012

c. Beban yang Diakui di Laporan Laba Rugi

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Biaya jasa kini	265.020.873	272.359.620
Biaya bunga	111.288.134	109.950.181
Biaya jasa lalu vested	(360.449.528)	--
Jumlah Beban yang Diakui di Laporan Laba Rugi	15.859.479	382.309.801

d. Pengakuan (Keuntungan) Kerugian Aktuaria

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
(Keuntungan) kerugian aktuaria yang belum diakui pada awal periode akuntansi	--	--
(Keuntungan) kerugian aktuaria - kewajiban	(39.291.085)	195.873.313
Jumlah (keuntungan) kerugian aktuaria yang diakui	(39.291.085)	195.873.313

e. Kerugian (Keuntungan) Komprehensif Lainnya yang diakui

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
(Keuntungan) kerugian aktuaria dari kewajiban	(39.291.085)	195.873.313
Perubahan lainnya	--	--
Kerugian (Keuntungan) Komprehensif Lainnya yang diakui	(39.291.085)	195.873.313

f. Akumulasi Kerugian (Keuntungan) Komprehensif Lainnya yang diakui

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Saldo Kerugian (Keuntungan) Komprehensif Lainnya awal periode	--	--
Kerugian (Keuntungan) Komprehensif Lainnya tahun berjalan	(39.291.085)	195.873.313
Saldo Kerugian (Keuntungan) Komprehensif Lainnya akhir periode	(39.291.085)	195.873.313

Program Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

Program Imbalan Kerja jangka Panjang Lainnya berdasarkan Peraturan Perusahaan yang mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon dan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya dalam bentuk cuti besar.

Perusahaan memberikan 2 (dua) bulan cuti panjang bagi karyawan yang masih aktif selama 6 (enam) tahun masa kerja dan kelipatannya yang akan diberikan di tahun ke 7 (tujuh) dan ke 8 (delapan), masing-masing selama 1 (satu) bulan.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

20. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (LANJUTAN)

a. Rekonsiliasi NKKIP dan Nilai Wajar Aset Program atas Aset dan Kewajiban

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	292.341.214	379.237.368
Nilai wajar Aset	--	--
Status Pendanaan	292.341.214	379.237.368
Jumlah lain yang diakui	--	--
Kewajiban diakui di laporan posisi keuangan	292.341.214	379.237.368

b. Mutasi Kewajiban dan Aset yang Diakui di Laporan Posisi Keuangan

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Kewajiban awal periode	379.237.368	386.292.139
Beban yang diakui di laba/rugi	105.716.877	99.380.010
Kerugian (Keuntungan) Komprehensif Lainnya tahun berjalan	(192.613.031)	(106.434.782)
Kewajiban akhir periode	292.341.214	379.237.368

c. Beban yang Diakui di Laporan Laba Rugi

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Biaya jasa kini	79.170.261	68.476.639
Biaya bunga	26.546.616	30.903.371
Jumlah Beban yang Diakui di Laporan Laba Rugi	105.716.877	99.380.010

d. Beban yang Diakui di Laporan Komprehensif Lainnya

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Pengukuran kembali aset imbalan pasti neto	(192.613.031)	(106.434.782)
Jumlah Beban yang Diakui di Laporan komprehensif lainnya	(192.613.031)	(106.434.782)

Asumsi utama yang digunakan sebagai berikut:

Dalam mengestimasi manfaat pensiun per 31 Desember 2021 dan 2020 untuk kedua program tersebut di atas, Aktuaris dalam perhitungannya menggunakan *Projected Unit Credit Actuarial Cost Method*, yang perhitungannya mengacu kepada tingkat pembiayaan yang sebenarnya diperlukan dalam satu periode. Asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan aktuaris adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Tingkat Diskonto :	7,25%	7,0%
Kenaikan Gaji per Tahun :	6%	6%
Tabel Mortalita :	100% TMI4	100% TMI4
Tingkat Cacat :	10% TMI4	10% TMI4
Usia Pensiun Normal :	58 tahun	58 tahun

21. PERPAJAKAN

a. Utang Pajak

Utang Pajak pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
PPh 4 ayat 2	126.181.671	99.540.762
PPh Pasal 21	331.399.152	257.844.813
PPh Pasal 23	44.649.126	33.097.891
Jumlah Utang Pajak	502.229.949	390.483.466

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

21. PERPAJAKAN (LANJUTAN)

a. Utang Pajak (Lanjutan)

Utang pajak PPh Pasal 21 adalah utang pajak atas pajak pendapatan karyawan pada 31 Desember 2021 yang menjadi tanggungan perusahaan dan pajak atas pendapatan Direksi dan Komisaris yang dipotong oleh perusahaan. Utang pajak Pasal 23 adalah utang pajak dikarenakan pihak perusahaan sebagai pemotong pajak atas kegiatan yang diatur dalam PPh pasal 23 tersebut.

b. Beban Pajak

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan, seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Laba Sebelum Pajak	11.727.411.463	4.193.112.318
Perbedaan Temporer:		
Beban Imbalan Pasca Kerja	11.103.356	481.689.811
Perbedaan Penyusutan antara Fiskal dan Komersil	3.238.986	(49.868.405)
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(5.140.568.567)	--
Kenaikan Cadangan Klaim	3.637.832.410	(2.725.385.218)
Jumlah	(1.488.393.815)	(2.293.563.812)
Perbedaan Permanen:		
Beban Promosi	1.771.273.749	414.058.358
Beban Perjalanan Dinas	665.318.590	412.680.104
Tunjangan Kesehatan	403.374.036	375.707.178
Beban Umum Lainnya	627.996.915	231.211.023
Beban Representasi	528.595.747	211.471.923
Tunjangan Baju	102.525.700	122.422.400
Beban Diklat Karyawan	190.930.358	133.790.000
Pemeliharaan Kendaraan	134.909.182	84.854.973
Jumlah	4.424.924.277	1.986.195.959
Pendapatan yang Dikenakan PPh Final:		
Pendapatan Bunga Deposito Dan Bagi Hasil	(8.191.259.132)	(10.253.007.228)
Pendapatan Obligasi	(5.436.346.683)	(4.937.908.711)
Pendapatan Jasa Giro	(344.879.204)	(302.108.247)
Keuntungan Penjualan Surat Berharga	(1.335.861.584)	(2.071.648.648)
PPh Pasal 4 (2) Bunga Deposito	1.641.800.301	2.040.065.357
PPh Pasal 4 (2) Kupon Obligasi	686.102.169	726.696.039
PPh Pasal 4 (2) Bunga Jasa Giro	69.943.901	60.333.832
PPh Pasal 4 (2) Penjualan Efek	176.885.687	310.387.079
Jumlah	(12.733.614.545)	(14.427.190.527)
Jumlah koreksi fiskal	(9.797.084.083)	(14.734.558.380)
Laba (Rugi) Fiskal Tahun Berjalan	1.930.327.380	(10.541.446.062)
Laba (Rugi) (dibulatkan)	1.930.327.000	(10.541.446.000)
Kerugian Pajak Tahun 2016	--	(1.773.305.000)
Kerugian Pajak Tahun 2017	(8.520.565.000)	(8.520.565.000)
Kerugian Pajak Tahun 2018	(7.826.711.000)	(7.826.711.000)
Kerugian Pajak Tahun 2019	(5.030.548.000)	(5.030.548.000)
Kerugian Pajak Tahun 2020	(10.541.446.000)	--
Rugi Fiskal yang dapat Dikompensasi	(29.988.943.000)	(33.692.575.000)

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

21. PERPAJAKAN (LANJUTAN)

d. Pajak Tangguhan

	31 Desember 2021			
	Saldo Awal	Laporan Perubahan Ekuitas	Laporan Laba Rugi	Saldo Akhir
Selisih penyeputan aset tetap	(10.971.049)	--	712.577	(10.258.472)
Cadangan klaim Bersih - Setelah dikurangi Piutang Estimasi	599.584.747	--	800.323.130	1.399.907.877
Beban Imbal Pasca Kerja	516.373.744	(51.018.906)	2.442.738	467.797.576
Selisih Nilai Wajar Keuntungan Surat Berharga Tersedia Untuk Dijual	494.481.563	(597.126.769)	--	(102.645.206)
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	3.313.341.073		(1.130.925.085)	2.182.415.988
Kerugian Fiskal yang dapat dikompensasi	7.412.366.500	--	(814.799.124)	6.597.567.376
Jumlah	12.325.176.578	(648.145.675)	(1.142.245.763)	10.534.785.140
	31 Desember 2020			
	Saldo Awal	Laporan Perubahan Ekuitas	Laporan Laba Rugi	Saldo Akhir
Selisih penyeputan aset tetap	(584.651.979)	--	573.680.930	(10.971.049)
Cadangan klaim Bersih - Setelah dikurangi Piutang Estimasi	1.012.616.087	--	(413.031.340)	599.584.747
Beban Imbal Pasca Kerja	404.944.321	22.359.633	89.069.790	516.373.744
Selisih Nilai Wajar Keuntungan Surat Berharga Tersedia Untuk Dijual	-	494.481.563	--	494.481.563
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	-	--	3.313.341.073	3.313.341.073
Kerugian Fiskal yang dapat dikompensasi	6.437.660.500	--	974.706.000	7.412.366.500
Jumlah	7.270.568.929	516.841.196	4.537.766.453	12.325.176.578

22. EKUITAS

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Penyertaan Modal	153.200.000.000	153.200.000.000
Cadangan Umum	40.139.066.131	35.601.299.677
Saldo Laba	10.585.165.700	8.730.878.772
Selisih Nilai Wajar Surat Berharga	(569.214.323)	2.927.569.407
Selisih pengukuran kembali kewajiban imbalan pasca kerja	(97.398.214)	(278.283.424)
Jumlah Ekuitas	203.257.619.294	200.181.464.432

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

22. EKUITAS (LANJUTAN)

Berdasarkan akta notaris Yulianti Idawati, S.H., Sp.N, No. 3 tanggal 3 Oktober 2012, modal dasar Perusahaan adalah sebesar Rp300.000.000.000 dari 30.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp10.000.000, dan berdasarkan akta No. 60 tanggal 26 Desember 2012 dari notaris yang sama tentang keputusan para pemegang saham diluar rapat perseroan terbatas PT Jamkrida Jabar (keputusan sirkuler) memutuskan:

- I. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil bagian 145.000 (seratus empat puluh lima ribu) lembar saham atau sebesar Rp 145.000.000.000 dengan dua tahap penyetoran yaitu:
 - a. Tahap pertama sebelum penandatanganan akta sebesar Rp 25.000.000.000.
 - b. Tahap kedua sesudah penandatanganan akta sebesar Rp 75.000.000.000.
 - c. Tahap ketiga sesudah penandatanganan akta sebesar Rp 45.000.000.000.
- II. Yakes Pegawai Bank BJB mengambil bagian 20 (dua puluh) lembar saham atau sebesar Rp 200.000.000.

Setoran modal tahap pertama dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 937/1864/PM/LS/KEU tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp25.000.000.000 dan setoran modal dari Yayasan Kesehatan Pegawai Bank BJB pada tanggal 1 Nopember 2012 sebesar Rp200.000.000, kedua setoran modal dari para pemegang saham tersebut diterima pada Bank BJB No. rekening 00228688871001 atas nama PT Jamkrida Jabar.

PT Jamkrida Jabar telah menerima setoran modal tahap ke dua dari Pemerintah Provinsi Jabar sebesar Rp 50.000.000.000 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 931/53/PM/LS/2013 tanggal 18 Januari 2013 sebesar Rp 50.000.000.000, Pada tanggal 27 November 2013 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 931/2041/PM/LS/2013 terdapat penyetoran modal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 25.000.000.000,-.

PT Jamkrida Jabar telah menerima setoran modal tahap ke tiga dari Pemerintah Provinsi Jabar sebesar Rp 45.000.000.000,- pada tanggal 10 Desember 2015.

Berdasarkan akta No. 11 tanggal 16 Agustus 2017 dari notaris yang sama tentang keputusan para pemegang saham diluar rapat perseroan terbatas PT Jamkrida Jabar (keputusan sirkuler) memutuskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil bagian 8.000 lembar saham atau sebesar Rp 8.000.000.000. Komposisi modal diempatkan dan disetor PT Jamkrida Jabar per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham (Lembar)	Nominal (Rp)	Jumlah (Rp)	Percentase (%)
Pemerintah Provinsi Jawa Barat	15.300	10.000.000	153.000.000.000	99,87%
YKP Bank BJB	20	10.000.000	200.000.000	0,13%
Jumlah	15.320	20.000.000	153.200.000.000	100%

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Jamkrida Jabar Nomor 11 tanggal 11 Juni 2020 yang dibuat oleh notaris Mohamad Juania, SH., M.Kn. para pemegang saham menyatakan dan mengesahkan Penggunaan Laba Bersih tahun 2019 sebesar Rp 3.907.910.588, dibagi untuk Cadangan Umum sebesar 25%, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebesar 2%, Dividen sebesar 51,10%, Tantiem dan Bonus sebesar 21,90%.

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Jamkrida Jabar Nomor 03 tanggal 18 Juni 2019 yang dibuat oleh notaris Rita Evryani, SH., para pemegang saham menyatakan dan mengesahkan Penggunaan Laba Bersih tahun 2018 sebesar Rp 1.333.590.235, dibagi untuk Cadangan Umum sebesar 25%, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebesar 2%, Dividen sebesar 51,10%, Tantiem dan Bonus sebesar 21,90%.

23. PENDAPATAN PENJAMINAN

Imbal jasa penjaminan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Imbal Jasa Penjaminan/Kafalah	183.093.487.470	130.550.626.733
Beban Akuisisi	(30.728.197.910)	(22.669.038.213)
Restitusi IJP	(3.202.339.341)	(2.467.490.149)
Management Fee	17.534.896.772	7.397.624.253
Beban Regaransi	(90.364.193.737)	(57.600.884.828)
Jumlah Jasa Penjaminan Kredit	76.333.653.254	55.210.837.797

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

23. PENDAPATAN PENJAMINAN (LANJUTAN)

Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan Imbal Jasa Kafalah (IJK) adalah premi yang diterima oleh Perusahaan dari terjamin dalam rangka kegiatan usaha penjaminan. Besarnya IJP dan IJK dihitung dari tarif IJP dan IJK, plafond kredit/pembiayaan dan jangka waktu kredit/pembiayaan.

Untuk kredit *eksisting*, besarnya tarif IJP ditetapkan dengan mempertimbangkan antara lain: produk penjaminan, risiko yang dijamin dan jangka waktu penjaminan.

Biaya komisi agen sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pada Nomor: 6/POJK.05/2014 BAB II Pasal 4 (6) adalah maksimal sebesar 20% dari nilai Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan Imbal Jasa Kafalah (IJK). Tarif biaya komisi agen dan *fee based income* bank yang berlaku di PT Jamkrida Jabar adalah sebesar 15% dan dibebankan selama jangka waktu penjaminan dan dialokasikan berdasarkan tahun terbit Sertifikat Penjaminan (SP) dan Sertifikat Kafalah (SK) dengan batas waktu maksimal 4 tahun.

Mulai November 2016 pengakuan Imbal Jasa Penjaminan (IJP), Imbal Jasa Kafalah (IJK), *fee based income*, biaya komisi agen dan beban Re/Cogaransi diakui sesuai jangka waktu kredit.

Mulai tahun 2019 Komisi Agen/Broker dan Fee Based Income Bank dijadikan satu menjadi biaya akuisisi.

24. PENDAPATAN INVESTASI

Pendapatan investasi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Pendapatan Bunga Deposito Bruto	6.589.379.106	8.393.905.229
Pendapatan Kupon Obligasi Bruto	5.436.346.683	4.937.908.711
Pendapatan Bagi Hasil Deposito Bruto	1.601.880.026	1.859.101.999
Keuntungan Penjualan Surat Berharga	1.335.861.584	2.071.648.648
Pendapatan Sewa Properti	10.100.000	22.800.000
Beban Amortisasi Diskonto	(8.216.964)	(19.911.757)
Jumlah Pendapatan Investasi	14.965.350.435	17.265.452.830

25. BEBAN KLAIM

Beban klaim pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Beban Klaim	63.389.134.331	42.487.066.581
Pembentukan (Pemulihan) Cadangan Klaim	3.637.832.410	(2.725.385.218)
Jumlah Beban Klaim	67.026.966.741	39.761.681.363

26. BEBAN USAHA

Beban usaha pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Beban Sumber Daya Manusia	10.514.469.094	11.817.030.102
Beban Administrasi Kantor dan Umum	5.301.953.833	3.883.745.395
Beban Operasional	2.872.876.377	1.379.402.701
Jumlah Beban Usaha	18.689.299.304	17.080.178.198
Rincian Beban Operasional		
Beban Promosi	1.771.273.749	502.102.882
Beban Perjalanan Dinas	665.318.590	412.680.104
Beban Kendaraan Dinas	433.105.873	294.284.160
Beban Penagihan Subrogasi	3.178.165	170.335.555
Jumlah Beban Operasional	2.872.876.377	1.379.402.701

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

26. BEBAN USAHA (LANJUTAN)

Rincian Beban Sumber Daya Manusia

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Gaji dan Tunjangan Karyawan	6.106.271.306	5.504.089.271
Gaji dan Tunjangan Direksi	1.192.175.606	1.989.516.129
Beban Insentif	1.296.906.203	1.298.105.183
Beban PPH 21	988.100.752	1.236.509.240
Gaji dan Tunjangan Komisaris	260.023.475	550.333.333
Beban Imbal Pasca Kerja	121.576.356	481.689.811
Beban Purna Jabatan	213.000.000	472.500.000
Beban Pengembangan SDM	218.900.358	161.977.135
Gaji dan Tunjangan Dewan Pengawas Syariah	96.515.038	98.400.000
Tunjangan SDM Lainnya	21.000.000	23.910.000
Jumlah Beban Sumber Daya Manusia	10.514.469.094	11.817.030.102

Rincian Beban Administrasi Kantor dan Umum

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Beban Umum	3.015.029.613	1.568.184.023
Beban Penyusutan dan Amortisasi Aset	923.677.796	861.640.080
Beban Amortisasi Software dan Aset Lainnya	96.667.204	193.517.767
Beban Pemeliharaan dan Asuransi Aset	491.452.497	568.430.304
Beban Administrasi	394.652.587	379.771.055
Beban Komunikasi dan Energi	349.225.098	244.924.528
Beban Sewa	20.081.888	56.110.488
Beban Pajak - Pajak	11.167.150	11.167.150
Jumlah Beban Administrasi Kantor dan Umum	5.301.953.833	3.883.745.395

27. PENDAPATAN SUBROGASI

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Pendapatan Subrogasi		
Pendapatan Subrogasi Penjaminan Bank	2.621.926.441	1.815.942.976
Jumlah Pendapatan Subrogasi	2.621.926.441	1.815.942.976

28. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Pendapatan Lain-lain		
Pendapatan Jasa Giro	344.879.204	302.108.247
Pendapatan Lainnya	621.116.913	196.397.037
Pemulihan CKKE Aset Keuangan	10.553.673.671	--
Jumlah Pendapatan Lain-lain	11.519.669.788	498.505.284
 Beban Lain-lain		
- Beban Kenaikan CKKE Aset Keuangan	--	(10.487.567.450)
- Beban Kenaikan CKKE Piutang Regar	(4.560.598.252)	--
- Beban Kenaikan CKKE Management Fee	(852.506.852)	--
- PPh Pasal 4 (2) Bunga Deposito	(1.641.800.301)	(2.040.065.357)
- PPh Pasal 4 (2) Kupon Obligasi	(686.102.169)	(726.696.039)
- PPh Pasal 4 (2) Penjualan Efek	(176.885.687)	(310.387.079)
- Beban Bukan Usaha Lainnya	(9.085.248)	(130.717.250)
- PPh Pasal 4 (2) Bunga Jasa Giro	(69.943.901)	(60.333.832)
Jumlah Beban Lain-lain	(7.996.922.410)	(13.755.767.007)
Jumlah (Pendapatan) Beban Lain-lain	3.522.747.378	(13.257.261.723)

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
 (Disajikan dalam Rupiah penuh)

29. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi, dimana manajemen berpendapat transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga, yang meliputi:

Pihak Berelasi	Sifat Hubungan	Sifat Dari Transaksi
Bank BJB	Pengendalian bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Giro, deposito dan penampungan sementara
Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Pemegang saham	Penyertaan Saham
YKP Bank BJB	Pemegang saham	Penyertaan Saham

30. INFORMASI TAMBAHAN

a. Kerja sama dengan perusahaan Asuransi

PT Jamkrida Jabar Unit Usaha Syariah bekerja sama dengan pihak asuransi untuk melakukan kegiatan dalam bentuk pemberian penjaminan kredit multiguna/pembelian murabahah/mudharabah bagi penerima kredit/pembelian, kerugian yang ditanggung adalah kerugian akibat risiko kematian.

PT Jamkrida Jabar Unit Usaha Syariah telah melakukan perjanjian kerja sama dengan:

- Bank BJB Syariah
- BPRS HIK Parahyangan
- BPRS Al Maseem
- BPRS Patriot Kota Bekasi
- BPRS Al Madinah Kota Tasikmalaya

b. Jenis-Jenis Produk Penjaminan Syariah

- Kafalah Pembiayaan Umum
- Kafalah Pembiayaan Multiguna
- Kafalah Pembiayaan Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa
- Kafalah Pembiayaan Mikro
- Kafalah Pembiayaan Kepada BPRS
- Kafalah Kontra Bank Garansi

c. Laporan Laba (Rugi) Syariah Tahun 2021 dan 2020

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Pendapatan Penjaminan		
Imbal Jasa Kafalah	12.004.094.916	7.879.651.786
Beban Akuisisi	(2.013.346.934)	(1.328.244.468)
Manajemen Fee	618.786.989	336.026.313
Restitusi IJP	(117.105.077)	(5.564.274)
Jumlah Pendapatan Penjaminan	10.492.429.894	6.881.869.357
Beban Klaim		
Beban Klaim	3.675.603.788	2.600.942.107
Pemulihan Cadangan Klaim	(106.932.362)	10
Beban Re/Cogaransi	-	3.018.204.152
Jumlah Beban Klaim	3.568.671.426	5.619.146.269
Pendapatan Penjaminan Bersih	6.923.758.468	1.262.723.088
Pendapatan Investasi	2.645.707.850	2.627.293.357
Pendapatan Subrogasi	213.937.338	53.339.078
Pendapatan (Beban) Non Operasional	(354.053.984)	(437.495.669)
Beban Usaha	(902.687.523)	(1.004.873.212)
Laba Sebelum Pajak	8.526.662.149	2.500.986.642
Beban Pajak Kini	--	--
Manfaat Pajak Tangguhan	--	-
Laba Bersih Unit Syariah	8.526.662.149	2.500.986.642

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

31. REKLASIFIKASI AKUN

Terdapat akun dalam laporan keuangan tahun 2020 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan tahun 2021, sebagai berikut:

	Sebelum Reklasifikasi	Setelah Reklasifikasi
Laporan Posisi Keuangan		
Imbal Jasa Kafalah Jangka Pendek	2.384.861.099	2.389.062.218
Imbal Jasa Kafalah Jangka Panjang	5.699.599.435	5.695.398.316
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain		
Pendapatan Penjaminan		
Beban Regaransi	--	57.600.884.828
Beban Klaim		
Beban Regaransi	57.600.884.828	--

32. PERJANJIAN DAN PERIKATAN

Perusahaan menandatangani beberapa perjanjian dan perikatan, sebagai berikut:

- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten perihal penjaminan kredit mikro dan kecil, penjaminan kredit usaha.
- PT Nusantara Insurance Broker perihal Program Penjaminan BJB Kredit Konsumen.
- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten perihal penjaminan kredit modal kerja konstruksi, dan pengadaan barang/jasa.
- PT Brocade Insurance Broker tentang Program Tanggungan Asuransi BJB Kredit Konsumen.
- PT Jamkrida Banten perihal Kafalah Bersama (KOGARANSI)
- PT BPR Syariah Artha Fisabilillah perihal Kafalah Pembiayaan Umrah.
- PT BPR Syariah Artha Fisabilillah perihal Kafalah Pembiayaan Umrah.
- PT Rawikara Sembawa Mandiri tentang Mitra Keagenan Penjaminan pemberian penjaminan kredit/pembiayaan untuk membantu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM)
- PT Wahana Sentra Artha perihal Penjaminan Kredit Modal Usaha Kepada Koperasi dan Perorangan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM).
- PT Wahana Sentra Artha perihal Penjaminan Kredit Konsumtif.
- PT Jakarta Inti Bersama Insurance Brokers perihal Jasa Konsultan dan Keperantaraan Penjaminan Kredit Konsumtif yang disalurkan oleh LKM.
- PT Estetika Jasatama perihal Program Penjaminan Kredit Konsumen.
- PT Adonai Pialang Asuransi perihal Program Penjaminan BJB Kredit Konsumen
- PT Kalibesar Raya Utama perihal Program Penjaminan BJB Kredit Konsumen
- PT Bank Perkreditan Rakyat Hayura Artalola perihal Penjaminan Kredit Modal Usaha Kepada Koperasi dan Perorangan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM)
- PT Bank Perkreditan Rakyat Hayura Artalola perihal Penjaminan Kredit Pola Potong Gaji.
- PT Global Risk Management perihal Penyelenggaraan Program Penjaminan Kredit Konsumtif Pada PT Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Melalui Mekanisme Pialang Asuransi.
- PT Bank Perkreditan Sinar Mas Pelita perihal Penjaminan Kredit Konsumtif dan Kredit Sertifikasi Guru.
- PT Bank Perkreditan Sinar Mas Pelita perihal Penjaminan Kredit Modal Usaha kepada Koperasi dan Perorangan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM)
- PT Adonai Pialang Asuransi perihal Program Penjaminan BJB Kredit Konsumen.
- PT Bank Jabar Banten Syariah perihal Kafalah Pembiayaan (*Cash Loas & Non Cash Loan*)
- PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cibitung perihal Kafalah Pembiayaan Konsumtif Pola Potong Tunjangan Sertifikasi Guru.
- PT Bank Perkreditan Rakyat Duta Pasundan perihal Penjaminan Kredit Konsumtif Pola Potong Tunjangan Sertifikasi Guru.
- PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Patriot Bekasi tentang Kafalah Pembiayaan Konsumtif Pola Potong Tunjangan Sertifikasi Guru.
- PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Baiturridha Pusaka perihal Kafalah Pembiayaan Pola Potong Gaji.
- Koperasi Simpan Pinjam (Kospin Jasa) dengan PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penjaminan Bersama Pinjaman Produktif.
- PT Global Risk Management perihal Penyelenggaraan Program Penjaminan Pembiayaan Konsumtif pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Unit Usaha Syariah Melalui Mekanisme Pialang Asuransi.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

32. PERJANJIAN DAN PERIKATAN (LANJUTAN)

Perusahaan menandatangani beberapa perjanjian dan perikatan, sebagai berikut: (Lanjutan)

- PT Fresnel Perdana Mandiri perihal Program Penjaminan BJB Kredit Konsumen.
- PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bina Amanah Satria perihal Kafalah Pembiayaan Pola Potong Gaji.
- PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bina Amanah Satria perihal Kafalah Pembiayaan Produktif.
- PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Al-Madinah Tasikmalaya perihal Kafalah Pembiayaan Pola Potong Gaji.
- PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Al-Madinah Tasikmalaya perihal Kafalah Pembiayaan Modal Usaha Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM)
- PERUM Bank Perkreditan Rakyat Garut perihal Penjaminan Kredit Pola Potong Gaji.
- PERUM Bank Perkreditan Rakyat Garut perihal Penjaminan Kredit Modal Usaha Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- PT Bank Perkreditan Rakyat Astanajapura perihal Penjaminan Kredit Modal Usaha Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM)

33. PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Direksi bertanggung jawab sepenuhnya atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021. Laporan keuangan diterbitkan pada tanggal 14 April 2022.



Jl. Soekarno Hatta No. 592, Sekejati,
Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286